

Jantra

Jurnal Sejarah dan Budaya

Sejarah dan Budaya Jawa

ANALISA

- » Pascagempa Intensitas Gotong Royong Semakin Tinggi
- » Mengembangkan Budaya Lokal (Jawa) Dalam Meredam Konflik Sosial

TOPIK

- » Sekilas Tentang Pathok Nagara
- » Pawon Dalam Budaya Jawa
- » Nilai-Nilai Kesatuan Dalam Keragaman Sukubangsa
- » Sejarah Oeang Repoebliek Indonesia

ULASAN

- » Permainan Tradisional Anak: Salah Satu Khasanah Budaya Yang Perlu Dilestarikan
- » Wayang Sebagai Tontonan, Tuntunan dan Tatanan

Jantra	Vol. I	No. 1	Hal. 1 - 60	Yogyakarta Juni 2006	ISSN 1907 - 9605
---------------	---------------	--------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------



Jantra dapat diartikan sebagai roda berputar, yang bersifat dinamis, seperti halnya kehidupan manusia yang selalu bergerak menuju ke arah kemajuan. Jurnal **Jantra** merupakan wadah penyebaran tentang dinamika kehidupan manusia dari aspek sejarah dan budaya. Artikel dalam Jurnal **Jantra** bisa berupa hasil penelitian, tanggapan, opini, maupun ide atau pemikiran penulis. Artikel dalam **Jantra** maksimal 20 halaman kuarto, dengan huruf *Times New Romans*, font 12, spasi 2, disertai catatan kaki dan menggunakan bahasa populer namun tidak mengabaikan segi keilmiahannya. Dewan Redaksi **Jantra** berhak mengubah kalimat dan format penulisan, tanpa mengurangi maksud dan isi artikel. Tulisan artikel disampaikan dalam bentuk *file Microsoft Word* (disket, CD), dialamatkan kepada: Dewan Redaksi **Jantra**, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Jalan Brigjen Katamso 139, Yogyakarta 55152, Telp. (0274) 373241 Fax. (0274) 381555 E-mail: jantra@bksnt-jogja.com

Pelindung	Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Penanggung Jawab	Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta
Penyunting Ahli	Prof. Dr. Djoko Suryo (Sejarah) Prof. Dr. Soegijanto Padmo, M.Sc. (Sejarah) Prof. Dr. Irwan Abdullah (Budaya) Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, MA (Budaya)
Pemimpin Redaksi	Dra. Christriyati Arian, M.Hum
Sekretaris Redaksi	Dra. Sri Retna Astuti
Dewan Redaksi	Drs. Salamun Suharno, BA Samrotul Ilmi Albiladiyah, S.S Dra. Endah Susilantini
Distribusi	Drs. Sumardi
Dokumentasi/Perwajahan	Drs. Wahjudi Pantja Sunjata

Alamat Redaksi :

BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA
Jalan Brigjen Katamso 139, Yogyakarta 55152
Telp. (0274) 373241 Fax. (0274) 381555
E-mail : jantra@bksnt-jogja.com
Website : www.bksnt-jogja.com

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya, Edisi Perdana Jurnal *Jantra* dapat hadir di tengah para pembaca. Melalui proses panjang, *Jantra* mencoba menyajikan berbagai peristiwa serta topik kesejarahan dan kebudayaan Jawa yang sedang berkembang saat ini.

Tulisan Siti Munawaroh dan Christriyati Ariani, menganalisa gotong royong, *gugur gunung*, kerukunan serta kebersamaan yang semakin tumbuh subur di kalangan warga masyarakat DIY pascagempa. Adanya rasa senasib sepenanggungan sesama korban gempa, secara spontanitas warga menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Jawa seperti kerukunan, kegotongroyongan, keselarasan dan keharmonisan yang di era globalisasi saat ini menjadi nilai yang sangat “berharga”.

Topik lain yang juga cukup menarik dalam edisi kali ini, adalah tulisan Sumintarsih serta Samrotul Ilmi Albiladiyah. Kedua penulis ini masing-masing menelaah salah satu bangunan Jawa yang cukup penting. Sumintarsih mengkaji bagaimana peran *pawon* dalam budaya Jawa, sedangkan Ilmi Albiladiyah mengkaji *peran Pathok Nagara*, salah satu masjid milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Walaupun seringkali *pawon* ditempatkan dalam kategori bangunan rumah orang Jawa yang “diremehkan”, karena letaknya yang selalu di bagian belakang, namun filosofi *pawon* bisa menggambarkan bagaimana struktur sosial yang terjadi di masyarakat Jawa. Sementara tulisan Samrotul Ilmi Albiladiyah mengulas tentang *Pathok Nagara* berserta seluk beluk bangunan masjid milik Sultan yang terletak di empat penjuru, serta hubungannya dengan fungsinya sebagai *pengadilan surambi*. Kini peran dan fungsi masjid *Pathok Nagara* telah berubah.

Kajian kesejarahan, tulisan Tashadi mencoba melihat kembali bagaimana semangat nasionalisme tumbuh di kalangan pemuda tahun 1928, dalam rangka Sumpah Pemuda. Semangat nasionalisme yang dibangun saat itu kemungkinan bisa ditumbuhkembangkan kembali terutama untuk membangun persatuan dan kesatuan di masa sekarang. Tulisan Dwi Ratna Nurhajarini berbicara tentang Oeang Repoebliek Indonesia (ORI), yang menunjukkan bahwa krisis moneter pernah terjadi di masa lalu. Dengan demikian peristiwa sejarah selalu mengikuti pola tertentu dan berulang, benar adanya.

Topik lain yang juga berhubungan dengan nilai budaya Jawa, adalah tulisan Suyami serta Ernawati. Suyami mengulas bagaimana peran seni pertunjukkan wayang bagi kehidupan masyarakat Jawa. Hingga saat ini, wayang masih bisa eksis di tengah masyarakat Jawa, sebagai *tontonan*, *tuntunan*, serta *tatanan* tersendiri. Banyak nilai filosofis yang dapat diserap dari seni tradisi wayang ini. Sementara Ernawati Purwaningsih mengulas tentang permainan tradisional anak, menunjukkan bahwa dalam permainan tradisional anak sarat dengan nilai budaya yang dibutuhkan bagi perkembangan mental anak, melalui nilai kebersamaan, kepemimpinan, kerukunan, pendidikan, yang merupakan nilai-nilai budaya yang mungkin tidak ada di dalam permainan modern.

Kedelapan tulisan dalam *Jantra*, edisi perdana ini, semoga bisa menambah wawasan pembaca terutama berkaitan dengan khasanah kesejarahan dan kebudayaan. Namun demikian, Dewan Redaksi *Jantra* sangat mengharapkan saran, kritik, serta masukan dari para pembaca, dalam upaya kesempurnaan *Jantra* di masa mendatang.

Redaksi

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Pascagempa Intensitas Gotong Royong Semakin Tinggi <i>Siti Munawaroh</i>	1
Mengembangkan Budaya Lokal (Jawa) Dalam Meredam Konflik Sosial <i>Christriyati Ariani</i>	6
Sekilas Tentang <i>Pathok Nagara</i> <i>Samrotul Ilmi Albiladiyah</i>	13
<i>Pawon</i> Dalam Budaya Jawa <i>Sumintarsih</i>	17
Nilai-Nilai Kesatuan Dalam Keragaman Sukubangsa <i>Tashadi</i>	24
Sejarah Oeang Repoeblik Indonesia <i>Dwi Ratna Nurhajarini</i>	32
Permainan Tradisional Anak: Salah Satu Khasanah Budaya Yang Perlu Dilestarikan <i>Ernawati Purwaningsih</i>	40
Wayang Sebagai <i>Tontonan, Tuntunan</i> dan <i>Tatanan</i> <i>Suyami</i>	47
Biodata Penulis	58

PASCAGEMPA INTENSITAS GOTONG ROYONG SEMAKIN TINGGI

Siti Munawaroh

Abstrak

Kekuatan manusia pada hakekatnya tidak hanya kemampuan fisiknya semata atau kemampuan psikisnya, akan tetapi kekuatan manusia yang terletak pada kemampuan bekerja sama dengan orang lain yang disebut gotong royong. Gotong royong adalah salah satu manifestasi dan budaya kolektif yang saat ini masih dipertahankan dan dilestarikan, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Gotong royong pada saat sekarang masih menjadi tumpuan harapan masyarakat pedesaan dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki masyarakat, terutama tujuan itu untuk meringankan beban bagi anggota masyarakat di wilayahnya.

Pendahuluan

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik, hal ini merupakan naluri yang paling kuat dalam diri manusia. Sehingga kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan corak dan kualitas baik sebagai makhluk pribadi, individu maupun sebagai makhluk sosial yang harus dikembangkan secara selaras, seimbang dan serasi agar dapat menjadi seorang manusia yang utuh.

Kekuatan manusia pada hakekatnya tidak terletak pada kemampuan fisiknya atau kemampuan psikisnya semata-mata, tetapi kekuatan manusia terletak pada kemampuannya untuk bekerja sama dengan manusia lainnya. Disadari, bahwa sebagai manusia akan mempunyai arti dalam kaitannya dengan manusia lain apabila hidup di masyarakat. Manusia hanya mempunyai arti dan dapat hidup di antara manusia lainnya, tanpa ada manusia lain dalam hidup bermasyarakat seseorang tidak akan dapat berbuat banyak, dalam mempertahankan hidup dan usaha mengejar kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu, manusia harus saling bergotongroyong, tolong menolong dan bekerja sama dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Manusia sangat memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan dan tanggapan emosional, yang sangat penting artinya dalam pergaulan dan kesejahteraan hidup yang sehat. Tanggapan emosional tersebut hanya dapat diperoleh dalam hubungannya dengan manusia lain dan dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian gotong royong, tolong menolong dan bekerja sama merupakan nilai atau adat istiadat dari keadaan tata laku kelompok masyarakat.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (1981) menjelaskan adat istiadat adalah merupakan sistem nilai dari suatu pranata sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa salah satu unsur adat istiadat yang penting ialah gotong royong. Di samping itu gotong royong dapat juga dimanfaatkan

¹ Kusumabrata, *Nilai Tolong Menolong, Musyawarah dan Manfaat Sebagai Faktor Penunjang Kerekatan Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Proyek P2NB, Tahun 2001, hal. 2

sebagai faktor penunjang kerekatan untuk berbangsa dan bernegara.

Ada beberapa nilai yang terkandung dalam hakekat gotong royong, tolong menolong, dan kerja sama antara lain¹:

1. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan sikap tanpa pamrih.
3. Saling hormat menghormati dan dapat bekerja sama dengan orang lain.
4. Saling bantu membantu dalam hidup bermasyarakat.
5. Mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama dan tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Rela berkorban untuk kepentingan bersama demi kesatuan dan persatuan dalam bermasyarakat.
7. Merasa ikut memiliki, ikut bertanggung-jawab dan tidak memaksakan kehendak dalam hidup bermasyarakat.
8. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Pembahasan

Kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia memiliki ciri dan sifat yang khusus untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki, sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup, tidak dapat berkembang tanpa bantuan orang lain.

Kekuatan manusia pada hakekatnya tidak terletak pada kemampuan jasmani atau kemampuan jiwanya semata namun dipengaruhi pula pada kemampuan untuk bekerja sama dengan manusia lainnya dalam hidup bermasyarakat. Manusia tidak dapat

hidup sendiri, perlu gotong royong, tolong menolong, perlu bantuan orang lain, perlu mengadakan kerja sama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Dep. P&K, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (1981) menyatakan bahwa gotong royong, tolong menolong adalah suatu bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan asas timbal balik yang mewujudkan adanya keterikatan sosial dalam masyarakat.

Gotong royong atau tolong menolong adalah bentuk kerja sama yang spontan yang sudah membudaya, serta mengundang unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela untuk memenuhi kebutuhan insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual². Dalam definisi tersebut di atas tampak bahwa gotong royong tolong menolong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang dalam suatu kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikembangkan oleh Bintarto (1980) bahwa dalam artian yang sebenarnya gotong royong dilaksanakan oleh sekelompok penduduk di suatu daerah yang datang membantu atau menawarkan tenaga tanpa pamrih, atau dengan lain perkataan secara sukarela menolong secara bersama.³

Kegiatan gotong royong atau tolong menolong semacam itu sebetulnya sudah melembaga dalam masyarakat Indonesia sejak jaman kejayaan kerajaan Hindu di Jawa seperti kerajaan Mataram Kuno dan juga Kerajaan Majapahit. Kegiatan gotong royong atau tolong menolong yang terjadi di Karangtengah, Imogiri, Bantul, DIY, ternyata telah mengalami perubahan. Perubahan saat ini ditunjukkan dengan terkikisnya sifat-sifat gotong royong yang terjadi di beberapa desa. Masuknya pengaruh budaya materialisme

² Ibnu Syamsi. 1986. *Studi Tentang Gotong Royong dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman*. Yogyakarta: Fakultas Geografi, UGM

³ Bintarto. *Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hal. 13

yang kini menguasai pola dan cara berpikir masyarakat desa mengakibatkan luntarnya gotong royong itu. Oleh karena sistem gotong royong itu merupakan salah satu dari manifestasi kebudayaan yang sejak nenek moyang telah dikenal, maka dalam kesempatan ini dilakukan pengamatan bagaimana gotong royong, tolong menolong, dan kebersamaan warga setelah adanya gempa pada tanggal 27 Mei 2006 lalu yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Karangtengah dominan di bidang pertanian baik sebagai pemilik maupun buruh. Kemudian diikuti kegiatan bidang perdagangan dan jasa, sehingga kehidupan gotong royong masih nampak. Kegiatan masyarakat tentang gotong royong atau tolong menolong lebih terlihat nyata dan semakin tinggi intensitasnya semenjak adanya gempa. Gempa bumi yang menimpa Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 telah memporakporandakan berbagai bangunan seperti rumah, sekolah, perkantoran dan bangunan lainnya.

Kabupaten Bantul keadaan per tanggal 6 Juni 2006 jam 11.00 WIB, rumah kondisi rusak total sebanyak 71.763 bangunan, rusak berat 71.372 bangunan, dan rusak ringan sebanyak 66.359 bangunan. Sementara untuk Desa Karangtengah menurut data kelurahan, dari sebanyak 1.306 rumah, terperinci rumah rusak total 749 bangunan (57,36%), rusak berat 308 bangunan (23,57%), dan rusak ringan 249 bangunan (19,07%). Dengan kerusakan sedemikian parahnya tersebut, warga masyarakat Karangtengah berinisiatif melakukan kegiatan gotong royong atau tolong menolong dan bekerja sama di antara

warga dan ternyata warga masyarakat antusias dan bersemangat sekali.⁴

Meningkatnya intensitas sistem gotong royong, tolong menolong dan kebersamaan di Desa Karangtengah, hal ini di samping masyarakatnya telah memiliki jiwa gotong royong yang cukup kental dan tinggi juga karena memiliki kondisi dan situasi yang sama dalam beberapa hal bidang kehidupan dan juga saling membutuhkan. Contoh ada masyarakat yang *keset* (malas) dan hampir tidak pernah terlihat dalam perkumpulan atau kegiatan apa saja yang dilakukan warga, setelah adanya gempa bumi mereka malahan sangat aktif dan selalu tergabung bersama. Selain itu, ada kegiatan yang biasanya tidak pernah dilakukan gotong royong sekarang lebih diintensifkan. Yang lebih bagus dan bersifat positif lagi, sebelum gempa bumi terjadi bahkan ada beberapa masyarakat yang *neng-nengan* atau *jothakan* setelah adanya gempa bumi semakin baik interaksinya sehingga terlihat suasana kehidupan masyarakat yang *rukun*, *guyup*, *adem ayem* dan *tentrem*.

Dengan demikian dibalik peristiwa bencana alam yakni gempa bumi yang telah dialami oleh masyarakat Karangtengah ada hikmah yang mereka ambil. Hal ini karena mereka terus merenungkan, dan kemudian dijadikan suatu pelajaran. Selain itu, adanya musibah bencana alam juga mengakibatkan adanya perubahan yang terjadi dalam diri manusia maupun masyarakat, baik menyangkut sistem pengetahuan, perilaku maupun tindakan. Di dalam budaya Jawa, dengan terjadinya bencana lebih dimaknai sebagai suatu “peringatan”, teguran atau sapaan terhadap perilaku dan perbuatan, yang selama ini mungkin tidak lagi sesuai dengan budayanya.⁵

⁴ Situs *www. Rekap Data Korban Jiwa dan Rumah Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Bantul*. Bantul: 7 Juni, 2006, hal. 2

⁵ Christriyati Ariani. Mengembangkan Budaya Lokal Dalam Meredam Konflik Sosial. *Makalah Seminar “Sosialisasi Penanganan Korban Bencana”* Dinas Sosial Propinsi DIY, September 2006

Kebersamaan yang lainnya adalah dahulu warga selalu mengatas namakan masyarakat Karangtengah Timur (*wetan*) maupun Karangtengah Barat (*kulon*) sekarang tidak. Sekarang setiap kegiatan-kegiatan sosial maupun yang sifatnya instruksional dari pemerintah setempat selalu mengatas namakan Karangtengah. Misalnya bantuan-bantuan dari luar untuk lembaga-lembaga atau yang akan diberikan oleh individu-individu masyarakat itu sendiri melalui instansi pemerintah dan baru didistribusikan.

Selain hal tersebut di atas, dari hasil pengamatan dan wawancara dengan tokoh masyarakat masih banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangtengah. Setelah adanya gempa bumi untuk kepentingan dan kebersamaan antar warga yang dilakukan secara gotong royong, yakni mulai masalah makanan, membuat tempat untuk berlindung (rumah tenda), menurunkan genteng sampai membersihkan puing-puing reruntuhan rumah yang berserakan dan lain sebagainya. Bahkan yang membersihkan puing-puing ternyata yang terlibat tidak hanya orang-orang tua tetapi juga para pemuda (generasi muda).

Menurut informasi salah satu warga setempat, bahwa tanpa bantuan dari warga masyarakat secara gotong royong dalam membersihkan puing-puing rumah maka bisa memakan waktu berminggu-minggu. Sehingga diperlukan waktu untuk memiliki tempat tinggal yang layak walau hanya sederhana (rumah tenda) warga harus menunggu sampai selesai dibersihkan. Bentuk-bentuk aktifitas gotong royong dan kebersamaan semacam itu menunjukkan adanya penghargaan dari anggota masyarakat terhadap nilai-nilai gotong royong itu sendiri.

Sementara gotong royong yang diwujudkan dengan didirikannya dapur umum, yang mereka lakukan adalah dengan mengumpulkan apa yang dimiliki, mulai beras, pisang, telur, gandum dan lain sebagainya. Semua warga berinisiatif merelakan bahan-

bahan makanan untuk dikumpulkan. Kemudian dari berbagai macam bahan makanan ini dimasak bersama.

Itulah beberapa perwujudan dari bentuk kerja sama, berupa gotong royong, dan tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangtengah yang terkena musibah gempa. Setelah terjadinya gempa bumi intensitas kebersamaan dan gotong royong yang merupakan kearifan hidup dari para leluhur serta para sesepuh kita yang selama ini semakin mengendor menjadi tergugah lagi. Dapat dikatakan dibalik peristiwa bencana alam gempa bumi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat, kesadaran kolektif manusia muncul kembali karena mereka sadar bahwa perilaku manusia sangat berhubungan kuat dengan perilaku alam, antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan-Nya.

Penutup

Dengan terjadinya bencana alam gempa bumi ternyata telah menunjukkan bahwa di antara warga masyarakat Karangtengah memiliki modal sosial yang sangat besar dan kuat. Terjadinya bencana telah membangkitkan kesadaran kolektif warga, untuk merajut kembali modal sosial yang luntur baik dalam keluarga maupun warga masyarakat. Sekarang saatnya tumbuh rasa solidaritas sosial yang selama ini sempat terkikis, serta tenggelam akibat sikap ego individu. Dengan tumbuhnya kembali sifat tolong menolong, kegotong-royongan, dan bekerjasama dalam kebersamaan, maka perlu dilestarikan sifat gotong royong sebagai modal dasar pembangunan masyarakat yang madani.

Gotong royong yang merupakan nilai budaya dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan kenyataannya masih dianggap sebagai milik budaya yang masih dipertahankan dan dilestarikan. Penerimaan anggota masyarakat terhadapnya, bukan sekedar karena gotong royong, tolong menolong yang dianjurkan atau yang

dilakukan secara insaf, akan tetapi memang telah berakar dalam khasanah budaya leluhur mereka. Gotong royong, tolong menolong dan kebersamaan merupakan perwujudan solidaritas, kesetiakawanan sosial, dan pancaran kekeluargaan.

Mengingat nilai-nilai sikap gotong royong dan tolong menolong tersebut bisa dijadikan sebagai faktor penunjang kerekatan di antara warga masyarakat dan merupakan senjata ampuh guna menanggulangi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi ini.

Daftar Pustaka

- Bintarto. 1980. *Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu.
- Christriyati Ariani. 2006. “Mengembangkan Budaya Lokal Dalam Meredam Konflik Sosial”. Yogyakarta, *Makalah Seminar*. Dinas Sosial Pemerintah DIY.
- Depdikbud, Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional. 1981. *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Desa Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud.
- Ibnu Samsi. 1986. *Studi Tentang Gotong Royong dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Desa Sinduadi Mlati Sleman*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Kusumabrata. 2001. “Nilai Tolong Menolong, Musyawarah dan Mufakat Sebagai Faktor Penunjang Kerekatan Berbangsa dan Bernegara”. Yogyakarta, Departemen Pendidikan Nasional, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah. *Dialog Kebudayaan* 4 – 5 Juli 2001.

MENGEMBANGKAN BUDAYA LOKAL (JAWA) DALAM MEREDAM KONFLIK SOSIAL

Christriyati Ariani

Abstrak

Banyak norma dalam kehidupan orang Jawa dalam pergaulannya di masyarakat. Istilah-istilah yang akrab melekat dalam sehari-hari merupakan acuan hidup dalam kebersamaan di samping tradisi yang berlaku, misalnya guyub rukun, gugur gunung, gotong royong, tulung-tinulung dan istilah lain yang sarat dengan nilai pekerti luhur. Perkembangan teknologi dalam era global memberi efek positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat termasuk orang Jawa. Nilai positif akan sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa, namun efek negatif akan mengikis nilai norma yang sudah ada. Ada sesuatu yang hilang. Dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan budaya Jawa banyak lontaran keprihatinan dari para budayawan atau pemerhati budaya. Pada umunya mereka menyatakan bahwa pada masa kini budaya Jawa yang adi luhung itu telah terkikis. Pada awalnya kita percaya hal itu. Namun ketika kita dikejutkan dengan hantaman gempa di Jogja dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006 yang meluluhlantakkan sebagian hunian, merobek hati masyarakat, kita melihat suatu kenyataan. Saat kesedihan mendera, datang kembali kebersamaan dalam menghadapi musibah itu. Semangat gotong royong, tulung tinulung, guyub rukun, gugur gunung kembali hinggap di hati. Namun ketika terdengar berita akan ada bantuan dari pemerintah bagi korban gempa, apa yang terjadi? Jawaban itu akan dapat diperoleh dalam uraian ini.

Pengantar

Sekitar dua bulan yang lalu di dalam tajuk rencana *Kedaulatan Rakyat*¹ diberitakan tentang bagaimana kondisi warga masyarakat Bantul yang tertimpa musibah gempa bumi dan memporakporandakan wilayahnya. Saat itu warga merasakan kesedihan, keguncangan batin, bahkan masih menyisakan rasa trauma. Namun setelah hampir 20 hari dari peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006, warga mulai bangkit. Mereka begitu bersemangat melihat para relawan dari berbagai daerah maupun negara yang berdatangan membantunya. Tanpa ada halangan perbedaan kulit, ras, golongan, agama maupun suku, bersatu padu membantu “saudara-saudaranya” yang sedang ditimpa

musibah. Mereka saling tolong menolong, bahu membahu, dukung mendukung, bergotong royong mengedepankan kebersamaan, keluhuran budi, serta mengesampingkan kepentingan diri dan kelompok untuk mementingkan kepentingan masyarakat. Indah nian kehidupan masyarakat Bantul khususnya dalam suasana duka dan derita, masih tersisa ceria anak manusia yang masih mau berbagi kasih, setia dalam aksi solidaritas antar sesama negara, tanpa mementingkan diri sendiri.

Uraian di atas ini sebenarnya menggambarkan bagaimana hubungan antar manusia, antar sukubangsa, bahkan antar negara sekalipun yang tercermin dalam

¹ Dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, 20 Juni 2006, hal. 10

kegiatan kemanusiaan yang sangat luhur. Barangkali di saat ini yang seringkali dikonotasikan dengan zaman “modern”, nilai-nilai seperti itu mungkin merupakan sebuah nilai yang mahal harganya. Gaya modernitas yang selalu ditandai dengan individualitas, egoisme serta kehidupan yang penuh dengan “kepura-puraan”, semuanya selalu mengandung pamrih yang diharapkan. Apalagi tidak sedikit dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial, instansi pemerintah dengan berbagai atribut serta “pakaian” nya seakan-akan turut serta berlomba-lomba ingin berpartisipasi dalam penanganan korban gempa, baik selama masa tanggap darurat hingga masa rekonstruksi maupun rehabilitasi.

Di sisi lain, warga korban gempa pun dengan kerendahan hati dan ketulus-ikhlasannya menerima dengan senang hati berbagai bantuan baik moril maupun materiil yang diberikan dari para dermawan maupun relawan. Bahkan hal yang sangat menarik, di masa rekonstruksi masih ada sekelompok manusia yang dengan tulus ikhlas memberikan sumbangan berupa tenaga. Mereka adalah kaum pekerja yang berasal dari daerah sekitar Sawangan, Kaliangkrik (Magelang), serta daerah-daerah lainnya yang secara rutin setiap hari minggu, turut serta membantu warga Bantul dalam membongkar, serta membersihkan puing-puing bangunan rumah mereka yang roboh akibat gempa. Mereka berdatangan dengan menggunakan truk-truk terbuka, di pagi hari dan akan kembali di sore hari. Selama mengerjakan pembersihan puing-puing bangunan yang hancur karena gempa, mereka tidak mau merepotkan si pemilik rumah, karena mereka membawa bekal serta kebutuhannya sendiri.

Akan tetapi, kerukunan, kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan, serta sikap kegotongroyongan, tiba-tiba mulai terusik

manakala pemerintah mulai mengumumkan adanya bantuan jaminan hidup (*jadup*) maupun dana rekonstruksi yang akan diberikan kepada para korban gempa. Jalinan keharmonisan yang sempat terjalin beberapa waktu mulai mengendur. Apalagi banyak disinyalir bahwa penyaluran bantuan tersebut banyak mengalami kendala, ketidakadilan serta penerimaan yang tidak serentak dan merata. Dari situlah mulai tumbuh konflik-konflik sosial di antara sesama korban, di antara sesama tetangga korban, bahkan di antara sesama dusun maupun desa yang menjadi korban gempa. Bantuan materiil (baca uang) ternyata telah mampu menghapuskan nilai-nilai budaya lokal yang selama ini sebenarnya masih mereka miliki.

Batasan Konsep: Budaya Lokal, Konflik Sosial

Di dalam dunia ilmu antropologi, budaya atau kebudayaan mempunyai batasan yang sangat kompleks dan tidak terhingga, tergantung dari perspektif mana yang akan kita gunakan. Sejalan dengan permasalahan serta topik dari judul artikel ini, maka saya menempatkan budaya (baca kebudayaan) dalam dua hal. Pertama, kebudayaan merupakan suatu sistem ideasional, suatu konsep gagasan yang dimiliki oleh setiap individu yang menjadi pedoman dalam hidupnya. Kebudayaan sebagai sistem ideasional ini berada di dalam sistem kognitif setiap individu, berada di dalam alam pikiran (*mind*) individu yang dimiliki secara bersama dalam suatu komunitas.² Di sini, budaya digunakan untuk mengacu pada pola kehidupan suatu masyarakat - kegiatan dan pengaturan materiil dan sosial yang berulang secara teratur.

Dengan demikian, budaya dalam pengertian tersebut, dapat dilihat sebagai sistem pengetahuan yang akan memberikan patokan guna menentukan apa...; guna

² Keesing, Roger dan Godenough, *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*, Penerbit Erlangga, 1999, hal. 68

menentukan bisa jadi apa...; guna menentukan bagaimana kita merasakannya; guna menentukan apa yang harus diperbuat tentang hal itu, dan.....guna menentukan bagaimana cara melakukannya. Atau, dengan kata lain kebudayaan merupakan suatu “alat” yang digunakan dalam pemenuhan kehidupannya. Di dalam sistem gagasan budaya Jawa, hal-hal seperti itu dapat ditemui di dalam berbagai adat-istiadat, tradisi, ungkapan-ungkapan tradisional, norma, aturan, pandangan hidup (*ways of life*), kearifan lokal, dan sebagainya.

Kedua, kebudayaan atau budaya merupakan suatu sistem makna, yaitu hal-hal yang selalu berhubungan dengan simbol-simbol tertentu, dikenal dan diketahui dan disebarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Mengingat budaya (kebudayaan) dianggap sebagai simbol, yang mengandung makna-makna tertentu, berarti ada sesuatu di dalam kebudayaan yang perlu dibaca, kemudian ditangkap dan ditafsir maknanya, sehingga pada gilirannya hasil pemaknaan dan penafsiran tersebut akan diketahui dan dibagikan oleh dan kepada masyarakat, serta diwariskan kepada generasi berikutnya.³ Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan dari sebuah masyarakat yang bersangkutan dalam melihat peristiwa-peristiwa atau gejala sosial budaya yang sedang terjadi.

Sejalan dengan konsep tersebut, maka di dalam budaya Jawa secara luas telah dikenal dengan berbagai makna dan simbolisasi budaya yang hampir melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Segala perilaku, tindakan, perbuatan maupun peristiwa-peristiwa tertentu yang melingkupi hidup manusia Jawa, selalu dikaitkan dengan simbol serta makna tertentu, yang seringkali dihubungkan dengan kondisi masyarakatnya.

Bahkan seperti tanda-tanda alam sekali pun, sering dihubungkan-hubungkan dengan sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Kepiawaian manusia Jawa dalam *niteni* suatu fenomena alam yang terjadi dalam hidupnya memang tidak perlu diragukan.

Sementara itu, Kuper dan Kuper⁴ mendefinisikan konflik sosial dalam dua hal. Pertama, konflik sosial merupakan suatu perspektif atau sudut pandang tertentu, di mana konflik dianggap selalu ada dalam setiap bentuk interaksi manusia di dalam struktur sosialnya. Kedua, konflik sosial dapat diartikan secara eksplisit sebagai suatu bentuk pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan. Asal mula terjadinya konflik sebenarnya dapat ditelusuri dari tingkat kejadiannya. Pihak-pihak yang berkonflik dapat dibedakan atas dasar tingkat organisasi serta kekompakannya. Konflik sosial juga dapat terjadi akibat adanya pertentangan tujuan, mulai dari pertikaian yang bersifat sederhana yang dianggap bernilai tinggi, hingga kasus-kasus tertentu yang bersifat kompleks seperti penguasaan tanah, perebutan harta benda dan sebagainya. Konflik sosial juga bisa terjadi atas dasar cara yang digunakan, misalnya melalui pemaksaan secara terang-terangan; ancaman, hingga berupa bujukan yang bersifat halus.

Di dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa, pada intinya mereka sangat menghindari terjadinya konflik. Walaupun bila terpaksa konflik itu harus terjadi, maka diupayakan untuk tidak dilakukan secara terang-terangan dan eksplisit. Pedoman hidup manusia Jawa yang selalu mengutamakan kerukunan, keharmonisan serta keselarasan, berusaha selalu tetap menjaga kondisi damai, harmoni dan selaras di dalam tatanan sosial, sampai kapan pun dan dimana pun. Oleh

³ Geertz, Clifford, *Tafsir Kebudayaan* (terjemahan), Kanisius, 1992, hal. 15

⁴ Adam Kuper and Jesica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, 2000, hal. 155

karenanya, bagi manusia Jawa istilah-istilah seperti *padu*, *kerengan*, *neng-nengan* diusahakan untuk dihindari, di jauhi bahkan sedapat mungkin dicegah.

Akan tetapi, konflik seringkali muncul, terutama dalam kehidupan masyarakat Jawa, manakala harga diri dan martabat mereka mulai diusik. Konflik bisa juga muncul akibat perseteruan yang dipicu oleh hadirnya pihak lain, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam pembagian materi. Walaupun dalam sistem budaya Jawa kondisi seperti itu merupakan hal yang “tabu” dan “*saru*” untuk diperbincangkan dan dipermasalahkan, namun realitas yang terjadi saat ini sering terjadi. Sejalan dengan banyaknya permasalahan sosial yang muncul pasca bencana saat ini, maka seakan-akan masyarakat Jawa mulai meninggalkan nilai-nilai budayanya yang telah melekat dalam dirinya. Mereka mulai menjauhi prinsip hidup yang berpijak kepada hubungan keselarasan, keharmonisan, serta kerukunan, yang selama ini telah menjadi ciri khasnya. Masyarakat Jawa mulai meninggalkan nilai-nilai budayanya, mulai menjauhi nilai-nilai kearifan lokal yang mereka miliki.

Keberadaan Budaya Lokal (Jawa): Perluakah Dikembangkan dan Dilestarikan?

Semenjak berbagai bencana yang melanda negeri ini secara bertubi-tubi (tsunami Aceh dan Nias 2004, gempa bumi Nias 2005, banjir bandang Jatim dan Sumut 2005 serta gempa bumi DIY, Jateng, bencana Merapi dan tsunami Jabar 2006) perlu disadari atau tidak bahwa negeri ini merupakan negeri yang rawan akan bencana. Selain secara geologis Indonesia sebagian besar berada di daerah yang rawan gempa karena berada di atas pertemuan tiga lempeng benua, berbagai bencana yang terjadi pun tidak luput akibat ulah manusia. Mulai dari pembabatan hutan yang ditandai dengan penebangan liar (pembalakan) hingga eksploitasi alam secara besar-besaran yang

dilakukannya. Perilaku tersebut mencerminkan bagaimana ulah manusia yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Nafsu serta keinginan sesaat untuk mewujudkan kepentingan pribadi jauh lebih menonjol, tanpa mempedulikan kepentingan bersama, serta kelangsungan kehidupan lingkungan.

Sebenarnya, di balik semua peristiwa bencana yang kita alami ada hikmah tersendiri yang sangat perlu untuk direnungkan, ada sesuatu yang perlu dimaknai, kemudian dijadikan pelajaran berharga. Hikmah dari peristiwa inilah kemudian dapat dijadikan pedoman dalam menapaki hidup yang lebih baik. Selain mengakibatkan traumatis serta membentuk memori kolektif yang mungkin sulit untuk dihilangkan dalam beberapa waktu, di sisi lain musibah bencana alam juga menimbulkan adanya perubahan yang terjadi dalam diri manusia maupun masyarakat, baik menyangkut sistem pengetahuan, perilaku maupun tindakan. Di dalam budaya Jawa, dengan terjadinya bencana lebih dimaknai sebagai suatu “peringatan”, teguran atau sapaan terhadap perilaku dan perbuatan manusia Jawa, yang selama ini mungkin tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai budayanya.

Sejalan dengan hal itu, maka hikmah lain yang saat ini mulai muncul dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya (terutama bagi daerah bencana), adalah tumbuhnya kembali bentuk-bentuk budaya lokal. Ketakutan warga masyarakat akan terjadinya bencana alam secara tidak langsung sebagai media untuk berintrospeksi diri, menggugah serta menanyakan kembali, kesalahan apa yang telah diperbuat, perilaku apa yang harus diubah dan ditinggalkan. Adanya benturan-benturan batin yang mereka rasakan itulah, pada akhirnya manusia Jawa mulai mencari semua jawaban dalam budaya yang melingkupi hidupnya. Mereka mulai mau mengenali kembali berbagai nilai-nilai budaya lokal, yang saat ini cenderung ditinggalkan, yang justru nilai-nilai budaya tersebut sebenarnya telah mengakar di dalam dirinya.

Dibalik kehidupan yang serba “modern” yang ditandai dengan kecanggihan media informasi, serta telah menghilangkan batas-batas identitas seseorang, ternyata nilai budaya lokal masih “mampu” bertahan, bahkan masih bisa menuntun perilaku manusia. Melalui berbagai bencana yang seringkali mendera mereka, paling tidak bisa dijadikan perenungan tersendiri, kesalahan apa yang telah diperbuatnya, sehingga alam memberikan bencana kepadanya. Semenjak terjadinya bencana, saat ini warga masyarakat cenderung lebih giat melaksanakan tradisi-tradisi, adat istiadat tertentu yang mungkin mereka anggap “kuno”, tidak realistis, serta irasional. Sebagai contoh, berbagai ritual tradisi (*wiwit, merti dusun, rasulan, labuhan*) untuk memohon keselamatan, mulai aktif dilakukan kembali oleh warga tani; doa keselamatan mulai digelar, nilai-nilai kegotongroyongan mulai bersemi kembali, serta mulai tumbuhnya budaya *sambatan, gugur gunung* di kalangan masyarakat Jawa. Kesemuanya itu merupakan bentuk-bentuk budaya lokal Jawa yang sebenarnya telah dimiliki dan diajarkan dari leluhur kita. Merawat, memelihara serta menjaga kelestarian lingkungan alam, menjaga keharmonisan hubungan antara manusia-manusia, menjaga keselarasan hubungan antara manusia-alam, bahkan menjaga hubungan manusia-Tuhan, sebenarnya telah dimiliki oleh masyarakat Jawa sejak dahulu.

Namun, selama ini budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai kultural yang sangat tinggi tersebut mulai ditinggalkan, karena dianggap kuno, tradisional, serta tidak rasional. Budaya modern yang cenderung “dianggap” lebih mengutamakan kepada sikap-sikap rasionalitas-logika justru lebih diutamakan dan dianggap mampu memecahkan semua permasalahan. Akan tetapi, dengan terjadinya berbagai bencana alam yang membuat situasi dan kondisi warga masyarakat menjadi serba tidak pasti (*chaos*), menjadikan warga masyarakat

korban bencana berusaha untuk mencari ketenangan batin melalui ritus-ritus budaya tersebut. Mereka berusaha mencari perlindungan, ketenangan, serta ketenteraman batin melalui ritual-ritual budaya. Kekuatan spiritual dan mental mulai ditumbuhkan melalui bentuk-bentuk budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai kearifan. Bagi manusia Jawa, fenomena alam yang bersifat periodik dan berpotensi memunculkan bencana, berusaha dicegah melalui ritus budaya. Selain itu, dengan adanya ritus-ritus budaya tersebut tidak lain bertujuan untuk menyegarkan kembali ingatan manusia Jawa akan tuntutan hidup yang lebih arif dan bijaksana lagi dalam memperlakukan alam lingkungannya. Selanjutnya, ritus budaya tersebut dilakukan warga masyarakat sebagai usaha untuk berintrospeksi diri. Manusia Jawa bisa melihat ke “belakang” sebelum bencana terjadi, untuk memperbaiki kehidupan “yang lebih baik” di masa depan. Budaya *eling lan waspada* mulai dihidupkan kembali.

Instrospeksi diri tersebut kemudian mendorong manusia Jawa untuk hidup lebih seimbang dan selaras dalam hubungannya dengan sesamanya, dengan alam lingkungannya, serta dengan Tuhan atau Pencipta-Nya. Inilah sebenarnya tujuan hakiki yang ingin dicari oleh manusia Jawa dalam menjalani kehidupannya.

Kesadaran akan ketiga hal hubungan dalam diri manusia Jawa itulah yang seharusnya dicari dalam ritus-ritus budaya. Situasi pascabencana yang menyebabkan perasaan setiap orang menjadi lebih sensitif, lebih peka, serta cenderung emosional, sangat mudah memicu timbulnya konflik sosial di antara sesama korban bencana. Kiranya konflik-konflik tersebut dapat diendapkan dan dihindarkan serta dijauhi oleh manusia Jawa, apabila mereka menyadari akan peran dan kedudukannya di alam ini, antara lain bila manusia Jawa memahami dan menyadari dalam melihat ketiga hubungan manusia tersebut. Ritus budaya Jawa yang selama ini

telah menjadi tuntunan kehidupannya, kiranya jangan berhenti sebatas ekspresi budaya semata, hanya sebatas seremonial belaka. Namun, semangat atau spirit yang terkandung di dalam ritus budaya Jawa hendaknya harus dipegang dan diterjemahkan untuk selanjutnya diaplikasikan dan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, kegiatan nyata pemulihan pascabencana harus didasari dalam kerangka kearifan dalam melaksanakan sebuah ritual. Hubungan manusia dengan alam harus diselaraskan, hubungan manusia dengan Tuhan (Pencipta) harus diseimbangkan, serta hubungan manusia dengan manusia harus diperbaiki kembali. Kesemuanya itu, tidak lain bertujuan membangun suatu tatanan kehidupan yang seimbang, rukun, selaras serta harmoni.

Melalui ritual budaya lokal, manusia Jawa diajak kembali untuk berpijak kepada tradisi, melihat kembali kearifan lokal yang pernah hidup dan diwarisi dari para leluhur, nenek moyang serta para sesepuh mereka. Kesadaran kolektif manusia Jawa muncul kembali, sehingga mereka sadar bahwa perilaku manusia Jawa, sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan perilaku alam lingkungan yang telah memberikan penghidupan baginya. Pada dasarnya, ritus budaya Jawa merupakan penyatuan antara harapan, doa, dan niat mulia manusia untuk mencapai kebaikan bersama. Kondisi korban pascabencana yang cenderung menjadi lebih sensitif karena kondisi yang dialami, kiranya semangat kebersamaan harus terus ditumbuhkan, dipupuk dan dilestarikan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

Dengan terjadinya berbagai bencana yang melanda negeri ini ternyata telah menunjukkan bahwa di antara warga masyarakat maupun bangsa Indonesia secara umum sebenarnya memiliki modal sosial yang sangat besar dan kuat. Dalam skala nasional, dengan terjadinya bencana ternyata telah membangkitkan kesadaran kolektif warga bangsa, untuk mengenyam

kembali modal sosial yang pernah tersimpan selama ini. Mungkin di antara kita bisa mengenali kembali modal sosial yang ada di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan warga masyarakat, yayasan/lembaga, hingga kepada hal yang paling besar dan kompleks seperti institusi negara. Di sinilah saatnya mulai tumbuh rasa solidaritas sosial yang selama ini mungkin sempat hilang dan tenggelam akibat sikap egosentrisme kelompok, pertikaian politik maupun konflik sosial yang marak terjadi selama ini. Kini saatnya kita memiliki peluang emas untuk merajut kembali ikatan persaudaraan yang sempat mengendur, dengan menumbuhkan kembali kegotongroyongan, kebersamaan, kerukunan serta kejujuran.

Setelah melihat realita yang terjadi di masyarakat saat ini dengan munculnya berbagai ritus budaya Jawa pascabencana, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah semangat tradisi budaya itu benar-benar telah merasuk dalam kehidupan masyarakat Jawa. Atau, apakah ritual budaya tersebut hanya sekedar ‘etalase’ budaya yang marak dalam waktu sesaat dan akan hilang dalam waktu sekejap saja? Kiranya jawaban pertanyaan ini berpulang kepada diri kita masing-masing sebagai penyangga serta pemilik identitas sebagai manusia Jawa, sehingga apakah nilai-nilai budaya Jawa perlu untuk tetap dilestarikan dan diwariskan kepada pewarisnya?.

Penutup

Dengan maraknya berbagai ekspresi budaya lokal yang tercermin dalam beberapa ritual yang dilakukan warga masyarakat Jawa pascagempa, sedikitnya telah mengingatkan kita kepada bentuk-bentuk nilai-nilai luhur budaya Jawa, ternyata sangat penting bagi kehidupan kita. Rasa kebersamaan, kegotongroyongan, saling bantu membantu, kerukunan, serta tolong menolong, kiranya merupakan “senjata ampuh” guna menanggulangi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.

Di tengah mencuatnya berbagai ujian persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga mengakibatkan perseteruan, konflik sosial, bahkan disintegrasi bangsa sekalipun semenjak pascabencana, maka nilai-nilai peradaban budaya Jawa yang mengedepankan budaya dan etika kiranya memang sangat diperlukan. Di saat nilai-nilai budaya Jawa mulai terkikis oleh derasnya ombak modernitas, ternyata ia masih mampu bertahan. Oleh karenanya, aspek budaya lokal pada dasarnya mempunyai potensi sebagai perekat bagi terciptanya keutuhan sebuah bangsa. Keanekaragaman budaya lokal yang tercermin dalam berbagai ritual, tradisi, serta semboyan maupun pandangan hidup, selain menjadi identitas dan jati diri bagi suatu sukubangsa, ternyata mempunyai peran yang cukup kuat dalam menciptakan kerukunan, kebersamaan serta keselarasan, di antara sesama warga.

Perubahan paradigma pembangunan saat ini yang menekankan kepada otonomi daerah kiranya sangat memberi peluang terhadap tumbuh berkembangnya budaya lokal termasuk budaya Jawa, sebagai salah satu pedoman bagi kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai dalam budaya lokal diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan. Di samping itu, dengan memelihara, meningkatkan, serta mengembangkan budaya lokal yang bersumber pada nilai-nilai adat tradisi, yang selanjutnya akan membentuk dan memperkuat jati diri daerah, serta mendukung berkembangnya kemandirian daerah, kiranya perlu dilestarikan dan diaplikasikan. Akhirnya, nilai-nilai yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal bisa menjadi identitas dan jati diri bagi seseorang, sukubangsa serta bangsa (*nation*). Oleh sebab itu, kehidupan yang selalu menekankan kepada aspek kekerabatan (*peseduluran*) dengan mengedepankan sikap kebersamaan, kerukunan, kegotongroyongan, tentu akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang *rukun*, *adem ayem*, serta *tentrem*, jauh dari terjadinya konflik sosial.

Akan tetapi pertanyaan penting yang masih perlu direnungkan dan dicari jawabannya adalah apakah sikap-sikap seperti rukun, *guyub*, *adem ayem*, *tentrem* tersebut, harus muncul setelah bencana terjadi?

Daftar Pustaka

- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. (terjemahan). Yogyakarta: Kanisius.
- Keesing, Roger M. 1999. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kedaulatan Rakyat. 2006. "Kebangkitan Yogyakarta, Kebangkitan Indonesia", dalam *Tajuk Rencana*, Yogyakarta, 20 Juni 2006.

SEKILAS TENTANG PATHOK NAGARA

Samrotul Ilmi Albiladiyah

Abstrak

Pada awal berdirinya Kraton Kasultanan Yogyakarta, dikenal adanya lembaga-lembaga peradilan, misalnya pengadilan perdata, pengadilan surambi serta Bale Mangu. Pengadilan Surambi atau Hukum Dalem Surambi, merupakan pengadilan yang berhubungan dengan agama yang diketuai oleh seorang penghulu hakim.

Seorang penghulu hakim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh empat orang anggota yang disebut dengan pathok nagara. Di kalangan Reh Kawedanan Pangulon Kraton Ngayogyakarta sebutan pathok nagara semacam abdi dalem yang membuat tugas penghulu hakim di Pengadilan Surambi.

Saat ini, kedudukan pathok nagara mengalami perubahan. Abdi dalem pathok nagara tidak ubahnya sebagai seorang yang dijadikan panutan oleh masyarakat sekitar, di mana ia bertugas di masjid-masjid yang menjadi milik Kraton Yogyakarta.

Keberadaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang ini tak lepas dari peristiwa penting di tahun 1755 adanya pembagian negara (*palihan negari*) Mataram Islam menjadi dua bagian, Surakarta dan Yogyakarta. Sebagai penerus Mataram yang bersifat Islam, raja Yogyakarta mendapat gelar Sultan, maka Pangeran Mangkubumi raja pertama mempunyai sebutan Sri Sultan Hamengku Buwana I (HB I). Sebutan tersebut merupakan kependekan gelar yang panjang sesuai dengan amanah seorang pemimpin negara dan keagamaan, yang sarat dengan simbol dan makna yaitu Sultan Hamengku Buwana *Senapati Ingalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah*. Sebelum menjadi Sultan, HB I telah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana mengelola suatu ‘negara’. Pengalamannya sebagai seorang pangeran Mataram (putra Sunan Amangkurat IV), mau tidak mau harus mempelajari ilmu pengetahuan apa saja yang berguna, termasuk belajar agama, *mengaji*, dan sebagainya. Ini dilakukannya baik ketika

di Kartasura maupun kemudian pindah ke Surakarta. Pengetahuan keagamaan demikian paling tidak telah memberi bekal ketika harus menjadi Sultan di Yogyakarta.

Pada awal Kasultanan Yogyakarta, HB I masih melestarikan kebijakan dan aturan yang dipandang sesuai dengan pemerintahannya, termasuk adanya lembaga peradilan. Pada masa itu berlaku adanya lembaga-lembaga peradilan dengan nama Jawa yaitu *Pengadilan Pradata* (menyelesaikan perkara perdata dan pidana), *Surambi* (agama) dan *Bale Mangu* (pidana, administratif, agraria). Dalam kaitan dengan topik kali ini yang akan dikemukakan adalah *Pengadilan Surambi* atau dalam catatan-catatan yang ada di kraton disebut juga *Hukum Dalem Ing Surambi* dan biasa disingkat *Hukum Dalem*. Disebut demikian karena lembaga ini menempati Serambi Masjid Agung, juga disebut *al mahkamah al kabirah*, yang menangani masalah-masalah perkawinan, kemelut rumah tangga, perceraian, gugatan cerai dari pihak istri terhadap suaminya, perolehan nafkah,

warisan, *wasiat*, hibah, dan sebagainya, menurut tata cara Islam.¹ Sebagai catatan di sini bahwa segala sesuatu yang dimiliki raja dan kerajaan disebut milik raja atau *kagungan dalem*. Demikian pula semua pegawai dan pembantu raja disebut *abdi dalem*.

Pengadilan Surambi atau *Hukum Dalem Ing Surambi* di Yogyakarta diketuai oleh seorang penghulu yang disebut *penghulu hakim*. Sebagai ketua ia memperoleh gelar dari Sultan: Kyai Pengulu. Kemungkinan yang menjadi penghulu pertama di Yogyakarta yang diserahi tanggungjawab masjid adalah Kyai Penghulu Seh Abodin.² Dalam melaksanakan tugasnya menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat, *penghulu hakim* dibantu oleh empat orang anggota disebut *pathok nagara* atau dalam bahasa halus *pathok nagari*. Baik *penghulu hakim* maupun *pathok nagara* termasuk *abdi dalem*. Dalam perkembangan selanjutnya susunan keanggotaan ini ditambah adanya beberapa khotib yang bertugas memberi khotbah di beberapa masjid pada hari Jumat. Adapun kitab hukum yang dipakai sebagai acuan di samping Al Quran dan Hadits adalah kitab-kitab fiqh yaitu Kitab Muharrar, Mahali, Tuhpah (baca: Tuhfah), Patakulmungin (Fat-hulmu'in) dan Patakulwahab (Fat-hulwahab). Apabila benar demikian, maka tugas *penghulu hakim* dan anggota-anggotanya yaitu *pathok nagara* dengan *abdi dalem* di bidang hukum, keagamaan, di masyarakat sungguh tidak ringan.

Sebutan *pathok nagara* di kalangan *Reh Kawedanan Pangulon Karaton Ngayogyakarta* (semacam Departemen Agama) merupakan jabatan *abdi dalem* di lembaga tersebut, dan tepatnya pembantu

penghulu hakim di *Pengadilan Surambi*. Istilah tersebut dalam bahasa Jawa terdiri dari dua kata; *pathok* dan *nagara*. Dalam kamus *Baoesastra Djawa* oleh W.J.S. Poerwodarminta,³ *pathok (patok)* artinya yaitu 1) sesuatu benda yang dapat ditancapkan baik berupa kayu, bambu dan lain-lain, dengan maksud untuk batas, tanda, dan sebagainya. 2) bersifat tetap tidak dapat ditawar-tawar lagi, 3) tempat para peronda berkumpul, 4) sawah yang pokok, 5) –an artinya *angger-angger*, *paugeran* atau aturan, 6) dasar hukum. Sedangkan *nagara* berarti negara, kerajaan, atau pemerintahan. *Pathok nagara* atau dalam bahasa Jawa halus *pathok nagari*, secara harafiah dapat berarti batas negara, namun juga dapat berarti ‘aturan (yang dianut oleh) negara’, dasar hukum negara. Suatu contoh kata *angger* berkaitan dengan hukum, pada masa itu ada kitab *Angger Sepuluh* atau *Angger Sedasa* merupakan undang-undang yang mengatur tentang administrasi dan agraria, demikian juga serat *angger-angger* yang lain.

Berkaitan dengan lembaga hukum tersebut, pada awal berdirinya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1755, mempunyai lembaga hukum bernama *Pengadilan Surambi (Hukum Dalem Ing Surambi)* yang juga dipunyai oleh Surakarta. Di Yogyakarta lembaga ini diketuai *penghulu hakim*, dibantu oleh empat orang anggota bernama *pathok nagara* yang di Surakarta bernama *Ngulama*. Pada perkembangan selanjutnya, susunan keanggotaan *Pengadilan Surambi* tersebut kemudian ditambah adanya *ketib-ketib* (baca: khotib), sebagai pembantu yang akhirnya menjadi anggota pula sehingga menjadi 10 orang.

¹ KRT. Nitipradja, Pengabdian Ing Pradja Ngayogyakarta', dalam majalah *Hoedyana Wara*, Th.1, No.2, bln. Agustus, 1941. Dwara Warta (Krapid), Jogjakarta. hal. 66

² G.P. Rouffaer. *Vorstenlanden*. Overdruk Uit Adatrechbundel XXXV, serie D, 1931 hlm 105

³ W.J.S. Poerwodarminta. *Baoesastra Djawa*. J.B. Wolters, Uitgevers Maatschappij NV, Groningen-Batavia, 1939, hal. 479

Menurut catatan arsip *Kawedanan Reh Pangulon*, *pathok nagara* merupakan jabatan (*abdi dalem*) rendah di suatu lembaga peradilan yang diberikan oleh raja (Sultan) kepada seseorang yang dipercaya mampu menguasai bidang hukum agama Islam atau syariah. Tidak diketahui secara pasti kenapa sebutan jabatan tersebut demikian. Penulis hanya dapat menduga bahwa hal itu berkaitan dengan keberadaannya di lembaga hukum (agama) yang berlaku di saat itu. Keberadaannya di masyarakat sebagai tokoh panutan, sebagai kepanjangan aturan raja yang memerintah *negari* (keprajan) Yogyakarta. Walaupun jabatan rendah, namun *abdi dalem pathok nagara* mempunyai peranan penting dalam pemerintahan saat itu, karena langsung berhadapan dengan masyarakat yang penuh dengan berbagai macam permasalahan. Sesuai dengan peranan dan tugasnya yang menyangkut kehidupan masyarakat kasultanan berdasarkan agama pada masa itu, maka sebagai *abdi dalem pathok nagara* pembantu *penghulu hakim*, harus membekali dirinya dengan pengetahuan agama. Ia mempunyai kewajiban mencerdaskan masyarakat di bidang kehidupan beragama dan bermasyarakat. Perlu diketahui bahwa pada masa itu masa penjajahan Belanda, sehingga raja perlu membentengi rakyatnya secara jiwani, supaya berkepribadian kuat. Untuk syiar agama Islam ini maka di berbagai daerah di wilayah didirikanlah masjid-masjid yang kemudian disebut *masjid kagungan dalem* yang berarti masjid milik raja atau sering disebut Masjid Sulthoni. Menurut catatan *Kawedanan Pangulon Keraton Yogyakarta* (1981), *masjid kagungan dalem* di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 78 buah, baik di dalam kota maupun yang tersebar di daerah-daerah Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul.

Dalam arsip kraton yang tersimpan di Perpustakaan Widyabudaya, *pathok nagara abdi dalem Kawedanan Pangulon*

Kasultanan Yogyakarta oleh Sultan ditempatkan di Mlangi Kabupaten Sleman (barat), Plosokuning Kabupaten Sleman (utara), Dongkelan Kabupaten Bantul (selatan) dan Babadan Yogyakarta (timur). Pada masa pendudukan Balatentara Jepang (1942 – 1945), Babadan ini pernah direncanakan akan dijadikan tempat amunisi untuk keperluan perang Jepang, sehingga banyak penduduk yang pindah ke arah utara, kampung Kentungan, demikian juga masjidnya. Akan tetapi rencana tersebut tidak jadi dan penduduk kembali ke Babadan semula, masjidnya pun dibangun lagi. Di tempat-tempat ini *pathok nagara* yang termasuk *abdi dalem Reh Kawedanan Pangulon* bertanggung jawab atas kehidupan keagamaan dalam masyarakat dan kemakmuran masjid ‘milik raja’ (*masjid kagungan dalem*) yang ditanganinya. Walaupun jumlah *masjid kagungan dalem* banyak, namun hanya empat masjid itulah yang ditangani oleh *pathok nagara*. Dalam memakmurkan masjid, ia dibantu oleh *khotib*, *muadzin*, *merbot*, *barjama’ah* dan *ulu-ulu*. Tidak ada keterangan-keterangan yang pasti kenapa keempat *abdi dalem pathok nagara* itu ditempatkan di Mlangi, Plosokuning, Dongkelan dan Babadan. Apabila dilihat dari pusat kerajaan keempat desa itu berada di barat, utara, selatan dan timur. Di pusat kerajaan sendiri ada Masjid Agung sebagai masjid kerajaan yang berdekatan dengan bangunan kraton.

Ada kebiasaan orang Jawa, menurut imajinasinya bahwa jumlah 4 (empat) letaknya di dalam sebuah ruang, masing-masing menempati mata angin utama yang mengelilingi suatu titik pusat. Hal ini juga terungkap dalam susunan lembaga pemerintahan, satu ada di tengah-tengah sebagai kepala ditambah 4 (empat) berada di sekelilingnya sebagai pembantu utama. Sebagai contohnya pemerintahan pada masa kerajaan Mataram-Islam, apabila raja duduk di singgasana, dihadap para pegawainya (*abdi dalem*) duduk membentuk lingkaran-

lingkaran konsentris.⁴ Menilik kebiasaan orang Jawa yang ‘suka’ serba empat mengelilingi satu pusat, ada kemiripan dengan letak-letak masjid milik raja yang menjadi tanggungjawab *pathok nagara*. Bukankah mereka itu *abdi* yang bertugas membantu *penghulu hakim* sebagai ketua *Pengadilan Surambi*. Pertanyaan mengenai jumlah *abdi dalem pathok nagara* yang membantu *penghulu hakim* di *Pengadilan Surambi* hanyalah empat, kemungkinan ada kaitannya dengan konsep konsentris seperti yang ada di kerajaan-kerajaan Jawa masa lalu.

Telah disebutkan bahwa *abdi dalem pathok nagara* bertanggungjawab terhadap masjid yang ditanganinya. Begitu eratnya antara *masjid pathok nagara* ini sehingga terucap oleh masyarakat masjid-masjid tadi sebagai *masjid pathok nagara*. Ucapan tersebut tidaklah salah, karena sebenarnya mengandung maksud *masjid kagungan dalem* yang menjadi tanggungjawab *pathok nagara*. Oleh karena itu tidaklah mengherankan di sekitar tempat tersebut sampai kini masih ada pesantren, tempat belajar agama Islam.

Setelah kemerdekaan keadaan menjadi berubah. Kerajaan-kerajaan yang semula mempunyai ‘kekuasaan’ (walaupun masih juga di bawah kekuasaan penjajah) dengan sendirinya masuk ke satu wadah karena telah terbentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kasultanan Yogyakarta juga Kadipaten Pakualaman meleburkan daerahnya ke wilayah Republik Indonesia. Walaupun Republik Indonesia baru berdiri namun sebagai negara harus mempunyai dasar negara, Undang-Undang Dasar juga kebijakan-kebijakan lainnya. Peraturan atau undang-undang pemerintah pendudukan sedikit demi sedikit dirubah, termasuk di bidang peradilan.

Selanjutnya pada tanggal 29 agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan Raja (*Zelfbestuursrecht-spraak*) di Jawa dan Sumatera. Di dalamnya menyebutkan bahwa semua pengadilan raja diserahkan kepada pengadilan yang berwenang (Republik Indonesia). Dengan demikian sejak diberlakukan UU tersebut maka secara yuridis *Pengadilan Surambi* telah hapus. Walaupun tidak mempunyai kewenangan di lembaga peradilan, namun *penghulu hakim* dan *pathok nagara* secara adat masih tetap sebagai *abdi dalem* di *Reh Kawedanan Pangulon*. Di sini *kawedanan* semacam departemen dan *Kawedanan Pangulon* mengurus masalah keagamaan, masalah ukhrawi. Semenjak itu pula tidak ada lagi pengangkatan *abdi dalem pathok nagara*, namun demikian masjidnya masih ada dan dimanfaatkan sampai sekarang.

Daftar Pustaka

- Heine Gelderen, Robert. 1972. *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja Di Asia Tenggara* (terjemahan Deliar Noer). CV. Rajawali.
- Nitipradja, KRT. 1941. Pengabdian Ing Pradja Ngayogyakarta’, dalam majalah *Hoedyana Wara*, Th.1, No.2, bln. Agustus, 1941. Jogjakarta: Dwara Warta (Krapid).
- Rouffaer, G.P. 1931. *Vorstenlanden*. Overdruk Uit Adatrechbundel XXXV, serie D.
- Poerwodarminta, W.J.S. 1939. *Baoesastra Djawa*. Groningen-Batavia: J.B. Wolters, Uitgevers Maatschappij NV.

⁴ Robert Heine Gelderen, *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja Di Asia Tenggara* (Terjemahan Deliar Noer), CV. Rajawali, 1972, hal. 11-12

PAWON DALAM BUDAYA JAWA

Sumintarsih

Abstrak

Pawon atau dapur tradisional dalam budaya Jawa merupakan representasi dari tata kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, baik dari tata letaknya, fungsinya, dan isinya. Pawon atau dapur tradisional juga menegaskan adanya deskriminasi seks dalam pembagian kerja.

Pendahuluan

Dalam hidup orang Jawa dikenal adanya tiga ungkapan yang sangat penting yaitu *sandang*, *pangan*, dan *papan*. Artinya, dalam hidup manusia Jawa memerlukan tiga hal yang sangat penting yaitu: *sandang* (pakaian) untuk membalut tubuh supaya terlindung dari kedinginan, kepanasan, dan untuk estetika; *pangan* (makan) adalah makanan yang harus ada untuk dimakan sebagai syarat untuk bertahan hidup; dan *papan* (rumah atau *omah*) sebagai tempat berteduh atau tempat tinggal. Ketiga unsur budaya tersebut (*sandang*, *pangan*, dan *papan*) merupakan simbol penting dalam kehidupan orang Jawa.

Di dalam budaya Jawa terdapat anggapan bahwa antara rumah, tanah, dan penghuninya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Orang merasa bersatu dengan rumah dan tanah tempat tinggalnya, sekaligus merasa bersatu dengan desa tempat menetapnya. Perasaan bersatu yang demikian itu menyebabkan rasa aman dan tenteram bagi orang yang menghuni rumah tersebut. Dengan adanya perasaan demikian itu, maka rumah merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia¹. Karena dapur adalah bagian dari rumah, dengan sendirinya juga memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan penghuni rumah tersebut.

Bagi orang Jawa, karena rumah dianggap sangat penting, maka ruang-ruang di dalam rumah ditata sedemikian rupa, sehingga ada bagian-bagian yang terbuka bagi orang luar atau tamu-tamu, dan ada pula bagian-bagian yang tabu atau harus disembunyikan dari orang luar.

Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan berikut ini akan memfokuskan diri pada salah satu unsur budaya Jawa, yaitu bagian dari *papan*, atau *omah* (rumah) yang disebut *pawon* atau dapur. Dapur, atau *pawon* ini mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan penyiapan kebutuhan makanan, maupun penyimpanannya, serta kegiatan lainnya. Masalah yang muncul adalah sampai sejauh mana manusia Jawa memaknai dan memperlakukan dapur, atau *pawon* guna memenuhi kebutuhan akan makan, minum, dan kebutuhan lainnya.

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, berubahnya lingkungan alam, dan kemajuan teknologi, dapur atau *pawon* juga mengalami perkembangan bentuk, arti dan fungsi.

Arti *Pawon* atau Dapur dan Tata Letaknya

Kata *pawon* merupakan sebutan untuk dapur dalam masyarakat Jawa pada

¹ Djoko Surjo, *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya*. Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1985.

umumnya. Dapur, dalam bahasa Jawa disebut *pawon*, mengandung dua pengertian: pertama, bangunan rumah yang khusus disediakan untuk kegiatan masak-memasak dan; kedua, dapat diartikan tungku. Kata *pawon* berasal dari kata dasar *awu* yang berarti abu, mendapat awalan *pa* dan akhiran *an*, yang berarti tempat. Dengan demikian, *pawon* (*pa+awu+an*) yang berarti tempat *awu* atau abu. Kenyataannya memanglah demikian, dapur atau *pawon* memang tempat abu (bekas pembakaran kayu/arang di tungku), sehingga dianggap sebagai tempat yang kotor. Dapur dalam kehidupan tradisional orang Jawa, memang tempat abu, di sana-sini nampak bergelantungan *sawang* (jelaga) yang hitam oleh asap api. Demikian juga peralatan memasak berwarna kehitaman karena jelaga. Kemungkinan disebabkan oleh keadaan seperti itulah (penampilan yang seba hitam dan kotor), maka di dalam susunan rumah tradisional Jawa, dapur pada umumnya terletak di bagian belakang.

Dalam budaya Jawa menurut Parsudi Suparlan, konsep tentang sistem klasifikasi mengenai alam semesta dan isinya terdapat konsep dikotomi antara yang baik dan buruk, bersih dan kotor². Oleh karena itu dalam sistem klasifikasi itu maka *kakus* (jamban atau kamar kecil) maupun dapur letaknya selalu di belakang. Oleh karena dapur dianggap tempat kotor, maka dalam hal membuat bangunan dapur tidak begitu diperhatikan seperti halnya kalau membuat rumah induk. Menurut Daldjoeni (1985) pada umumnya bangunan dapur adalah bangunan tambahan, dan biasanya bangunan dapur dibuat sesudah bangunan rumah selesai.

Dapur atau *pawon* sebagai bangunan tambahan, tidak dianggap sebagai bangunan

pokok atau penting, dan konstruksi bangunan dapur sangat sederhana. Oleh karena itu untuk membuat dapur tidak diperlukan persyaratan yang rumit seperti akan membuat rumah induk yang memerlukan perhitungan waktu (*primbon*).

Dalam kehidupan tradisional Jawa, makan tidaklah mendapatkan perhatian penting. Dalam Kitab *Wulangreh* karya Paku Buwana IV mengatakan '*aja pijer mangan nendra*' (jangan selalu makan dan tidur), dan '*sudanen dhahar lan guling*' (kurangilah makan dan tidur) menduduki tempat utama di dalam kepercayaan orang Jawa³. Pandangan hidup orang Jawa menandakan bahwa kekuatan seseorang bukanlah tergantung pada banyaknya makanan yang masuk ke dalam tubuh, melainkan kepada tekad dan batin. Orang tidak akan menjadi lemah tubuhnya hanya karena sedikit makan, bahkan sebaliknya, orang akan memperoleh 'kekuatan' karena sering melaksanakan '*ngurang-ngurangi* makan dan tidur (*tirakat* atau asketis).

Karena terpengaruh oleh pandangan hidup demikian itulah, maka dalam susunan arsitektur rumah Jawa, dapur atau *pawon* serta kegiatan memasak tidak mendapat perhatian khusus. Namun demikian di dalam pola pikir orang Jawa, makan diartikan menerima berkah dari Dewi Sri yang dianggap sebagai sumber rejeki⁴. Penghormatan terhadap Dewi Sri oleh orang Jawa semata-mata bukan diwujudkan dalam makan dan kegiatan memasak, tetapi penanganan secara serius dalam pengolahan lahan pertanian sejak awal sampai pascapanen.

Perempuan dan Dapur

Di dalam kehidupan tradisional Jawa,

² Parsudi Suparlan, "Kebudayaan dan Tata Ruang: Struktur Kehidupan Manusia, Tradisi, dan Perubahan". *Seminar Arsitektur Tradisional di Surabaya*. Jakarta: Proyek IDKD, 1986.

³ Pakubuwono IV, *Wulangreh Winardi*. R.M Sutarto Hardjowahono, Surakarta, 1953.

⁴ Soepanto, "Peranan *Ngantenan* Dalam Upacara *Wiwit* di Kalangan Masyarakat Petani Jawa" *Bunga Rampai Adat Istiadat*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1977.

dapur merupakan ranah dan wewenang kaum perempuan. Oleh sebab itulah maka isteri dalam kehidupan budaya Jawa disebut sebagai *kanca wingking* (teman yang berada dan/atau bekerja di belakang). Belakang di sini berarti di dapur. Istilah ini dinilai merendahkan martabat perempuan, seakan-akan wewenang perempuan hanya di dapur saja, tidak ada kemampuan untuk tampil di depan.

Bahwa dapur identik dengan perempuan dan menjadi ranah dan wewenang perempuan, juga tercermin misalnya kalau seorang suami yang sering ke dapur ada anggapan dalam budaya Jawa bahwa suami tersebut dinilai kurang mempercayai isteri di dalam mengelola dapur atau ekonomi rumah tangga. Laki-Laki atau suami seperti itu disebut dengan istilah *kethuk* atau *cupar*. Jadi dapur merupakan dunia perempuan, dan sebagai ciri pengenal khusus, dapur dalam kehidupan tradisional Jawa ditekankan pada *kendhil* dan asap. Hal ini dikuatkan dengan adanya cerita rakyat Jaka Tarub⁵. Cerita ini melambangkan bagaimana peranan perempuan di dapur, dan dapat dimaknai suami harus percaya terhadap apapun yang dilakukan isteri dalam kaitannya dengan dapur.

Sesuai dengan kedudukan perempuan di dapur dan hubungan perempuan dengan dapur, maka dalam pembuatan dapur pun secara tradisional ada perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan perempuan. Menurut Koentjaraningrat⁶, terdapat kepercayaan pada orang Jawa bahwa dapur adalah bagian rumah yang paling lemah disebabkan dapur merupakan tempat perempuan, dan perempuan dianggap makhluk yang paling lemah atau disebut *liyu*.

Arti kata *liyu*, dalam *Bausastra Jawa-Indonesia* (1980), dapat diartikan capai atau lelah. Dari arti kata ini dapat dimaknai bahwa bekerja di dapur akan capai/lelah.

Dalam membuat dapur atau *pawon* ada yang masih menggunakan perhitungan-perhitungan Jawa. Misalnya, oleh karena dapur dianggap sebagai tempat perempuan maka untuk membangun dapur harus dimulai saat *neptune nyaine* (hari pasaran kelahiran istri), misalnya Senin *Pon*, Selasa *Wage* dan sebagainya. Supaya dalam menggunakan dapur diberi keselamatan, ada juga yang menggunakan perhitungan yaitu jatuh *tiba lara* (*tiba* = jatuh, *lara* = mati), jadi dapur atau *pawon* diartikan sebagai tempat barang mati, atau tempat buangan.

Di dalam studi perumahan tradisional, pembuatan dapur Jawa ada yang dimulai dengan perhitungan yang jatuh pada urutan *liyu* yang berarti *lumbung*. Seperti diketahui bahwa *lumbung* adalah tempat persediaan makan, sedangkan *pawon* atau dapur adalah tempat mengolah atau memasak. Jadi diharapkan dengan perhitungan jatuh pada urutan *liyu*, supaya *pawon* atau dapur tidak pernah berhenti atau kehabisan bahan masakan. Namun pada umumnya yang dianut adalah menghindari hari *geblag* (hari meninggalnya) keluarga dekat misalnya orang tua, suami/isteri, atau anak.

Pawon dan Peralatan Dapur

Dapur tradisional atau *pawon* tidak terlepas dengan peralatan yang digunakan dalam dapur tersebut, yaitu tungku tradisional yang memiliki berbagai sebutan lokal di antaranya *pawon*, *keren*, *dhingkel*, *luweng*, atau *anglo*. Tungku yang disebut *dhingkel*

⁵ Dalam cerita Jaka Tarub dikisahkan Jaka Tarub memperistri seorang bidadari bernama Dewi Nawangwulan. Jaka Tarub heran kenapa beras yang ada di dalam lumbung tidak habis-habisnya. Didorong karena keingintahuannya maka Jaka Tarub melanggar pesan istrinya agar tidak masuk ke dapur. Tetapi keingintahuan Jaka Tarub tersebut harus dibayar mahal. Karena sesudah itu beras atau padinya menjadi cepat habis dan isterinya dapat menemukan selendang yang disembunyikan di dalam lumbung ditimbuni padi. Isterinya kemudian pulang ke kayangan meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya.

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1984.

terbuat dari susunan batu bata yang berlubang satu atau sama sekali terbuka. Bentuk lain seperti *dhingkel* adalah yang disebut *luweng*, tetapi *luweng* lebih panjang dan memiliki lubang tiga sampai empat dan terdapat sebutan untuk masing-masing bagian yang berfungsi misal yang disebut *cangkem luweng* tempat untuk memasukkan kayu bakar, *bolongan luweng* atau *slowongan* untuk tempat meletakkan peralatan masak, *tumang* atau bibir *dhingkel*, dan *lawih* sebagai penopang (*ganjel*) yang diletakkan pada bibir. Peralatan tungku lainnya yang pada umumnya digunakan oleh sebagian penduduk di daerah pedesaan adalah *keren*. Alat tungku yang disebut *keren* juga memiliki bagian-bagian yang berfungsi yaitu *cangkem keren* untuk meletakkan bahan bakar, dan pada bagian atas *bolongan keren* untuk meletakkan peralatan memasak. Baik *dhingkel*, *luweng*, maupun *keren* menggunakan bahan bakar kayu, *sepet*, bambu, atau sampah-sampah kering.

Tungku lainnya yang juga masih digunakan adalah *anglo*, yang bahan bakarnya menggunakan arang. *Anglo* juga mempunyai bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda yaitu *sarangan anglo* untuk tempat arang, *cangkem anglo* (mulut *anglo*) adalah tempat kita mengipasaskan kipas agar api menyala lebih besar. Alat lain yang sekarang sudah mulai banyak digunakan adalah kompor.

Di dalam dapur tradisional peralatan

memasak yang pada umumnya digunakan adalah peralatan yang terbuat dari tanah liat dan anyaman bambu. Peralatan memasak dari tanah liat misalnya *kuali*⁷, *pengaron*⁸, *kendhil* atau *jemblukan*⁹, *cowek*¹⁰, *kekep*¹¹, *genthong*¹². Selain peralatan dari tanah liat juga banyak yang menggunakan peralatan dari tembaga, besi, aluminium, seng, misalnya *dandang*, *kenceng*, *wajan*, *ketel*, *ceret*, *panci*. Peralatan lainnya terbuat dari anyaman bambu seperti *kukusan*¹³, *salang*¹⁴, *kalo*, *cething*, *tenggok trinit*, *tampah*, *selon*¹⁵ dan dari tempurung kelapa misalnya *irus*, *enthong*, *siwur*; peralatan dari kayu misalnya *munthu*, *parut*, *enthong*, *gledheg* atau *grobog*. Tempat untuk menyimpan peralatan dapur tersebut pada umumnya diletakkan pada sebuah rak kayu, atau rak bambu, atau ada yang disebut *paga*, *bethekan* atau *pranjen*.

Dilihat dari peralatan tungku yaitu *dhingkel*, *luweng*, *keren*, serta perabot *pawon* yang sebagian besar terbuat dari tanah liat, anyaman bambu, maupun tempat menyimpan peralatan tersebut, hampir semuanya dengan memanfaatkan bahan-bahan yang terdapat di lingkungannya.

Dapur Tradisional dan Lingkungan Hidup

Dapur mempunyai peranan yang penting, yaitu menjadi pusat kegiatan sehari-hari untuk menyediakan makan-minum keluarga. Meskipun dapur atau *pawon*

⁷ *Kuali* biasanya untuk memasak sayur.

⁸ *Pengaron* untuk tempat air, atau untuk *ngaru* nasi (memasak nasi sebelum di *dang*).

⁹ *Kendhil* atau *jemblukan* untuk memasak air, atau merebus jamu.

¹⁰ *Cowek* peralatan untuk membuat sambal atau menghaluskan bumbu.

¹¹ *Kekep* kecil untuk tutup *kendhil* atau *kuali*, *kekep* besar untuk tutup *adang* (menanak nasi).

¹² *Genthong* tempat untuk *tandhon* air bersih (menyimpan air).

¹³ *Kukusan* untuk *adang* nasi (memasak nasi dengan cara dikukus).

¹⁴ *Salang* adalah gantungan terbuat dari siratan kulit bambu atau dari *tampar* untuk tempat menyimpan makanan.

¹⁵ *Selon* terbuat dari bambu untuk tempat menyimpan *munthu*, *irus*.

menjadi pusat kegiatan, tetapi masalah kebersihan lingkungan kurang diperhatikan. Tempat pembuangan limbah air dapur biasanya berada di samping atau di belakang dapur, dan itu biasanya tidak secara khusus dibuat untuk itu. Jadi limbah dapur yang dialirkan ke belakang rumah langsung ke kebun atau tegalan di belakang rumah atau dialirkan ke tempat kolam ikan. Namun ada juga yang dialirkan ke sebuah lubang (*jugangan*) yang dibuat secara khusus di belakang rumah. Pembuangan air limbah di daerah pedesaan kebanyakan berpola seperti itu. Memang terkesan tidak ada perhatian terhadap kebersihan lingkungan akan tetapi dari tindakan-tindakan mereka tersembunyi kearifan-kearifan lingkungan. Seperti misalnya di daerah tertentu ada yang air limbah dapur ditampung ke dalam ember dan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman kebun atau tegalan yang ada di belakang dan samping rumah. Bahkan ada yang sebagian ditampung untuk minum ternaknya. Pola seperti ini pada umumnya terdapat di daerah yang tidak tersedia cukup air atau di daerah kering¹⁶. Sedangkan dalam hal pembuangan sampah ada yang dibuatkan lubang untuk menampung kemudian dibakar, apabila sudah penuh kemudian diaduk dengan tanah yang ada untuk dijadikan sebagai pupuk¹⁷, atau ada yang dibiarkan sampai kering untuk bahan bakar¹⁸, ada pula yang dikumpulkan sebagian untuk pupuk pohon pisang.

Pemanfaatan limbah dapur maupun sampah yang ada di sekitarnya menunjukkan bahwa sebenarnya ada praktik-praktik daur ulang, dalam arti bahwa limbah tersebut diproses dan dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya baik untuk kelestarian lingkungan maupun kebutuhan manusia itu sendiri.

Rumah, pekarangan, serta *pawon* atau

dapur merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi sosial. Pekarangan biasanya digunakan untuk menanam tanaman produktif yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk kebutuhan jangka panjang misalnya tanaman keras, sedangkan tanaman jangka pendek untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya tanaman yang disebut *cepakan* yaitu tanaman sayuran, atau dedaunan lainnya yang langsung dapat dimanfaatkan. *Pawon* atau dapur menjadi tempat menyimpan makanan mentah dan masak (*mentah mateng*), dan bumbu-bumbu dapur lainnya.

Dalam hubungan ketetanggaaan, masuk ke pekarangan, atau dapur untuk sekedar bertandang atau untuk meminta sayuran atau bumbu, merupakan hal yang biasa. Bahkan di daerah pegunungan yang berhawa dingin, masih ada kebiasaan (walaupun sekarang sudah jarang dilakukan) untuk bertandang ke tetangga pada malam hari, sambil membakar ketela atau jagung di dapur sambil mengobrol bersama.

Dengan berkembangnya teknologi (terutama di kota) tata ruang dapur sekarang dibangun sedemikian rupa dan menggunakan peralatan yang bukan dari tanah liat atau anyaman bambu, tetapi peralatan modern serba elektronik. Demikian juga *pawon* atau dapur (khusus di kota) letaknya tidak di belakang tetapi menjadi satu sebagai bagian dari tata ruang rumah. Apabila ini dikaitkan dengan kata *pawon*, maka konotasi dari kata *pawon* dengan dapur menjadi tidak tepat, karena pada dapur yang modern tersebut tidak akan dijumpai timbunan abu seperti yang dijumpai pada dapur tradisional. Bergesernya pengertian *pawon* tersebut, tentunya akan memberikan gambaran pula kepada kita

¹⁶ Pola seperti itu terdapat di daerah Gunung Kidul dan Kulon Progo.

¹⁷ Terutama di daerah tandus Gunung Kidul.

¹⁸ Terdapat di daerah Bantul, sampah ada yang digunakan untuk penyubur pohon pisang, dan sampah kering digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak gula Jawa.

mengenai tata ruang dapur di masa akan datang, dan tidak akan ada lagi diskriminasi seks yang berperan di dapur.

Ungkapan-Ungkapan

Di dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa, banyak kejadian-kejadian, atau peristiwa yang dinyatakan dengan ungkapan-ungkapan yang sebagian menggunakan dapur dan peralatannya. *Pawon* atau dapur dan kegiatannya, ternyata menduduki tempat yang penting. Ungkapan '*aja nganti nggoling kendhile*' (*kendhil* jangan sampai terguling) mengandung maksud agar bersikap hati-hati, hemat, cermat di dalam mengelola ekonomi rumah tangga; di samping itu untuk menyatakan kondisi perekonomiannya yang sedang mengalami kemunduran. Di sini *kendhil* dimaknai sebagai simbol ekonomi rumah tangga. Kehidupan perekonomian suatu rumah tangga bisa dihubungkan dengan *kendhil*. Misalnya, seorang istri yang bekerja mencari nafkah dikatakan *kanggo jejegke kendhil*, maksudnya untuk menambah penghasilan supaya dapat memasak untuk keluarga. Orang yang bekerja apapun untuk mendapatkan uang atau bekerja keras dinyatakan dengan kata '*demi kendhil*'.

Kecuali dengan istilah *kendhil*, kesatuan perekonomian rumah tangga juga dinyatakan dengan istilah *pawon*. Suatu keluarga yang terpisah karena pekerjaan, yang masing-masing memerlukan pengelolaan perekonomian sendiri-sendiri, sering dikatakan mikir *pawon loro*. Dengan demikian istilah *pawon* bukan hanya mengandung pengertian bangunan khusus untuk melaksanakan kegiatan memasak, melainkan juga merupakan lambang rumah tangga¹⁹

Peralatan dapur juga digunakan untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan yang

maknanya sangat mengena dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ungkapan *ora mambu enthong irus*, artinya untuk menyatakan bahwa orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, demikian juga ungkapan *ora mambu sega jangan*²⁰.

Sebaliknya ada ungkapan yang dinyatakan dengan hasil masakan yaitu *mambu-mambu yen sega* mengibaratkan orang yang masih memiliki pertalian keluarga; ungkapan lain *bacin-bacin yen iwak*, untuk mengungkapkan bahwa pada umumnya orang itu mengutamakan keluarga sendiri.

Ungkapan *adang-ngliwet*, mengandung makna melaksanakan kerjasama untuk mendapatkan imbalan, dan dalam pembagiannya disesuaikan dengan kedudukan masing-masing dalam pekerjaan tersebut. Ungkapan ini juga mengandung makna kecaman terhadap ketidakadilan, misal sama-sama melakukan tugas yang sama tetapi masing-masing imbalan berbeda.

Ungkapan yang ada hubungannya dengan tungku adalah *lambe satumang kari semerang*, artinya bibir setebal *tumang* tinggal setebal *merang*. Maksudnya adalah nasehat yang tidak dihiraukan sama sekali, ibarat bibir sampai tipis karena banyaknya memberi nasehat, namun tak ada hasilnya.

Ungkapan *tumbu oleh tutup*, artinya mendapat jodoh yang sesuai, atau mendapat sahabat yang mempunyai persamaan watak. Ungkapan yang ada hubungan dengan alat dapur yaitu jenang *sak layah*, artinya buah pemikiran yang sudah bulat.

Dalam percakapan sehari-hari, hubungan saudara yang diperoleh karena perkawinan disebut *munthu katutan sambel*. Demikian juga hubungan saudara sekerabat dari keturunan enam dan tujuh disebut *udheg-udheg gantung siwur*. Seseorang yang pantatnya besar dinyatakan dengan ungkapan

¹⁹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1981.

²⁰ Dalil Prawirodihardjo, *Paribasan*. Yogyakarta: Spring, tt.

bokonge sak tampah; seseorang yang tidak bisa duduk, jalan ke sana ke mari dinyatakan *bokong kukusan*.

Penutup

Dalam budaya Jawa *pawon* atau dapur selain berfungsi untuk tempat menyelenggarakan makan minum bagi keluarga juga berfungsi sebagai arena untuk mempererat hubungan keluarga, dan tempat pertemuan bagi tetangga

Ciri-ciri *pawon* atau dapur tradisional adalah pemakaian tungku tradisional dan menggunakan bahan bakar kayu, serta peralatan memasak dari tanah liat atau gerabah, dari anyaman bambu, dan kayu.

Pembuangan limbah dapur, dan sampah di sekitar lingkungan rumah pada umumnya dialirkan begitu saja atau dibuatkan lubang

pembuangan, dan sebagainya, ternyata ada yang bersifat daur ulang, dan tersembunyi kearifan-kearifan di dalam memanfaatkan limbah dapur dan sampah di lingkungannya.

Pawon atau dapur beserta peralatan-nya mewarnai dalam tatacara kehidupan sehari-hari, yang tercermin dari ungkapan-ungkapan yang terkait dengan dapur dan isinya.

Oleh berjalannya waktu, serta berkembangnya teknologi, *pawon* atau dapur mungkin akan mengalami perubahan fisik maupun isinya seperti di kota. Dengan demikian pengertian *pawon*, arti dan fungsinya juga akan mengalami pergeseran. Bila itu terjadi maka fungsi dan makna filosofi *pawon* akan lepas dari tata kehidupan orang Jawa.

Daftar Pustaka

Dalil Prawirodihardjo, tt. *Paribasan*. Yogyakarta: Spring.

Djoko Suryo, 1985. *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya*. Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi).

Koentjaraningrat, 1981. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat

Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: P.N Balai Pustaka.

Parsudi Suparlan, 1986. "Kebudayaan dan Tata Ruang: Struktur Kehidupan Manusia, Tradisi, dan Perubahan". *Seminar Arsitektur Tradisional di Surabaya*. Jakarta: Proyek IDKD.

Soepanto, 1977. "Peranan *Ngantenan* Dalam Upacara *Wiwit* di Kalangan Masyarakat Petani Jawa" *Bunga Rampai Adat Istiadat*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.

Sutarto Hardjowahono, R.M. 1953. *Pakubuwono IV Wulangreh Winardi*. Surakarta.

NILAI-NILAI KESATUAN DALAM KERAGAMAN SUKUBANGSA

Tashadi

Abstrak

Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun masih bersifat terbatas pada daerah masing-masing. Pada dasawarsa ke-2 abad 20, rasa kedaerahan mulai memudar digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Sebagai puncak keinginan pemuda untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Sumpah Pemuda yang diputuskan dalam Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, mempunyai arti yang penting dalam perkembangan bangsa Indonesia. Semangat persatuan yang dikumandangkan bersama berhasil mengatasi prasangka suku, golongan, dan budaya. Sumpah Pemuda menjiwai perjuangan nasional selanjutnya dan kehidupan bangsa Indonesia sesudah mencapai kemerdekaan.

Nilai-nilai budaya tentang persatuan dan kesatuan sebenarnya telah dimiliki dan dijunjung tinggi oleh masing-masing sukubangsa di Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain: 1) Nilai yang terkait pada ajaran desa mawa cara negara mawa tata; 2) Nilai yang terkait pada ajaran kiwa tengen mula matunggalan; 3) Nilai toleransi; 4) Nilai menjunjung tinggi masyarakat dan kegotongroyongan; 5) Nilai kesetiakawanan dan 6) nilai tenggang rasa. Apabila nilai-nilai tersebut betul-betul bisa dilaksanakan maka kedamaian dan ketenteraman akan terwujud di Indonesia. ‘Bhinneka Tunggal Ika’ bukan hanya sebagai semboyan saja, tetapi merupakan pengikat negara Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta dihuni beratus-ratus suku bangsa.

Putusan Kongres Pemuda Pemudi Indonesia 28 Oktober 1928¹

**Pertama : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu,
Tanah Air Indonesia.**

**Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu,
Bangsa Indonesia.**

**Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan,
Bahasa Indonesia.**

(45 tahun Sumpah Pemuda, Yayasan Gedung Bersejarah Jakarta, 1974)

Latar Belakang

Kutipan Putusan Kongres Pemuda Pemudi Indonesian pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut di atas, pada hakekatnya merupakan pernyataan integrasi bangsa yang dilakukan oleh berbagai organisasi pemuda pada masa lalu. Adapun organisasi pemuda

¹ Sudiro, *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Penerbit Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, 1974, hal. 69

tersebut yakni Jong Java, Jong Sumatranen Bond (Pemuda Sumatera), Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond (Pemuda Islam), Jong Celebes, Jong Batak, Pemuda Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia.²

Keputusan Kongres Pemuda Tahun 1928 tersebut merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dan telah mengajarkan pada kita, bahwa mendahulukan kesukuan dan kedaerahan dari pada kepentingan nasional dan persatuan adalah suatu tindakan yang sia-sia. Terbukti bahwa dalam berbagai perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita secara kedaerahan tanpa persatuan senantiasa gagal dan mendatangkan kesengsaraan. Sehingga kita dijajah oleh bangsa Belanda, Portugal, Inggris dan bangsa Jepang. Sungguh suatu penderitaan yang sangat pahit dan menyedihkan.

Oleh karena itu 'ikrar' atau 'Sumpah Pemuda' yang diputuskan dalam Kongres Pemuda, 28 Oktober 1928 oleh organisasi-organisasi pemuda adalah sangat tepat dan strategis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Akhirnya dengan mengkristalnya persatuan dan kesatuan bangsa, kemerdekaan dapat direbut dari penjajah Jepang dan berkumandangnya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno - Hatta.

Sementara itu dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa pembukaan Undang Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa negara telah menghindari segala paham golongan dan menghindari segala paham perseorangan yang dapat memecah belah negara. Prinsip

persatuan adalah di atas segalanya. Kondisi ini adalah merupakan suatu nilai dasar yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia sejak dari awal. Kebangsaan yang kita bangun tidak tegak di atas landasan dan kepentingan suku bangsa, agama, ras, dan ikatan-ikatan primordial, melainkan persatuan nasional itu kita bangun dan tegakkan justru di atas landasan sukubangsa berangkat dari kesadaran untuk memperbaiki nasib sebagai satu bangsa.

Selanjutnya kedudukan Warga Negara Indonesia telah diatur sesuai hak dan kewajiban yang tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 seperti Pasal 27, Ayat 1 yang berbunyi: 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya'³ Di samping itu hak warga negara dalam mendapat pekerjaan telah dijelaskan dengan tegas tanpa membedakan dari golongan mana, seperti tercantum dalam pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi: 'Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak'. Sedangkan hak memeluk agama sesuai keyakinan tercantum dalam Pasal 29, Ayat 2, dan hak memperoleh pendidikan tercantum dalam Pasal 31, Ayat 2.

Dari kenyataan tersebut, jelaslah bahwa negara sama sekali tidak membedakan antara satu warga dengan warga lainnya. Semua warga negara mempunyai hak yang sama. Akan tetapi di samping hak tersebut tentunya kita mempunyai tanggung jawab terhadap kewajiban, yaitu untuk mempertahankan negara seperti tercantum pada UUD 1945 Pasal 30, Ayat 1. Pembelaan di sini bukan berarti dalam pengertian sempit hanya semata-mata terhadap serangan musuh, tetapi dalam pengertian yang lebih luas yaitu memelihara negara dengan menjaga keserasian dan keselarasan hidup di masyarakat dengan aneka ragam suku bangsa, agama, ras dan budaya.

² *Ibid.*

³ *UUD Tahun 1945.*

Keragaman Etnik

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki letak strategis karena berada di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan dua samudera yakni Samudera Hindia (Indonesia) dan Samudra Pasifik. Kondisi letak demikian sangat menguntungkan di samping juga banyak menyimpan potensi yang dapat dieksploitir untuk mengancam persatuan dan kesatuan. Potensi itu antara lain adalah faktor geografi, heterogenitas suku bangsa, agama dan kultur, kesenjangan ekonomi dan sosial yang relatif lebar serta pertikaian politik ideologis.

Potensi geografis yang kaya raya, terdiri atas ribuan pulau-pulau besar dan kecil (16.000 pulau) yang membujur dari barat ke timur; dari Sabang sampai Merauke dengan kekayaan alamnya yang melimpah, indah dan subur. Jumlah Suku bangsa di Indonesia adalah 485⁴ dan berdasarkan propinsi, tercatat: 1. Propinsi Bali 4 sukubangsa; 2. Propinsi Bengkulu 9 sukubangsa; 3. Propinsi D.I. Aceh 11 sukubangsa; 4. Propinsi D.I. Yogyakarta 1 sukubangsa; 5. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1 sukubangsa; 6 Propinsi Irian Jaya⁵ 116 sukubangsa; 7. Propinsi Jambi 6 sukubangsa; 8. Propinsi Jawa Barat 5⁶ sukubangsa; 9. Propinsi Jawa Tengah 5 sukubangsa; 10. Propinsi Jawa Timur 6 sukubangsa; 11. Propinsi Kalimantan Barat 71 sukubangsa; 12. Propinsi Kalimantan Selatan 10 sukubangsa; 13. Propinsi Kalimantan Tengah 10 sukubangsa; 14. Propinsi Kalimantan Timur 29 sukubangsa; 15. Propinsi Lampung 10 sukubangsa; 16. Propinsi Nusa Tenggara Barat 9 sukubangsa; 17. Propinsi Maluku⁷ 43 sukubangsa; 18. Propinsi Nusa Tenggara Timur 46 sukubangsa; 19. Propinsi Riau⁸ 9 sukubangsa; 20. Propinsi Sulawesi Selatan

13 sukubangsa; 21. Propinsi Sulawesi Tengah 13 sukubangsa; 22. Propinsi Sulawesi Utara⁹ 20 sukubangsa; 23. Propinsi Sumatera Barat 2 sukubangsa; 24. Propinsi Sumatera Selatan 29 suku bangsa; 25. Propinsi Sumatera Utara 4 sukubangsa. Sedangkan Propinsi Sulawesi Tenggara tidak/belum terdata. Masing-masing sukubangsa tersebut memiliki adat istiadat dan budaya, serta cara hidup yang berbeda. Dengan adat istiadat dan budaya tersebut mereka hidup dengan ciri khasnya masing-masing. Mereka menata hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Berbagai ragam seni muncul sesuai dengan ciri khas lingkungan masing-masing yang memberikan warna kehidupan masyarakat Indonesia. Belum lagi adanya perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing sukubangsa menambah beragamnya kehidupan di Indonesia. Adanya tingkat perkembangan masing-masing suku yang berbeda, menyebabkan ada sukubangsa yang telah berada di kota-kota besar dan kota metropolitan. Hal ini merupakan sebuah kenyataan akan beragamnya kehidupan sukubangsa negara kita Indonesia. Penggambaran ini kemudian tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia yakni 'Bhinneka Tunggal Ika'. Semboyan ini adalah sangat tepat dan merupakan tali pengikat agar masing-masing warga atau sukubangsa atau golongan tidak melihat dari sudut pandang sukubangsanya, golongannya ataupun daerahnya sendiri, akan tetapi hendaknya mampu melihat dengan pandangan yang lebih luas, yaitu lingkungan nasional atau bangsa sehingga persatuan dan kesatuan bangsa terus tercipta.

Kebhinnekaan yang ada di Indonesia tidak hanya yang menyangkut masyarakatnya. Namun dari segi daerah pun terdapat

⁴ M. Yunus Melalatoa. Ensiklopedi Sukubangsa, dua jilid (Jakarta: Penerbit Depdikbud, 1995)

⁵ Sekarang bernama Propinsi Papua dan dibagi menjadi tiga propinsi yakni Papua Barat, Tengah dan Timur.

⁶ Sekarang terjadi pemekaran dan lahir Propinsi Banten.

⁷ Sekarang terjadi pemekaran dan lahir Propinsi Maluku Utara.

⁸ Sekarang terjadi pemekaran dan lahir Propinsi Bangka Belitung

⁹ Sekarang terjadi pemekaran dan lahir Propinsi Gorontalo

suatu perbedaan yang sangat berarti yakni antara kondisi daerah Indonesia bagian timur dan bagian barat. Untuk Indonesia bagian timur tanahnya berawa dan kurang subur. Sedangkan untuk Indonesia bagian barat keadaan tanahnya relatif subur dengan tanah humus yang tebal. Hal ini mengharuskan persatuan dan kesatuan bangsa tetap terus menerus dibina agar dapat saling mengisi sehingga pemerataan hasil pembangunan di Indonesia dapat diwujudkan. Dengan latar belakang tersebut, maka memancing timbulnya berbagai kerawanan dan permasalahan yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu dalam naskah ini akan disajikan berbagai contoh permasalahan yang sering menghambat integrasi nasional yang disebabkan ketertutupan sukubangsa baik lokasi, politik maupun kurangnya pergaulan antar sukubangsa:

1. Adanya perbedaan persepsi yang disebabkan perbedaan suku bangsa.
Dalam pergaulan antar sukubangsa di Indonesia, kita masih sering memakai sudut pandang *stereotype* sukubangsa yang sebenarnya merupakan produk penjajah, guna memecah belah bangsa kita. Penilaian subyektif antara warga satu sukubangsa terhadap sukubangsa yang lain, misalnya orang Batak kasar, orang Madura suka berkelahi, orang Jawa itu lamban, ternyata masih sering mengemuka dalam pergaulan antar suku bangsa. Sehingga berbagai pemikiran subyektif tersebut akan sangat menghambat persatuan, kesatuan dan integrasi bangsa.
2. Perbedaan persepsi yang disebabkan perbedaan ekonomi.
Perbedaan ini biasanya akan sangat tajam antara sukubangsa asli dan golongan suku bangsa keturunan seperti Cina, Arab dan lain-lain. Pada umumnya golongan sukubangsa keturunan terutama sukubangsa Cina yang tinggal di kota-kota besar adalah orang-orang yang

sukses dalam dunia bisnis. Kesuksesan tersebut menyebabkan timbulnya suatu kesenjangan yang tajam dengan penduduk asli. Lebih menyakitkan apabila warga sukubangsa Cina atau suku bangsa keturunan yang sukses dalam ekonomi sangat egois, sombong dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Akibatnya akan terjadi kecemburuan sosial, perbuatan anarki dan sebagainya terhadap suku bangsa keturunan.

3. Perbedaan persepsi yang disebabkan perbedaan agama.
Indonesia secara resmi mengakui keberadaan dan kehidupan agama-agama resmi, dan hak kemerdekaan memeluk agama sesuai keyakinannya telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29, Ayat 2. Namun bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia hubungan antar umat beragama sering menyulut timbulnya konflik. Timbulnya istilah seperti Kristenisasi dan Islamisasi, misalnya mewujudkan adanya kecurigaan antara umat beragama. Akibatnya hubungan antar umat beragama cenderung tidak harmonis bahkan kadang-kadang dapat terjadi tindakan-tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum dan Pancasila, seperti pengrusakan rumah ibadah agama lain, peculikan atau pembunuhan terhadap penganut agama lain, perbuatan anarkisme, dan isu-isu yang mendiskreditkan penganut agama lain dan seterusnya.
4. Adanya perbedaan persepsi yang disebabkan letak geografis.
Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan kekayaannya yang melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke, dalam kenyataannya sering terjadi konflik. Hal ini disebabkan kesuburan tanah antara daerah satu dengan lainnya berbeda, seperti tanah di Indonesia bagian timur keadaannya

relatif tidak subur, dan bahkan ada yang berawa-rawa, misalnya di Irian Jaya (sekarang Papua). Sedangkan keadaan tanah di Indonesia bagian barat mempunyai potensi yang lebih baik dan subur. Keadaan yang demikian itu akan menimbulkan kesulitan dalam pembangunan. Sehingga pembangunan di Indonesia bagian barat akan relatif mudah dan lebih murah, sedangkan di Indonesia bagian timur relatif lebih sulit dan lebih mahal. Akibatnya pembangunan di Indonesia bagian timur belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kenyataan yang demikian ini telah menimbulkan kesenjangan di antara penduduk di dua daerah tersebut. Kesenjangan ini makin bertambah tajam dengan adanya anggapan dan persepsi yang salah seperti pembangunan hanya diprioritaskan di Jawa. Keadaan ini akhirnya akan dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa serta pelaksanaan integrasi nasional.

Segala permasalahan yang terkait dengan kebhinekaan atau keragaman suku bangsa tersebut di samping mempunyai potensi-potensi yang negatif, juga mengandung potensi-potensi yang positif. Oleh karena itu masing-masing sukubangsa yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia akan berusaha menyadari dan memahami latar belakang timbulnya konflik-konflik tersebut. Selanjutnya kita tidak boleh terlena dalam masalah-masalah yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu perlu kita perhatikan dan kita lihat berbagai hal yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan serta integrasi bangsa.

Nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan

Nilai-nilai budaya asli tentang persatuan dan kesatuan sebenarnya telah dimiliki dan dijunjung tinggi oleh masing-masing suku

bangsa di Indonesia. Kondisi seperti ini dibuktikan dengan keadaan yang damai, tenteram dan hubungan yang harmonis di antara sukubangsa pada masa lalu. Keadaan baru berubah, ketika penjajah datang di bumi nusantara ini. Nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan cenderung dikaburkan agar bangsa Indonesia terpecah belah, lemah dan mudah dijajah. Politik yang sangat terkenal yang digunakan penjajah adalah '*Politik De Vide et Impera*'¹⁰. Akibatnya berbagai ajaran yang mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh sukubangsa yang ada di Indonesia merupakan barang langka dan kurang dikenal oleh generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu nilai-nilai persatuan dan kesatuan perlu terus digali, dikembangkan, dan disosialisasikan agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Adapun nilai-nilai itu antara lain:

1. *Nilai yang terkait pada ajaran 'Desa mawa cara negara mawa tata'.*¹¹

Ajaran ini terdapat pada sukubangsa Jawa yang mengandung petunjuk bagi kearifan pola hubungan antara suku bangsa maupun antar wilayah atau negara, dengan kesadaran bahwa orang dari daerah masing-masing mempunyai adat kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda. Kesadaran akan adanya nilai yang berbeda tersebut menyebabkan setiap orang Jawa telah mempunyai pedoman dalam berinteraksi dengan orang di luar sukubangsa untuk tidak saling menyinggung perasaan atau saling menyakiti. Oleh sebab itu hubungan dibuat agar harmonis dengan melalui *unggah-ungguh* atau *subasita* atau tata krama dalam berhadapan dengan orang lain baik sesama sukubangsa, maupun antara atasan dengan bawahan atau orang tua dengan yang lebih muda. Semua itu diarahkan pada suasana

¹⁰ Politik pecah belah atau politik adu domba.

¹¹ N.N. *Mengungkap Budaya Kerja Bangsa Kita*. Jakarta: Depdikbud, 1994/1995

- selaras dan serasi yang digambarkan pada semboyan ‘*Leladi sesameng dumadi memayu hayuning sesami*’ yang berarti mengabdikan diri kepada masyarakat guna mencapai kebahagiaan sesama hidup.
2. *Pada suku bangsa Bali terdapat sebuah ungkapan yang mengandung nilai persatuan yakni ‘kiwa tengen mula matunggalan’ (kiri kanan memang bersatu)*¹². ‘Kiwa’ diikatkan dengan golongan lemah, dan dimaksudkan kaum wanita sedangkan kata ‘tengen’ adalah golongan kuat, maksudnya adalah kaum pria. Oleh karena itu untuk mencapai suatu hasil yang baik atau yang dicita-citakan maka kaum yang lemah dan kuat harus dipersatukan atau yang dicita-citakan maka kaum yang lemah dan kuat harus dipersatukan atau dapat bekerjasama. Dalam ungkapan tersebut terkandung nilai pentingnya persatuan antar kelompok mayoritas dan minoritas atau antar kelompok lemah dan kelompok kuat, meliputi antar sukubangsa, antar agama, kaya dan miskin dan lain sebagainya, agar dapat mencapai suatu kondisi yang ideal dalam masyarakat. Adanya nilai-nilai persatuan ini juga didasari akan pengetahuan bahwa setiap daerah itu mempunyai adat istiadat sendiri. Hal ini terdapat dalam ungkapan yakni ‘*len tongosno len suksesmanne*’. Maksudnya adanya pengakuan terhadap budaya orang lain, sehingga menyebabkan masyarakat Bali cepat beradaptasi dengan orang lain, yang tidak satu suku ataupun satu paham demi integrasinya hubungan yang baik. Bervariasinya segala kekuatan yang ada didasari bahwa bila dipersatukan akan mendapatkan kekuatan yang tinggi guna pembangunan bangsa.
 3. *Nilai menjunjung persatuan dengan mengembangkan sikap toleransi.* Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak sukubangsa, dapat bersatu dalam satu wadah kesatuan berbangsa dan bernegara. Ini adalah berkat sikap dari masyarakat bangsa Indonesia sendiri yang menjunjung persatuan dan kesatuan. Kendatipun mereka berasal dari latar belakang sukubangsa yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat untuk bersatu membentuk bangsa yang besar yakni bangsa Indonesia. Keadaan ini menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan citra pada perwujudan kebudayaan Indonesia dengan budaya persatuannya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini ditunjang dengan mengembangkan sikap toleransi. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah yakni dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang mengikrarkan *Satu Nusa, Satu Bangsa dan satu Bahasa, yaitu Indonesia*.
 4. *Nilai menjunjung tinggi masyarakat dan kegotongroyongan.* Perbedaan-perbedaan pendapat adalah biasa, akan tetapi perbedaan pendapat itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dicapai suatu kesepakatan. Itulah arti musyawarah yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam menghadapi masalah-masalah yang menyangkut kehidupan bersama, kita senantiasa menyelesaikan secara bersama-sama pula. Hal ini tercermin dalam ungkapan yang berbunyi ‘*berat sama dipikul ringan sama dijinjing*’. Ungkapam ini mencerminkan nilai-nilai kegotong-

¹² Sigit Widiyanto, Anto Akhadiyat, *Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh*. Jakarta: Depdikbud, 1994/1995.

royongan bangsa kita yang menjiwai persatuan dan kesatuan. Gotong royong dan musyawarah tidak mengenal keistimewaan atau pengecualian bagi orang besar, orang berpangkat maupun orang kaya.

5. *Nilai kesetiakawanan.*

Kesetiakawanan merupakan modal dasar dalam persatuan dan kesatuan. Kesetiakawanan yang dimaksud adalah kesetiakawanan antar sukubangsa, antar agama maupun antar kelompok atau golongan. Bagi masyarakat yang hidup dengan beraneka ragam sukubangsa, dan agama tindakan kesetiakawanan merupakan kunci bagi selaras dan serasinya hubungan. Kesetiakawanan perlu ditegakkan dalam rangka mewujudkan integrasi nasional. Untuk mencapai integrasi nasional kita harus mampu melepaskan diri dari kepentingan sukubangsa, agama, dan kelompok. Semboyan '*sepi ing pamrih rame ing gawe*' yang berarti suka menolong dengan tidak menuntut balas harus kita laksanakan pada seluruh warga masyarakat di sekitar kita.

6. *Nilai tenggang rasa.*

Nilai tenggang rasa yang dimaksud adalah sikap menempatkan diri pada lingkungan sosial dan kesatuan sosial. Sikap ini sangat berguna pada masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Sikap tenggang rasa sangat diperlukan dalam kehidupan di masyarakat, karena adanya berbagai agama, sukubangsa dan latar belakang budaya di Indonesia. Dengan sikap tenggang rasa tersebut segala kehidupan bermasyarakat dijamin dapat selaras dan serasi. Perwujudan sikap tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat dengan budaya yang beragam akan sangat membentuk keharmonisan. Perwujudan sikap tenggang rasa tersebut seperti

menahan diri, menghormati pendapat orang lain dan sebagainya. Dengan kata lain segala tindakan kita harus berorientasi pada orang di sekitar kita dan tidak mementingkan diri kita sendiri. Dalam ungkapan Jawa yang berbunyi '*aja njiwit nek ora gelem dijiwit*' yang berarti jangan mencubit kalau tidak ingin dicubit. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah menjaga keselarasan sosial dengan tidak mendahului membuat keributan dengan orang di sekitar kita. Nilai tenggang rasa ini merupakan sarana bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta integrasi nasional.

Kesimpulan

Negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan dihuni beratus-ratus sukubangsa diikat oleh satu semboyan yang mampu mempersatukan bangsa. Semboyan itu tidak lain adalah '**BHINNEKA TUNGGAL IKA**'. Memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan integrasi nasional merupakan agenda yang tidak kunjung usai, dalam bentangan waktu yang panjang. Komitmen dan perjuangan untuk membangun Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi tugas generasi sekarang, tetapi jauh hari telah dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu, dan selanjutnya menjadi tugas generasi-generasi yang akan datang.

Kita percaya bahwa tiada hasil karya dan warisan nilai yang lebih indah dan membahagiakan jika kelak di kemudian hari Indonesia benar-benar menjadi bangsa dan negara yang besar dan maju, di atas lahan nilai dan jati diri kebangsaannya. Marilah kita semua menjadi bagian dan upaya besar bangsa Indonesia untuk membangun keutuhan negerinya, melawan berbagai kekuatan yang hendak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang

didambakan bersama. Akhirnya dalam kesempatan ini pula akan kami kutibkan pemikiran Jenderal Wiranto¹³ tentang '*lima langkah strategis*' yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, sebagai berikut:

Pertama : Membangun dan menghidupkan terus komitmen dan kehendak untuk bersatu. Upaya ini antara lain bisa diintensifkan melalui jalur-jalur pendidikan dan forum-forum sosialisasi.

Kedua : Menciptakan mekanisme penyelesaian konflik dan membangun berbagai kesepakatan nilai yang akan memudahkan pencapaian konsensus. Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga merupakan napas demokrasi.

Ketiga : Membangun kelembagaan (*pranata*) yang berakarkan pada

nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa secara struktural dan kultural.

Keempat : Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkrit, tegas dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang menjamin terwujudnya keadilan bagi semua wilayah dan kelompok-kelompok masyarakat.

Kelima : Pengembangan karakter dan perilaku kepemimpinan pada semua level interaksi dan bidang kehidupan yang mengedepankan kearifan, keterbukaan, sensitif terhadap aspirasi masyarakat dan responsif terhadap segala permasalahan yang dihadapi.

Semoga dengan dilandasi persatuan dan kesatuan yang kokoh, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap jaya, eksis dan lestari sepanjang masa. Amin.

Daftar Pustaka

Jenderal Wiranto. 1999. Memantapkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Era Reformasi dalam *Makalah Sarasehan Kebudayaan Taman Siswa XI*.

N.N.,1994/1995. *Mengungkap Budaya Kerja Bangsa Kita*. Jakarta: Depdikbud.

Sigit Widiyanto, Anto Akhadiyat.1994/1995. *Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh*. Jakarta: Depdikbud.

Sudiro, 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Penerbit Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah.

Undang-Undang Dasar 1945.

Yunus Melalatoa, M. 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa*, dua jilid. Jakarta: Depdikbud.

¹³ Jenderal Wiranto. Memantapkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Era Reformasi dalam *Makalah Sarasehan Kebudayaan Taman Siswa XI* , Tahun 1999.

SEJARAH OeANG REPOEBLIK INDONESIA

Dwi Ratna Nurhajarini

Abstrak

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang cukup parah. Jumlah uang Jepang yang beredar di masyarakat sangat banyak, ditambah lagi dengan uang NICA. Untuk mengatasi masalah inflasi dan juga untuk melengkapi atribut negara yang merdeka, Indonesia pada tahun 1946 tanggal 30 Oktober mengeluarkan uang sendiri yakni Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Sejak tanggal itu pula ORI dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan dasar hukum Undang Undang No. 17 Tahun 1946 dan Undang Undang No. 19 tahun 1946. secara politis keluarnya ORI adalah merupakan tanda kemerdekaan dan secara ekonomis sebagai usaha pemerintah untuk menyetatkan perekonomian negara.

Beredar sekitar 4 tahun saja karena keberadaan ORI berakhir tatkala pemerintah RIS mengeluarkan mata uang yang baru.

Pengantar

Sudah sejak lama uang dikenal orang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang mempunyai arti penting dalam setiap roda perekonomian suatu bangsa. Rasanya tidak mungkin membicarakan perkembangan perekonomian suatu negara tanpa memasukkan kata atau besaran uang. Walaupun dalam kenyataannya sampai saat ini barter dan media lain juga digunakan sebagai media transaksi atau sebagai substitusi uang. Berbicara mengenai definisi uang, ternyata sampai saat ini definisi yang paling banyak diterima adalah uang berdasarkan fungsinya yakni sebagai alat pembayaran. Jika kita mendasarkan fungsi uang sebagai alat bayar, kenyataannya sampai saat ini banyak sekali media yang dapat digunakan sebagai alat bayar, antara lain kartu kredit, rekening giro, cek, transfer dana dengan alat elektronik dan lainnya, yang semuanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, sejarah uang mempunyai kaitan yang erat dengan sejarah suatu bangsa, termasuk sejarah uang Republik Indonesia dan bangsa Indonesia.

Diawali dengan barang-barang yang digunakan sebagai alat tukar (untuk barter) sampai digunakannya lembaran, kepingan ataupun alat elektronik yang berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat pembayaran. Mengingat panjangnya rentang sejarah uang di Indonesia, salah satu fenomena menarik tentang uang adalah saat Indonesia mampu mengeluarkan mata uang sendiri yakni Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada bulan Oktober tahun 1946.

Mata Uang Pada Awal Kemerdekaan

Pada hari-hari pertama sesudah proklamasi, ekonomi Indonesia sangat kacau. Inflasi yang cukup tinggi menimpa republik yang baru berdiri. Mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sangat banyak, diperkirakan mata uang pendudukan Jepang yang beredar mencapai lebih dari 4 milyar rupiah.¹ Sampai bulan Agustus 1945 diduga di Pulau Jawa saja beredar sekitar 1,6 milyar rupiah. Jumlah itu makin bertambah setelah pasukan Sekutu menduduki beberapa kota besar dan menguasai bank-bank. Dari bank-

¹ *Intisari*. No. 210, 9 Januari 1981, hal. 8

bank dikeluarkan lagi uang cadangan sebanyak 2,3 milyar untuk biaya operasional dan membayar pegawai. Kas pemerintah RI boleh dikatakan kosong sedang penerimaan dari pajak dan bea lain masih belum berjalan. Sebaliknya pengeluaran semakin bertambah.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia beredar beberapa jenis mata uang, yakni:

1. Mata uang pemerintah Hindia Belanda
2. Mata uang *De Javasche Bank*
3. Mata uang Pendudukan Jepang.

Mata uang Pendudukan Jepang, ada tiga macam, yakni:

Pertama mata uang yang sudah dipersiapkan sebelum menguasai Indonesia. Uang ini menggunakan Bahasa Belanda, *De Japansche Regeering*, dengan satuan Gulden, emisi tahun 1942 berkode "S".² Kedua, yang menggunakan bahasa Indonesia, *Pemerintah Dai Nippon*, emisi tahun 1943 dengan satuan rupiah, dalam pecahan bernilai 100 rupiah, bergambar pohon palem dan disebaliknya gambar petani dua ekor kerbau. Ketiga menggunakan Bahasa Jepang, *Dai Nippon Teikoku Seibu*, emisi tahun 1943, satuannya pun menggunakan rupiah. Seri yang keluar kebanyakan bergambar lingkungan alam di Indonesia dan juga budaya Indonesia, seperti pada pecahan 5 rupiah bergambar rumah adat Minangkabau yakni *Rumah Gadang* dan disebaliknya bergambar *Wanita Minang* yang memakai baju adat daerahnya. Juga pada pecahan 100 rupiah bergambar tokoh wayang orang Arjuna dan ukiran Bali di gambar sebaliknya, sedang tokoh Gatutkaca tertera pada pecahan 5 rupiah dengan gambar stupa dan Budha di sisi satunya.³

Dengan masuknya tentara Sekutu dalam rangka melucuti balatentara Jepang, pada tanggal 6 Maret 1946, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, panglima AFNEI (*Allied Forces in Netherlands Indie*) menyatakan berlakunya Uang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Uang yang bergambar Ratu Wilhelmina tersebut dipakai sebagai alat pembayaran yang sah bagi semua pihak (Indonesia, Belanda, dan juga Sekutu). keluarnya mata uang ini cukup menyulitkan perekonomian Indonesia saat itu. Akibatnya adalah naiknya harga barang-barang sehingga semakin meningkatkan terjadinya inflasi di Indonesia. Kurs penukaran ditetapkan 3%, artinya setiap rupiah Jepang dapat ditukar dengan 3 sen uang Nica.⁴

Sutan Sahrir selaku perdana menteri, memprotes tindakan Sekutu, karena pengeluaran uang tersebut berarti melanggar hak kedaulatan RI, dan juga melanggar persetujuan yang telah disepakati. Persetujuan tersebut adalah selama situasi politik belum mantap, tidak akan dikeluarkan mata uang baru untuk menghindarkan kekacauan di bidang ekonomi dan keuangan. Pemerintah menganjurkan pada seluruh rakyatnya agar menolak uang NICA sebagai alat pembayaran.

Persiapan Menjelang Keluarnya ORI

Perjuangan bangsa Indonesia pada masa perang kemerdekaan tidak saja membutuhkan tenaga, taktik dan strategi perjuangan, melainkan juga membutuhkan dana untuk mendukung perjuangan itu. Oleh karena itu, uang menjadi salah satu kunci dalam perjuangan.

² Uang pendudukan Jepang di Semenanjung Malaya berkode "M" dengan satuan *dollar*; di Pilipina berkode "P" dengan satuan *pesos*; di Birma atau Myanmar berkode "B" dengan satuan *rupee*, dan di Oceania berkode "O" dengan satuan *sbilling*. Semua bentuk dan ukurannya relatif sama.

³ Wiratsongko (ed). *Bank Notes and Coins From Indonesia*. Jakarta: Perum Peruri dan Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949, 1991. hal. 2 dan 254 - 260

⁴ *Intisari*, No. 210, 9 Januari 1981, hal. 6

Pemerintah Indonesia mulai merintis dan menjajaki kemungkinan untuk membuat uang sendiri dengan membentuk sebuah tim yang bertugas mencari dan meninjau beberapa percetakan yang paling memadai untuk mencetak uang. Tim terdiri atas beberapa pegawai dari percetakan *G. Kolf & Co* Jakarta dan wakil dari percetakan di Surabaya.

Pada tanggal 7 November 1945 dengan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 3/RD, dibentuk “Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia”. Tim itu diketuai oleh TRB Sabarudin, adapun anggotanya adalah H.A. Pandelaki (Kementerian Keuangan), M. Tabrani (Kementerian Penerangan), S. Soegiono, E. Kusnadi (Kas Negara), S.E. Oesman dan Aoes Soeriatna (keduanya dari Serikat Buruh Percetakan *G. Kolf & Co*).⁵ Panitia itu bertugas menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan percetakan uang. Selain itu dibentuk pula sebuah panitia yang bertugas untuk mempertimbangkan cara-cara menerima, menyimpan dan mengedarkan uang. Panitia itu dipimpin oleh Enang Kusnadi dari Kas Negara Jakarta.

Berdasarkan hasil temuan tim yang pertama, maka percetakan uang akan dilaksanakan di Surabaya. Namun belum sempat dimulai, di Surabaya terjadi pertempuran yang cukup hebat (kemudian terkenal dengan sebutan pertempuran 10 November 1945). Tempat percetakan akhirnya dipindahkan ke Jakarta. Di samping mempersiapkan tempat untuk mencetak uang yang juga dikerjakan oleh panitia itu adalah membuat klise uang dan juga membuat desain uang. Para pelukis yang membuat desain uang ORI yang pertama, sempat dikarantina di gedung keuangan Lapangan

Banteng selama 3 bulan.⁶ Uang yang dipersiapkan untuk dicetak bernilai 100 rupiah, 10 rupiah, 5 rupiah, 0,5 rupiah, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen.

Ketika panitia penyelenggara pencetakan uang republik mulai bekerja, muncul permasalahan baru yakni tentang jaminan uang yang akan diedarkan. Pada umumnya pengeluaran uang memakai jaminan emas atau barang berharga lainnya, sedangkan bank di Indonesia belum sangat memenuhi syarat-syarat tersebut. Hal itu disebabkan modal yang belum tersedia, situasi negara yang masih dalam kondisi kacau karena peperangan, dan juga kurangnya tenaga ahli dalam bidang perbankan. Menghadapi permasalahan itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyatakan bahwa uang baru yang akan diedarkan tidak perlu dikeluarkan oleh bank tetapi oleh pemerintah. Dasar terpenting dalam peredaran uang adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Dengan kata lain, ORI adalah uang kertas pemerintah bukan uang kertas bank. Selain itu juga tidak didasarkan pada emas atau *a-metalisme*.

Menjelang akhir Desember 1945 segala sesuatu yang berkaitan dengan percetakan uang terpaksa dihentikan karena situasi Jakarta yang mulai panas. Ketika pemerintahan berpindah ke Yogyakarta, beberapa ratus rim uang kertas pecahan 100 rupiah yang belum diberi seri ikut pula dan beberapa karyawan yang menanganinya pindah juga ke Yogyakarta. Percetakan kemudian dilanjutkan di Yogyakarta, Solo dan Malang. Di Yogyakarta, percetakan uang dilanjutkan di Percetakan Yaker (Jalan Loji Kecil sekarang jalan Suryotomo) dan di percetakan Kanisius (Jalan Secodiningratan sekarang Jalan Senopati). Kemudian saat Yogyakarta kembali diduduki Belanda pada

⁵ Wiratsongko, *Ibid.* hal. 4

⁶ Wawancara dengan Surono tahun 1996

⁷ Dwi Ratna Nurhajarin. *Oeang Repoebliek Indonesia Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946 – 1950*. Yogyakarta: BKSNT, Depdikbud, 1999, hal. 38-42

tahun 1948 – 1949, percetakan ORI dilakukan di daerah pengungsian, yakni di daerah Selopamioro, Imogiri, Bantul.⁷

Persiapan lain dalam rangka penyehatan keuangan nasional juga dilakukan, yakni dengan Pinjaman Nasional yang berlangsung dari tanggal 15 Mei – 15 Juni 1946. Pinjaman nasional mempunyai dua arti penting, pertama untuk menarik sebagian uang pendudukan Jepang yang ada di masyarakat dan kedua untuk membuktikan pada dunia luar bahwa pemerintah Indonesia dipercaya dan didukung oleh rakyatnya.⁸

Usaha menyehatkan keuangan setelah diadakan pinjaman nasional kemudian diikuti oleh kegiatan yang lebih tegas, yakni “kewajiban menyimpan uang dalam bank”. Tindakan ini sebagai persiapan langsung dari pengeluaran uang republik. Kegiatan ini dilakukan beberapa kali, sampai beberapa hari menjelang keluarnya uang republik. Dan sampai batas akhir kewajiban menyimpan uang dalam bank, setiap orang hanya diperbolehkan memiliki uang tunai sebesar 50 rupiah uang Jepang.

Oeang Repoeblik Indonesia

Uang adalah tanda kemerdekaan negara. Dengan ada pencetakan dan mempunyai uang sendiri merupakan tindakan politis guna memantapkan identitas bangsa dan negara. Suatu negara merdeka tidak hanya cukup dengan proklamasi, punya pemerintahan, tanah air, dan rakyat. akan tetapi, juga harus mempunyai mata uang sendiri. Pernyataan Mohammad Hatta itu kemudian menjadi dasar pemikiran bagi pencetakan uang republik.⁹

Pemerintah Indonesia baru bisa mengeluarkan mata uang sendiri pada tahun 1946 melalui Undang-Undang No. 17/1946 tanggal 1 Oktober 1946. Walaupun Undang-

Undang itu dikeluarkan tanggal 1 Oktober 1946, namun pengeluaran ORI dan juga berlakunya ORI sebagai alat pembayaran yang sah tergantung keputusan Menteri Keuangan. Lewat Surat Keputusan Menteri Keuangan No. SS/1/35 tanggal 29 Oktober 1946 pukul 24.00, ORI dinyatakan berlaku sebagai alat tukar yang sah pada tanggal 30 Oktober 1946. Pengeluaran ORI ditandai dengan pidato radio Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 29 Oktober 1946. pidato tersebut antara lain berbunyi.

“.... besok pada tanggal 30 Oktober 1946, suatu hari yang mengandoeing sedjarah bagi tanah air kita. Rakjat kita menghadapi penghidoopan baroe. Besok moelai beredar Oeang Repoeblik Indonesia sebagai satoe-satoenya alat pembajaran yang sah...”¹⁰

Penerbitan atau pengeluaran ORI dimaksudkan untuk mengganti uang Pendudukan Jepang dan uang Hindia Belanda. Dasar hukum penerbitan ORI selain Undang-Undang No. 17/ 1946 juga dipertegas dengan Undang-Undang no. 19/ 1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 19/ 1946 antara lain ditetapkan tentang nilai tukar ORI dengan uang Pendudukan Jepang dan juga dengan standar emas yang digunakan untuk penukaran dengan mata uang asing. Sepuluh rupiah ORI ditetapkan sama dengan emas murni seberat 5 gram. Penetapan itu dimaksudkan untuk memberi dasar harga yang tetap atas ORI, dan sekaligus digunakan sebagai dasar perhitungan yang pasti terhadap mata uang asing.¹¹ Terhadap uang Jepang, dasar penukaran ORI ditetapkan sebesar 50 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI, untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk wilayah Sumatra, 100 rupiah Jepang sama dengan 1 rupiah ORI.

⁸ *Revue Indonesia*, No. 15, 9 Mei 1996

⁹ *Kedaulatan Rakyat*, 22 Maret 1946

¹⁰ *Kedaulatan Rakyat* 30 Oktober 1946

¹¹ Biro Hukum dan Humas Depkeu dan PT. Asuransi Jasa Raharja, 1986

Perbedaan nilai tukar tersebut didasarkan atas pertimbangan dari BPKNIP yang menduga bahwa jumlah peredaran uang yang beredar di Sumatra lebih besar dibanding uang Pendudukan Jepang yang beredar di Jawa dan Madura. Di samping itu tingkat penghidupan di Sumatra juga lebih tinggi dibanding dengan di Jawa.

Undang-Undang No. 19/1946 juga memuat tentang pembagian uang sebesar 1 rupiah ORI pada setiap orang, dan ditambah 3 sen untuk tiap kepala keluarga.¹² Uang itu dimaksudkan sebagai modal untuk setiap orang. Adapun pertimbangan pemerintah mengenai jumlah uang 1 rupiah tersebut adalah dengan dasar bahwa pada saat itu setiap orang mempunyai uang tunai sebesar 50 rupiah uang Pendudukan Jepang. Pembagian itu juga dimaksudkan agar masyarakat tidak dirugikan. Sebelum tanggal 25 Oktober 1946, masyarakat tidak mengetahui akan adanya pembagian ORI sebesar 1 rupiah bagi setiap jiwa itu.

ORI sejak pertama kali diedarkan sampai ditarik lagi peredaran, telah terbit sebanyak lima kali. Emisi pertama ORI dicetak di Jakarta, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan AA Maramis. Emisi kedua sampai kelima dicetak di Yogyakarta (di percetakan Kanisius dan percetakan Yaker), dan tatkala percetakan dikuasai musuh terpaksa percetakan ORI dilanjutkan di daerah pengungsian, yakni di daerah Kajor Imogiri, Bantul. Emisi kedua ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Yogyakarta 1 Januari 1947. Mr. AA Maramis selaku Menteri Keuangan kembali membubuhkan tanda tangannya pada ORI emisi yang ketiga, Yogyakarta 26 Juli 1947. Emisi ORI yang keempat ditandatangani oleh Menteri Keuangan ad interim Mohammad Hatta, Yogyakarta 23 Agustus 1948. Dan emisi kelima ORI atau emisi terakhir ditandatangani

oleh Menteri Keuangan Lukman Harun, Yogyakarta 17 Agustus 1949.

ORI menurut rencana akan diedarkan di Jawa, Madura, dan Sumatra sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah yang dikuasai oleh republik. Akan tetapi, akibat berbagai kesulitan karena terbatasnya komunikasi dan transportasi serta adanya pertempuran di daerah, menyebabkan ORI tidak bisa diedarkan secara merata di setiap tempat. Untuk mengatasi masalah itu, di daerah-daerah yang sulit dijangkau ORI, pemerintah tetap memberlakukan mata uang yang sah sebelum ORI yakni uang Jepang, Uang Pemerintah Hindia Belanda dan Uang *De Javasche Bank* yang dicetak sebelum tahun 1942. Oleh karena itu, di daerah Sumatra tetap berlaku Uang Pendudukan Jepang. Untuk mengatasi kekurangan uang tunai di daerah-daerah, pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1947 tanggal 26 Agustus 1947. Peraturan Pemerintah itu mengatur wewenang Pemerintah Daerah untuk menerbitkan tanda pembayaran yang sah, yang berlaku di daerah setempat. Uang yang diterbitkan pemerintah daerah ini kemudian dikenal dengan nama ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah).

Pada awal peredarannya ORI mempunyai nilai yang cukup tinggi, namun hal itu tidak lama. Karena beberapa bulan setelah ORI diedarkan, harga barang-barang mulai naik. Hal itu antara lain karena barang-barang terutama barang impor tidak ada di pasaran akibat adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Di samping itu juga munculnya uang kertas palsu atau ORI palsu.¹³ Di masyarakat, ORI palsu itu diedarkan oleh NICA, agar kedudukan ORI di mata rakyat Indonesia menjadi jatuh.

ORI yang lahir ditengah berkobarnya api perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu disambut oleh rakyat Indonesia

¹² Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jogjakarta: Kempen, 1955, hal. 408

¹³ *Kedaulatan Rakyat*, 14 Februari 1947

dengan antusias. Oleh sebab itu, ketika ORI pertama kali beredar, di berbagai tempat, pembagian uang sebesar satu rupiah dilakukan dengan upacara yang khidmat. Bahkan ada juga uang republik itu yang dibungkus dengan kain merah putih dan dengan selamatan. Di pusat-pusat perjuangan, uang republik disambut oleh segenap rakyat sebagai alat tukar yang membawa pesan persatuan dan perjuangan.¹⁴

Apabila dilihat dari jumlah nilainya, pembagian ORI sebesar 1 rupiah pada setiap orang itu tidak mempunyai nilai material yang besar. Namun uang tersebut mempunyai pesan dan nilai moral yang sangat besar bagi pemerintah, hal ini dapat dijadikan simbol yang bisa memperkuat kedudukan pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sjafruddin Prawiranegara menegaskan bahwa ORI semula dimaksudkan sebagai salah satu atribut negara yang merdeka dan berdaulat, namun dalam kenyataannya ORI telah menjadi alat perjuangan revolusi. ORI menjadi alat yang mempersatukan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk berjuang menegakkan kemerdekaan. Dalam fungsinya sebagai alat mampu membiayai tegaknya kedaulatan sebuah negara, ORI dapat disamakan dengan *continental money* yang dikeluarkan oleh negara-negara koloni di Amerika Serikat dalam rangka Perang Kemerdekaan tahun 1776 – 1783.¹⁵

Dalam hal ini ORI telah membiayai kebutuhan negara yang baru berdiri. ORI telah ikut mendukung, mengatur administrasi, mengorganisir dan memperkuat tentara, memelihara keamanan dan ketertiban serta mengurus kesejahteraan rakyat dalam berperang melawan Belanda. Perjuangan

ORI melawan uang NICA tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan rakyat melawan Belanda. Walaupun urusan uang telah ada kesepakatan bersama bahwa antara kedua belah pihak tidak akan mengganggu penduduk yang menyimpan uang musuh, namun pihak Belanda melanggar kesepakatan tersebut. Daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, dipaksa untuk memakai uang NICA sebagai alat pembayaran.

Dengan beredarnya dua macam mata uang yakni ORI dan uang NICA, penduduk yang berada di daerah perbatasan maupun di daerah yang dikuasai oleh Belanda mengalami kesulitan. Kurs yang berlaku di daerah pendudukan adalah kurs pasar terbuka, artinya nilai tukar antara ORI dan uang NICA dengan cara tawar menawar mengikuti harga pasar. Nilai tukar ORI terhadap uang NICA di daerah Yogyakarta pada awal tahun 1949 sangat rendah, namun keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 mendongkrak nilai ORI, dari 130:1 menjadi 90:1. Menurut George Mc. T. Kahin¹⁶, ORI yang sederhana buaatannya dengan gambar Presiden Sukarno ternyata mampu membangkitkan kekuatan besar, jauh melebihi perkiraan yang dibayangkan oleh militer Belanda. Hal itu membuktikan betapa nilai intrinsik ORI berkaitan langsung dengan keberhasilan perjuangan bangsa serta menjadi kekuatan riil dari Republik Indonesia.

Sadar akan arti pentingnya alat pembayaran dalam masa perjuangan, kemudian menimbulkan tindakan-tindakan perampasan yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap pihak Republik Indonesia. Mereka melakukan tindakan perampasan baik di dalam kota, maupun di jalur-jalur yang ada di luar kota. Tindakan lainnya adalah

¹⁴ Muhammad Hatta. *Kumpulan Pidato*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, hal. 105

¹⁵ Wiratsongko, *Op.cit.* hal. 10

¹⁶ George Mc, Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: UNS Press bekerjasama dengan Sinar Harapan, 1995, hal. 501

apabila tentara Belanda mengetahui rakyat mempunyai ORI, maka uang tersebut dirampas dan sobek-sobek.

Adanya berbagai tekanan dan paksaan yang dilakukan oleh pihak Belanda, menyebabkan rakyat terutama para pedagang secara diam-diam mau juga menerima uang NICA, di samping tetap menggunakan ORI. Para pedagang umumnya mencari amannya saja, bila diketahui ada tentara Republik Indonesia datang maka yang memiliki uang NICA segera menyembunyikan. Sedangkan bila ada patroli dari Belanda, mereka segera menyimpan uang ORI. Kenyataannya uang NICA hanya beredar di dalam kota, untuk luar kota rakyat tetap menggunakan uang Republik (ORI). Namun para pedagang yang ada di kota terutama golongan Tionghoa, lebih senang menerima ORI daripada menerima uang NICA. Sebab dengan ORI mereka bisa membeli beras dari petani.

Berkaitan dengan politik perjuangan di Yogyakarta yang ada kaitannya dengan ORI, Sultan Hamengkubuwana IX menegaskan sebagai berikut:

“... agar rakyat dan semua instansi perdjoeangan menolak beredarnya wang Federal dan ambil tindakan dimana perlu. Sebaliknya Wang ORI harus dipakai sebagai suatu mata wang yang berlaku dan harus dihargai.”¹⁷

Dengan adanya instruksi tersebut rakyat Yogyakarta baik yang ada di desa maupun di kota banyak mentaatinya. Bahkan di Pasar Ngasem rakyat dengan gigih mempertahankan uang ORI. Sultan juga berhasil mempengaruhi pedagang Thionghoa, sehingga golongan tersebut tidak ragu-ragu menerima ORI.¹⁸

Pihak Belanda dalam usahanya untuk menyebarkan uang NICA antara lain dengan cara menggaji para pegawai yang ada di daerah pendudukan dengan uang NICA. Sebagian besar kebutuhan hidup sehari-hari hanya dapat dibeli dengan ORI, maka para pegawai di daerah pendudukan harus menukarkan uang NICA dengan ORI. Uang NICA hanya dapat dibelanjakan untuk membeli benda-benda atau barang-barang seperti sabun, teh, makanan kalengan atau benda-benda pos.¹⁹

Keberadaan ORI yang lahir dalam suasana revolusi harus berakhir tatkala Pemerintah RIS mengeluarkan mata uang baru. Walaupun ORI mempunyai masa edar yang relatif pendek namun keberadaannya telah menandai sebuah era baru dalam sistem moneter di Indonesia. Di samping itu ORI juga berperan dalam perjuangan melawan Belanda, dan fungsi utama sebagai alat pembayaran dan alat tukar tentunya tetap melekat pada ORI.

Daftar Pustaka

Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: Inti Idayu Press.

Arsip Daerah No. 89.

Dwi Ratna Nurhajarini, 1999. *Oeang Repoeblik Indonesia Peranannya dalam Perjuangan Bangsa 1946 – 1950*. Yogyakarta: BKSNT, Depdikbud.

¹⁷ *Arsip Daerah No. 89*

¹⁸ P.J. Suwarno. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 – 1974: Sebuah Tinjauan Historie*. Yogyakarta: Kanisius, 1994, hal. 250 -25

¹⁹ Intisari. *Loc.cit*

Iswardono Sp, 1981. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE.

Kahin, George Mc.T., 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: UNS Press bekerja sama dengan Sinar Harapan.

Kementerian Penerangan, 1953. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*.

Mohammad Hatta, 1947. *Sepoetar Pengeloearan ORI*. Djakarta.

Mohammad Hatta, 1981. *Kumpulan Pidato*, Jakarta: Yayasan Idayu.

P.J. Suwarno, 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 – 1974: Sebuah Tinjauan Historis* . Yogyakarta: Kanisius.

Wiratsongko (ed). *Bank Notes and Coins from Indonesia*. Jakarta: Perum Peruri dan Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Surat Kabar dan Majalah

Kedaulatan Rakyat, 22 Maret 1946

Kedaulatan Rakyat, 30 Oktober 1946

Kedaulatan Rakyat, 14 Februari 1947

Intisari, No. 210, 9 Januari 1981

Revue Indonesia, No. 15, 9 Mei 1946

PERMAINAN TRADISIONAL ANAK: SALAH SATU KHASANAH BUDAYA YANG PERLU DILESTARIKAN

Ernawati Purwaningsih

Abstrak

Saat ini keberadaan permainan tradisional semakin sulit diketemukan dalam kehidupan anak-anak. Anak jaman sekarang cenderung lebih suka memainkan jenis-jenis permainan 'modern' yang lebih memfokuskan kepada pola berfikir atau kecerdasan otak. Di sisi lain, karena keterbatasan lahan menjadikan anak semakin jarang melakukan permainan tradisional, sehingga jenis permainan tradisional pun semakin tidak dikenal dan asing baginya.

Padahal disatu sisi di dalam permainan tradisional sangat sarat dengan nilai-nilai budaya yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan dan pendidikan anak. Nilai kebersamaan, saling tolong menolong, nilai kepemimpinan, sebenarnya merupakan nilai budaya yang sangat penting untuk menghadapi kondisi saat ini. Oleh sebab itu, keberadaan permainan tradisional anak perlu untuk dilestarikan dan disosialisasikan kepada anak sampai kapan pun.

Pengantar

Dunia anak yang sering diidentifikasi dengan dunia bermain merupakan suatu masa yang sangat membahagiakan bagi anak. Dari bermain terbentuk proses sosialisasi secara dini. Sebab dalam bermain anak belajar mengenal nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang diperlukan sebagai pedoman untuk pergaulan sosial dan memainkan peran-peran sesuai dengan kedudukan sosial yang nantinya mereka lakukan. Kehidupan anak identik dengan dunia bermain, sehingga secara tidak langsung permainan anak dapat digunakan sebagai penentu jalan hidupnya serta pembentuk kepribadiannya.¹

Permainan tradisional anak atau yang disebut dengan *dolanan* anak-anak merupakan salah satu aset budaya bangsa yang harus tetap dilestarikan. Maksud dari pelestarian adalah menjaga agar permainan tradisional anak tetap ada, dan akan lebih

baik lagi jika permainan tradisional anak dapat berkembang. Artinya selain permainan tradisional anak tetap hidup di masyarakat pendukungnya, juga adanya upaya agar permainan tersebut tidak statis, namun dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Hilangnya permainan tradisional anak selain akibat pengaruh globalisasi juga diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor historis, faktor kebijaksanaan dalam pendidikan formal, faktor hilangnya prasarana, serta terdesaknya permainan tradisional dengan permainan impor yang lebih modern.

Melihat kendala yang dihadapi di atas, perlu kiranya adanya upaya agar permainan anak tradisional tetap diakui, terutama oleh masyarakat pendukungnya. Permainan tradisional anak mempunyai arti yang sangat penting dalam pendidikan budaya bangsa, terutama untuk menanamkan nilai-nilai

¹ Christriyati Ariani dkk. *Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Melalui Permainan Rakyat DIY*. Yogyakarta: Proyek P3NB, 1977

budaya, norma sosial serta pandangan hidup dalam masyarakat dalam arti luas.

Sejarah Permainan Tradisional

Kata “permainan” berasal dari kata dasar “main” yang antara lain berarti melakukan perbuatan untuk bersenang-senang.² Berdasarkan pengertian tersebut berarti suatu permainan harus bisa menciptakan atau menimbulkan rasa senang bagi pelakunya. Apabila suatu permainan tidak bisa memberikan rasa senang bagi pemainnya, tidak lagi disebut sebagai permainan.

Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang berjudul *Tentang Frobel dan Methodenya*, beliau menganjurkan adanya syarat-syarat yang diperlukan dalam permainan, khususnya permainan anak yang bertujuan untuk pendidikan. Adapun syarat-syarat untuk permainan anak adalah:

1. Permainan harus menggembarakan anak karena kegembiraan adalah pupuk bagi tumbuhnya jiwa;
2. Permainan harus memberi kesempatan pada anak untuk berfantasi;. Permainan harus mengandung semacam tantangan sehingga merangsang daya kreativitas anak;
3. Permainan hendaknya mengandung unsur keindahan atau nilai seni; dan
4. Permainan anak harus mengandung isi yang dapat mendidik anak ke arah ketertiban, kedisiplinan, sportifitas, kebersamaan.

Adapun yang dimaksud dengan “tradisional” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*³ berasal dari kata dasar “tradisi” yang artinya antara lain “adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan”. Sedangkan kata “tradisional” sendiri berarti “sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu

berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun”.

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan “permainan tradisional” adalah segala bentuk permainan yang sudah ada sejak jaman dahulu dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Orang tidak dapat mengetahui dengan pasti bilamana mulai tumbuh dan berkembangnya permainan tradisional anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dipertanyakan lebih lanjut tentang siapa penciptanya, juga tidak dapat diketahui. Demikian juga tentang macam, jumlah, maksud semula dari permainan, semuanya tidak dapat diketahui secara pasti. Akan tetapi dari cerita-cerita, data-data, serta sisa-sisa berbagai macam jenis permainan tradisional anak yang dapat diketahui pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20 dapatlah ditelusuri tentang macam, jenis, cara, peraturan, lagu yang dipergunakan untuk mengiringi dan lain sebagainya.⁴

Dari jaman Mataram misalnya, dikenal cerita atau dongeng Raden Rangga yang suka bermain *gatheng* dengan menggunakan batu yang berukuran agak besar. Peninggalan batu *gatheng* sebagai alat bermain Raden Rangga hingga sekarang masih tersimpan di Kotagede. Soal kebenaran bahwa batu itu betul-betul alat bermain *gatheng* tidak dapat dipastikan.

Selain itu dikenal juga cerita permainan *watangan* jaman Mataram seperti yang dikisahkan oleh pengarang Yasawidagda dalam bukunya yang berjudul *Sangkan Paran*. Dalam buku tersebut ditulis bahwa setiap hari Sabtu para pemuda jaman Mataram suka bermain *watang* dengan mengendarai kuda dan mengambil tempat di alun-alun. Permainan ini berunsur latihan

² Tim Penyusun Kamus PPPB. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 614

³ *Ibid*. hal. 1069

⁴ Sukirman Dharma Mulya. *Transformasi Nilai Budaya Melalui Permainan Anak DIY*. Yogyakarta: Proyek P3NB, 1992.

ketrampilan mengendarai kuda sambil menyerang musuh.

Macam dan Jenis-jenis Permainan Tradisional Anak

Permainan tradisional anak sebenarnya banyak macam dan jenisnya, baik yang berwujud permainan sederhana maupun yang kompleks seperti ada gerak, lagu maupun peralatannya. Dalam buku *Javaansche Meisjespelen en Kindertiedjes* karangan H Overbeck disebutkan bahwa jumlah permainan anak dari seluruh tanah Jawa sebanyak 697 permainan. Dalam *Serat Saraja* karangan KPA Koesoemadiningrat tahun 1913 disebutkan bahwa jumlah permainan tradisional anak sebanyak 60 permainan. Selain itu ada juga berbagai sumber yang menyebutkan jumlah permainan tradisional anak seperti dalam *Serat Tatacara* dan beberapa kitab lain. Dari berbagai sumber tersebut Dharmamulya mendokumentasikan permainan tradisional anak sebanyak 241 permainan.⁵

Dari sejumlah permainan tradisional anak di atas, maka dapat digolongkan menjadi 10 yaitu:

1. Permainan yang pelakunya hanya anak perempuan saja atau anak laki-laki saja, atau dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, atau dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama;
 - Permainan yang pelakunya anak perempuan saja misalnya *dhakon*, *sumbar dulit*, *sumbar manik*;
 - Permainan yang pelakunya anak laki-laki saja misalnya: *bengkat*, *gobag gerit*, *adu kecil*;
 - Permainan yang pelakunya bisa anak laki-laki maupun perempuan, misalnya: *angklek*, *kauman*, *gobag sodor*;
 - Permainan yang pelakunya bisa dilakukan bersamaan antara anak

perempuan dan laki-laki, misalnya: *gulaganthi*, *soyung*, *dham-dhaman*.;

2. Permainan yang pelakunya berpasangan satu lawan satu misalnya, *dhakon*, *mul-mulan*, *dham-dhaman*;
 - Permainan yang pelakunya berkelompok seperti *gobag sodor*, *jeg-jegan*, *kauman*;
 - Permainan yang pelakunya perorangan seperti *sobyung*, *layangan*, *pathon*;
 - Permainan yang pelakunya satu lawan satu atau juga dapat dilakukan kelompok, misalnya *bengkat*;
 - Permainan yang pelakunya berpasangan seperti *gamparan*, *obrog*, *tembung*;
3. Permainan yang memerlukan peralatan, misalnya *benthik* alatnya *janak benthong*, *sumbar* alatnya *kecik* dan *suru*, *layangan* alat yang dibutuhkan layang-layang;
 - Permainan yang memerlukan prasarana arena tertentu seperti *gobag sodor*, *gobag bunder*, *tikusan*;
 - Permainan yang memerlukan arena dan alat bermain seperti *mul-mulan*, *dham-dhaman*, *bas-basan*;
4. Permainan yang disertai dengan nyanyian, misalnya *jamuran*, *ancak-ancak alis*, *soyang*;
5. Permainan yang diakhiri dengan pemberian hukuman pada yang kalah seperti *kauman*, *tikusan*, *gendiran*;
6. Permainan yang menggunakan *udhu* sehingga berakhir dengan untung dan rugi, misalnya *sumbar suru*, *sumbar garit*, *cithit*;
7. Permainan yang dapat berakibat rusak atau hilangnya alat bermain, misalnya *layangan*, *pathon*, *adu jengkerik*;
8. Permainan yang menggunakan kekuatan gaib seperti *nini thowong*, *wedhus prucul*, *oncit*;

⁵ *Ibid.*

9. Untuk menentukan urutan yang bermain terlebih dahulu misalnya dengan *sut, kacen, hompimpah*;
10. Tempat bermain bermacam-macam tergantung jenis permainannya.

Selain penggolongan permainan anak tradisional di atas, ada juga yang berpendapat bahwa aneka ragam dan bentuk permainan dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu permainan strategi, permainan yang lebih mengutamakan kemampuan fisik, dan yang ketiga permainan yang dilakukan secara bermain sambil belajar.

Menurut Ki Hadisukarno, permainan tradisional anak dapat dikelompokkan dalam lima macam, yaitu:

1. Permainan yang bersifat menirukan perbuatan orang dewasa, misalnya *pasaran, manten-mantenan, dhayoh-dhayohan*;
2. Permainan untuk mencoba kekuatan dan kecakapan, misalnya *gobag sodor, gobag bunder, benthik uncal, genukan, bengkat*;
3. Permainan untuk melatih panca indera, misalnya *gatheng, dakon, macanan, sumbar suru, pathon, dhekepan*;
4. Permainan dengan latihan bahasa, misalnya permainan anak dengan percakapan/cerita, permainan tebak-tebakan; dan
5. Permainan dengan lagu dan irama, misalnya: *jamuran, cublak-cublak suweng, ancak-ancak alis, tokung-tokung, blarak-blarak sempal*;

Nilai-nilai Budaya dan Manfaat Permainan Tradisional Anak

Pada dasarnya permainan tradisional lebih banyak bersifat mengelompok yang dimainkan minimal dua orang anak, menggunakan alat permainan yang relatif sederhana serta mudah dicari, serta mencerminkan kepribadian bangsa sendiri.

Permainan tradisional merupakan hasil penggalian dari budaya kita sendiri.⁶

Apabila dikaji lebih mendalam lagi, sebenarnya dalam permainan tradisional terdapat atau mengandung unsur-unsur nilai budaya. Kadang unsur-unsur nilai budaya itu tidak terpikirkan oleh kita. Namun sebenarnya apabila kita amati dan rasakan, ternyata dalam permainan tradisional banyak unsur-unsur nilai budaya yang umumnya bersifat positif, sehingga dapat untuk membentuk kepribadian anak untuk menjadi generasi bangsa yang berbudi luhur.

Menurut Dharmamulya⁷, unsur-unsur nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional yaitu:

- *Nilai kesenangan atau kegembiraan*, dunia anak adalah dunia bermain dan anak akan merasakan senang apabila diajak bermain. Rasa senang yang ada pada si anak mewujudkan pula suatu fase menuju pada kemajuan.
- *Nilai kebebasan*, seseorang yang mempunyai kesempatan untuk bermain tentunya merasa bebas dari tekanan, sehingga ia akan merasa senang dan gembira. Dalam keadaan yang gembira dan hati yang senang, tentunya lebih mudah untuk memasukkan hal-hal baru yang positif dan bersifat mendidik.
- *Rasa berteman*, seorang anak yang mempunyai teman bermain tentunya akan merasa senang, bebas, tidak bosan dan dapat saling bertukar pikiran dengan sesama teman. Selain itu, dengan mempunyai teman berarti anak akan belajar untuk saling mengerti pribadi masing-masing teman, menghargai teman dan belajar bersosialisasi.
- *Nilai demokrasi*, artinya dalam suatu permainan setiap pemain mempunyai kedudukan yang sama, tidak memandang apakah anak orang kaya atau anak orang miskin, tidak memandang anak pandai

⁶ *Loc.cit.*

⁷ *Ibid.*

atau bodoh. Jadi, apabila dalam suatu permainan undiannya dengan cara *sut*, *hompimpah* atau yang lain untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, maka semua pemain harus mematuhi peraturan itu.

- *Nilai kepemimpinan*, biasanya terdapat pada permainan yang sifatnya berkelompok. Setiap kelompok memilih pemimpin kelompok mereka masing-masing. Anggota kelompok tentunya akan mematuhi pimpinannya.
- *Rasa tanggung jawab*, dalam permainan yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan, biasanya pelaku memiliki rasa tanggung jawab penuh, sebab mereka akan berusaha untuk memperoleh kemenangan. Apabila menang berarti suatu prestasi yang tentunya menimbulkan rasa bangga yang pada akhirnya berpengaruh juga pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak.
- *Nilai kebersamaan dan saling membantu*. Dalam permainan yang bersifat kelompok, nilai kebersamaan dan saling membantu nampak sekali. Kelompok akan bekerjasama dan saling membantu untuk meraih kemenangan. Apabila antaranggota kelompok tidak saling membantu, maka kekalahanlah yang akan diperoleh.
- *Nilai kepatuhan*. Dalam setiap permainan tentunya ada syarat atau peraturan permainan di mana peraturan itu ada yang umum atau yang disepakati bersama. Setiap pemain harus mematuhi peraturan itu. Jadi dengan bermain maka secara tidak langsung anak dilatih untuk mematuhi suatu peraturan yang berlaku.
- *Melatih cakap dalam berhitung*, yaitu pada permainan *dhakon*. Setiap pemain harus cakap menghitung.
- *Melatih kecakapan berpikir*, seperti dalam permainan *mul-mulan*, *macanan*,

bas-basan, para pelaku secara terus menerus dilatih untuk berpikir pada skala luas atau sempit, gerak langkah sekarang dan selanjutnya baik diri sendiri atau lawannya dan untuk mendapatkan suatu kemenangan maka harus cermat dan jeli.

- *Nilai kejujuran dan sportivitas*. Dalam bermain dituntut kejujuran dan sportivitas. Pemain yang tidak jujur akan mendapatkan sangsi, seperti dikucilkan teman-temannya, atau mendapat hukuman kekalahan.

Permainan tradisional anak selain mempunyai unsur-unsur nilai budaya yang sedemikian banyak, juga mempunyai manfaat atau guna. Seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara dalam tulisannya di majalah *Pusara* bahwa:

Mudahlah bagi kita untuk menetapkan guna dan faedah permainan kanak-kanak itu bagi kemajuan jasmani dan rohani kanak-kanak. Tubuh badannya menjadi sehat dan kuat, serta hilanglah kekakuan bagian-bagian tubuh, hingga gampang dan lancar anak-anak melakukan segala sepak terjang atau langkah laku dengan segala tubuh badannya. Seluruh pancainderanya dapat dipergunakannya dengan sebaik-baiknya, lancar, lembut dan cekatan. Selain itu permainan anak juga berpengaruh pada timbulnya ketajaman berpikir, kehalusan rasa serta kekuatan kemauan.⁸

Permainan anak melatih anak-anak untuk bisa menguasai diri sendiri, menghargai atau mengakui kekuatan orang lain, berlatih untuk bersiasat atau bersikap yang tepat dan bijaksana. Dengan demikian, permainan anak sungguh bermanfaat untuk mendidik perasaan diri dan sosial, berdisiplin, tertib, bersikap awas dan waspada serta siap menghadapi semua keadaan.

Permainan anak yang secara langsung akan diterima dengan senang hati bagi anak itu sendiri. Mereka dapat bermain, berekspresi dan bebas merdeka. Jadi anak-

⁸ Majalah *Pusara*. Mei 1941 Jilid XI No. 5

anak bermain dengan rasa kemerdekaan tanpa ada paksaan dan ini akan menjadikan anak-anak mempunyai rasa percaya diri.

Permainan Tradisional Anak di Era Global

Kalau kita bicara tentang permainan maka tidak bisa lepas dari anak-anak. Bermain adalah dunia anak-anak. Anak-anak dari lahir pun sudah menunjukkan bahwa dunia yang paling mereka senangi adalah bermain. Sebagai contoh, ketika anak yang baru berumur 3 bulan, maka ia sudah bisa tertawa apabila diajak bermain *cilukba*. Permainan bermacam-macam jenisnya, tergantung usia sang anak. Dengan bermain anak akan merasa senang dan gembira.

Pada era globalisasi ini ketika teknologi tumbuh pesat, permainan tradisional semakin tersingkir. Permainan anak-anak sekarang (terutama yang hidup di ibukota negara, propinsi, dan bahkan kabupaten) pada umumnya cenderung bersifat individual dan ditinjau dari aspek finansial juga relatif mahal dibandingkan dengan permainan tradisional. Sebagai contoh, permainan yang banyak digemari anak-anak sekarang adalah PS (*Play Station*). Permainan ini menggunakan teknologi tinggi, anak-anak dapat bermain sendiri atau juga dengan teman, tetapi biasanya mereka bermain sendiri. Kalau sudah menghadap *Play Station*, anak-anak sudah asyik sekali. Bahkan, sampai malas untuk melakukan aktivitas lainnya seperti makan, mandi, dan apalagi belajar. Permainan mobil *remote*, *barbie*, dan permainan ‘modern’ lainnya selain harganya relatif lebih mahal juga lebih bersifat individual.

Tidak dikenalnya permainan tradisional oleh anak-anak jaman sekarang ini bukan karena kesalahan dari anak itu, akan tetapi karena dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain, penyampaian materi. Karena permainan tradisional tidak dikenalkan oleh generasi sebelumnya, maka anak pun tidak mengenalnya. Seperti kata pepatah, tak kenal

maka tak sayang. Demikian juga dengan permainan tradisional, karena anak-anak sekarang tidak dikenalkan dengan permainan tradisional, maka mereka pun tidak sayang. Apalagi sarana dan prasarana dari beberapa permainan tradisional tersebut sulit didapat atau dikenali. Misalnya permainan *gobag sodor* yang memerlukan arena yang agak luas, dan untuk masa sekarang agak sulit diperoleh, Demikian juga dengan permainan *egrag* yang membutuhkan sarana bambu untuk bermainnya, juga sulit diperoleh.

Tersisihnya permainan tradisional sebenarnya tidak bisa ditolak. Kemajuan teknologi di era global yang cukup pesat membawa konsekuensi pada kemajuan di berbagai hal, termasuk jenis dan macam permainan anak. Oleh karena itu, masyarakat pendukung kebudayaan perlu menjaga atau melestarikan serta mengembangkannya. Artinya, meski banyak permainan ‘modern’ yang ditawarkan, hal ini menjadi tantangan bagi kita, terutama masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Paling tidak, permainan tradisional yang sarat dengan nilai-nilai luhur perlu dikenali, selanjutnya permainan tersebut dapat diimprovisasi dengan keadaan sekarang, sehingga permainan tradisional akan diminati anak-anak dan tidak kalah dengan permainan ‘modern’.

Guna mengembangkan permainan tradisional sebagai salah satu aset budaya bangsa, maka perlu kiranya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Tanpa adanya perhatian dan campur tangan pemerintah untuk terus melestarikan dan mengembangkan permainan tradisional, maka permainan tradisional tersebut akan hilang ditelan waktu. Demikian juga apabila pelestarian dan pengembangan permainan tradisional tidak didukung oleh masyarakat, juga akan hilang dengan sendirinya. Sebagai contoh usaha pelestarian permainan tradisional yaitu dengan memperkenalkan kepada siswa di sekolah. Cara ini cukup efektif karena selain anak dalam kegiatan belajar, pendukung atau

pemain juga banyak, bila permainan membutuhkan arena yang agak luas juga memungkinkan.

Permainan tradisional yang merupakan salah satu khasanah budaya bangsa dan menjadi aset bangsa, perlu terus dilestarikan

dan dikembangkan. Tentunya ini semua tidak lepas dari usaha untuk membentuk kepribadian anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan bangsa, menjadi manusia yang berbudi luhur dan bisa membawa bangsa ini pada kemakmuran.

Daftar Pustaka

Ariani, Christriyati dkk. 1997. *Pembinaan Nilai Budaya Melalui Permainan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Proyek P2NB.

Dharmamulya, Soekirman dkk. 1992. *Transformasi Nilai Budaya Melalui Permainan Anak DIY*. Yogyakarta: Proyek P2NB.

Majalah *Pusara*. Mei 1941 Jilid XI No. 5.

Tim Penyusun Kamus PPPB. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka.

WAYANG SEBAGAI TONTONAN, TUNTUNAN DAN TATANAN

Suyami

Abstrak

Seni pertunjukan atau teater tradisional yang berupa pertunjukan wayang merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang sudah sangat tua usianya. Pertunjukan wayang kulit mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai penerangan dan pendidikan, sebagai refleksi nilai estetis, sebagai sarana mencari nafkah dan sebagai hiburan sosial. Sebagai sarana pendidikan, wayang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat luas dan sesuatu yang disampaikan dalam pesan dapat memperkaya nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup, baik dalam dimensi kultural dan spiritual. Sekarang pertunjukan wayang cenderung lebih memenuhi keinginan penonton dalam pemenuhan unsur hiburan (tontonan semata). Masyarakat mengharapkan dalam pementasan wayang dapat mencerminkan fungsinya sebagai tontonan, tuntunan dan tatanan.

Wayang Sebagai Seni Pertunjukan

Wayang adalah salah satu jenis seni pertunjukan yang di dalamnya terkandung berbagai unsur seni, seperti seni tari, seni musik, seni drama, dan seni suara. Berdasarkan jenis peraganya, seni pertunjukan wayang dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu pertunjukan wayang dengan peraga manusia (wayang orang), pertunjukan wayang dengan peraga boneka (wayang kulit, wayang *golek*, wayang *klithik*, wayang *thengul*, dll.), pertunjukan wayang yang menggunakan alat peraga berupa gambar (wayang *beber*), dan pertunjukan wayang yang tanpa menggunakan alat peraga (wayang *jemblung*, wayang *kenrung*). Unsur seni tari dalam pertunjukan wayang dapat dilihat pada aktifitas sang dalang dalam menarikan wayang-wayangnya, khususnya untuk pertunjukan wayang yang menggunakan alat peraga boneka, maupun aktifitas para peraga

dalam memainkan karakter tokoh yang dibawakannya, khususnya untuk pertunjukan wayang yang diperagakan oleh manusia (wayang orang). Unsur seni musik dimainkan oleh para *penabuh gamelan* yang mengiringi jalannya pertunjukan. Unsur seni drama ada dalam cerita yang dibawakan oleh sang dalang lewat karakter-karakter wayangnya. Unsur seni suara (resitasi) tampak dalam ucapan sang dalang pada saat mengucapkan *janturan*, dan sebagainya.¹

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai luhur yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Melalui pertunjukan wayang dapat dilihat gambaran kehidupan manusia di alam semesta, sehingga sering dikatakan bahwa pertunjukan wayang merupakan hiburan berwujud *tontonan* yang mengandung *tuntunan* untuk memahami *tatanan*.

¹ Djoko Surjo. *Gaya Hidup Masyarakat Jawa Di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya*. Yogyakarta: Proyek P3KN, Depdikbud, 1983, hal. 53

Berkaitan dengan banyaknya jenis seni pertunjukan wayang, maka dalam pembicaraan ini dibatasi, khususnya akan mengupas mengenai seni pertunjukan wayang kulit.

Berbicara tentang seni pertunjukan wayang, khususnya wayang kulit tentunya tidak bisa lepas dari jenis-jenis wayang yang sudah ada sebelumnya. Wayang sudah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang. Dalam dunia wayang, dikenal adanya wayang *purwa*, wayang *madya*, wayang *gedhog*, wayang *menak*, wayang *babad*, wayang modern, dan wayang *topeng*.

Wayang *purwa* adalah pertunjukan wayang yang pementasan ceritanya bersumber pada kitab Mahabarata atau Ramayana. Wayang tersebut dapat berupa wayang kulit, wayang *golek*, ataupun wayang orang. Ada yang berpendapat bahwa kata *purwa* berasal dari kata *parwa* yang berarti bagian dari cerita Mahabarata atau Ramayana. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kata *purwa* sama dengan kata 'purba' yang berarti zaman dahulu, sehingga wayang *purwa* diartikan sebagai pertunjukan wayang yang menyajikan cerita-cerita pada zaman dahulu. Menurut KGPA Mangkunegara IV, yang termasuk dalam cerita wayang *purwa* adalah cerita pada masa kedatangan Prabu Isaka (Ajisaka) sampai wafatnya Maharaja Yudayana di Kerajaan Astina, yaitu dari tahun 1-785 çaka (tahun 78-863 M). Yang termasuk dalam wayang *purwa* meliputi wayang *rontal*, wayang kertas, wayang *beber purwa*, wayang *Demak*, wayang *keling*, wayang *jengglong*, wayang *kidang kencana*, wayang *purwa gedhog*, wayang kulit *purwa*, wayang *golek*, wayang *krucil* atau

wayang *klithik*, wayang *Rama*, wayang *kaper*, wayang *tasripin*, wayang *tambun*, wayang *golek purwa*, wayang *ukur*, wayang batu atau wayang *candi*, wayang *sandosa*, dan wayang orang.²

Wayang *madya* adalah kombinasi perwujudan wayang *purwa* dengan wayang *gedhog* yang ceritanya menyambungkan antara cerita zaman *purwa* (*Ramayana* dan *Mahabarata*) dengan zaman Jenggala yang menceritakan cerita-cerita Panji. Menurut KGPA Mangkunegara IV, wayang *madya* menceritakan kisah pada masa Prabu Jayalengkara, yaitu pada tahu 785-1052 çaka (tahun 863-1130 M), yang pada umumnya bersumber pada *Serat Anglingdarma*.³

Wayang *gedhog* adalah pertunjukan wayang yang ceritanya bersumber dari cerita Panji, maupun kisah kepahlawanan pada masa kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Wayang *gedhog* juga sering disebut dengan wayang *Panji*. Bentuk wayang yang dipergunakan dalam pertunjukan wayang *gedhog* ada yang terbuat dari kulit seperti halnya wayang kulit *purwa*, ada yang berupa wayang *beber*, dan ada pula yang badannya terbuat dari kayu pipih yang diukir dan *disungging* seperti halnya wayang kulit *purwa* namun tangannya terbuat dari kulit, yang disebut wayang *klithik*.⁴

Wayang *menak* adalah pertunjukan wayang yang ceritanya bersumber pada cerita *menak*, dan wujud wayangnya terbuat dari kulit yang *ditatah* dan *disungging* seperti halnya wayang kulit *purwa*. Cerita *menak* yang ditampilkan dengan wayang yang terbuat dari kayu dan merupakan wayang *golek* disebut wayang *thengul*.⁵

Wayang *babad* adalah pertunjukan wayang yang ceritanya bersumber pada

² Haryanto, S, Patiwinmba Adiluhung. *Sejarah dan Perkembangan Wayang*. Jakarta: Jambatan, 1988, hal 41 - 95

³ *Ibid.* hal. 95 - 97

⁴ *Ibid.* hal. 97 - 100

⁵ *Ibid.* hal. 107

cerita-cerita babad (sejarah) setelah masuknya agama Islam di Indonesia, antara lain kisah-kisah kepahlawanan dalam masa kerajaan Demak dan Pajang. Yang termasuk dalam *wayang babad* adalah *wayang kuluk*, yaitu wayang yang ceritanya khusus mengambil cerita-cerita sejarah Kraton Yogyakarta (Mataram); *wayang dupara*, yang ceritanya mengambil dari *babad* Demak, Pajang, Mataram, hingga Kartasura; dan wayang *Jawa*, yang keseluruhan wayangnya memakai baju *lurik*.⁶

Wayang modern adalah pertunjukan wayang yang dimaksudkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang termasuk dalam wayang ini adalah *wayang wahana*, yaitu pertunjukan wayang yang ceritanya bersumber pada cerita-cerita jaman sekarang, sehingga juga disebut wayang sandiwara; *wayang suluh*, yaitu pertunjukan wayang yang dimanfaatkan sebagai sarana penerangan; *wayang kancil*, yaitu pertunjukan wayang yang ceritanya bersumber pada cerita kancil atau cerita binatang, sehingga wujud wayangnya juga berupa gambar binatang; wayang *wahyu*, yaitu pertunjukan wayang yang ceritanya bersumber dari kitab Injil; *wayang dobel*, yaitu pertunjukan wayang yang ceritanya bersumber dari kitab suci Al Qur'an; wayang Pancasila, yaitu pertunjukan wayang yang bertujuan untuk memberi penerangan mengenai falsafah Pancasila, UUD'45, dan GBHN dengan mempergelarkan cerita-cerita yang berhubungan dengan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda serta peristiwa-peristiwa Kemerdekaan RI; wayang *sejati*, yaitu pertunjukan wayang dengan semangat kebangsaan yang penyampaianya dengan menggunakan Bahasa Indonesia; wayang *Budha*, adalah pertunjukan wayang yang berkaitan dengan

cerita dalam agama Budha; wayang *jemblung*, yaitu penyajian cerita wayang dengan Bahasa Jawa tapi tanpa menggunakan alat peraga; *dhalang jemblung*, yaitu penyajian cerita dengan tanpa alat peraga, yang dilakukan oleh sekelompok orang (4-5 orang) yang sekaligus sebagai pemain dan pengiring, yang disampaikan dalam Bahasa Jawa-Banyumas; dalang *kenprung*, yaitu penyajian cerita wayang (biasanya cerita *babad* atau cerita Panji) dengan tanpa alat peraga, dan sang dalang sekaligus sebagai pengiring. Jadi bercerita dan menembang sambil tangannya asyik memukul *kenprung* dan *terbang* sebagai pengiringnya; dan wayang *sadat*, yaitu pertunjukan wayang yang ditampilkan dalam warna Islam, dengan cerita pada zaman Kerajaan Demak hingga Pajang. Bentuk wayangnya seperti halnya dalam wayang *wahyu* maupun dalam wayang *suluh*, namun dengan busana Islam.⁷ Wayang *topeng*, adalah pertunjukan wayang yang para peraganya mengenakan *topeng*.⁸

Menurut Rasser (dalam Soedarsono dan Bakdi Sumanto), pertunjukan wayang kulit Jawa sebelumnya merupakan suatu pertunjukan ritual untuk mengundang roh nenek moyang turun ke bumi agar menolong keturunannya yang masih hidup di dunia.

Sebagaimana diungkapkan oleh Haryono (1999), pertunjukan wayang sudah ada sejak abad VIII M, yang dalam prasasti Kuti (840 M.) disebut dengan kata *haringgit*. Ketika itu pertunjukan wayang masih bersifat sakral, yaitu disebutkan *mawayang buatt hyang*. Hal itu sebagaimana terungkap dalam prasasti Wukajaya dari masa Balitung, di mana tertulis *si galigî mawayang buatt hyang* (si Galigi memainkan wayang untuk Hyang). Dari ungkapan tersebut dapat ditafsirkan bahwa orang memainkan wayang

⁶ *Ibid.* hal. 114 - 116

⁷ *Ibid.* hal. 117 - 129

⁸ *Ibid.* hal. 129 - 143

bukan untuk dinikmati sesama manusia, melainkan semata-mata buat Hyang (roh leluhur). Hal ini sebagaimana yang masih berlaku di Bali,⁹ yang disebut *wayang lemah*, dan khusus dimainkan pada siang hari, berhubungan dengan kegiatan keagamaan tertentu. Dalam kegiatan tersebut dalang tidak peduli jika tidak ada seorang pun yang menonton, dia akan tetap mendalang dengan penuh semangat, karena baginya mendalang untuk para leluhur. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh A. A. M. Djelantik ketika ditanya oleh seorang pengunjung dari luar negeri yang sangat terkesan oleh semangat yang meluap dari sang dalang padahal tidak ada orang yang menontonnya “Mengapa tidak ada yang menonton?” yang dijawab oleh A. A. M. Djelantik “sebenarnya sang dalang memainkan wayang di hadapan para leluhur kita yang berada di sini, tetapi kita tidak bisa melihatnya”.

Pada masa itu belum jelas benar media apa yang dipergunakan untuk pertunjukan wayang. Informasi yang mengungkapkan bahwa pertunjukan wayang menggunakan media kulit baru diperjelas pada sekitar abad XI-XII sebagaimana dinyatakan di dalam kitab *Arjunawiwaha*, di mana tertulis “*hanonton ringgit manangis asêkêl muda hidêpn huwus wruh towin yan walulang inukir molah mangucap...*”. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa wayang dibuat dari kulit (*lulang*) yang diukir dapat bergerak (*digerakkan*) dan berucap.¹⁰ Dalam hal itu belum jelas benar mengenai bagaimana bentuk pengukiran wayang kulit tersebut. Namun menurut Haryanto, sebelum zaman Demak, bentuk wayang kulit seperti wujud gambaran tubuh manusia.¹¹

Dengan masuknya agama Islam, menurut ajaran Islam, penggambaran yang bersifat wujud manusia itu bertentangan dengan agama dan ajaran Islam, karena dinilai menyamai atau setidaknya mendekati kekuasaan Tuhan. Hal itu termasuk dosa besar, kemudian para wali mengubah bentuk wayang agar tidak begitu menyerupai bentuk wujud manusia, sehingga akhirnya terbentuklah wujud wayang seperti yang tampak sekarang ini.¹²

Makna Filosofis Dalam Tradisi Pergelaran Wayang

Secara tradisi, pertunjukan wayang kulit dilakukan semalam suntuk, yaitu dari pukul 21.00-06.00, yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu 1) *pathet nem* yang berlangsung dari pukul 21.00 hingga pukul 24.00; 2) *pathet sanga* berlangsung dari pukul 24.00 hingga pukul 03.00 ; dan *pathet manyura* yang berlangsung dari pukul 03.00 hingga pukul 06.00. Menurut dalang muda Ki R.T. Ir. Warsena, M. Si. (Slank), pembagian tahapan dalam pertunjukan wayang kulit yang menjadi tiga bagian (*patet nem*, *patet sanga*, dan *patet manyura*) itu melambangkan tiga tahapan dalam kehidupan manusia yaitu masa lahir (*patet nem*), masa dewasa (*patet sanga*), dan masa kematian (*patet manyura*).

Dalam pertunjukan wayang kulit, tahapan *patet nem* ditandai dengan penancapan *gunungan* yang condong ke kiri, tahapan *patet sanga* ditandai dengan penancapan *gunungan* tegak lurus, dan *patet manyura* ditandai dengan penancapan *gunungan* condong ke kanan.

⁹ Djelantik, A.A.M. Seni Pertunjukan Ritual dan Politik dalam *Gelar: Jurnal Ilmu dan Seni*. Surakarta: STSI, 1999, hal. 12

¹⁰ Timbul Haryono. Sekilas Tentang Seni Pertunjukan Masa Jawa Kuna: Refleksi dari Sumber-Sumber Arkeologis dalam *JAWA Majalah Ilmiah Kebudayaan* Vol. I. Yogyakarta: Yayasan Studi Jawa, 1999, hal 105

¹¹ *Opcit.* Haryanto. Hal 29

¹² *Ibid.* hal. 31 dan 49

Sesuai dengan adegan-adegannya, tahapan *patet nem* melambangkan kehidupan manusia pada masa kanak-kanak. Pada adegan *kedhaton*, di mana raja yang selesai bersidang diterima oleh permaisuri untuk bersantap bersama diartikan sebagai lambang bayi yang baru lahir untuk disambut di pangkuan sang ibu. Adegan *paseban jawi* diartikan melambangkan kehidupan seorang anak yang mulai mengenal dunia luar. Adegan *jaranan* yang ditampilkan dengan pasukan binatang diartikan melambangkan watak anak, bahwa anak yang belum dewasa memiliki sifat-sifat seperti binatang. Adegan perang *ampyak* diartikan melambangkan perjalanan kehidupan seorang anak yang sudah beranjak dewasa, mulai menghadapi banyak kesulitan dan hambatan. Akhir dari perang *ampyak* menunjukkan semua kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan baik. Adegan *sabranan* (adegan raksasa) diartikan melambangkan seorang anak yang sudah dewasa namun masih mempunyai watak-watak yang dominan dalam keangkaramurkaan, emosional, dan nafsu. Adegan terakhir dalam *patet nem* adalah *perang gagal*, yaitu suatu perang yang belum berakhir dengan suatu kemenangan. Adegan ini melambangkan suatu tataran hidup yang belum mantap, karena belum mempunyai tujuan yang pasti.¹³

Adegan pada *patet sang* terdiri dari adegan *goro-goro*, adegan pertapaan atau *pandhita*, adegan *perang kembang*, dan adegan *sintren*. Adegan *goro-goro* adalah adegan yang paling meriah dan menyenangkan. Adegan ini diartikan bahwa ketika manusia menginjak dewasa, hidup ini terasa sangat indah dan menyenangkan. Adegan *pandhita* adalah adegan pertemuan antara seorang pendeta di pertapaan dengan seorang ksatriya. Adegan ini melambangkan

suatu masa di mana manusia sudah mulai mencari guru untuk belajar ilmu pengetahuan. Adegan *perang kembang* adalah perang antara raksasa melawan seorang ksatria yang diiringi punakawan. Adegan *perang kembang* melambangkan suatu tataran di mana manusia sudah mulai mampu dan berani memenangkan atau mengalahkan nafsu-nafsu angkaramurka. Adegan *sintren* adalah adegan yang menggambarkan seorang ksatria sudah menetapkan pilihannya dalam menempuh hidupnya. Adegan tersebut melambangkan tataran di mana manusia sudah mampu menentukan pilihan dalam hidupnya.¹⁴

Adegan pada *patet manyura* terdiri dari *jejer manyura*, *perang brubuh*, dan *tancep kayon*. Dalam *jejer manyura* diceritakan bahwa tokoh utama di dalam lakon sudah berhasil dan mengetahui dengan jelas tentang tujuan hidupnya. Adegan ini melambangkan tataran kehidupan manusia, di mana manusia setelah berhasil menentukan pilihan dalam hidupnya, lalu bertekad untuk menggapai tujuan hidupnya tersebut. Adegan *perang brubuh* disebut pula adegan *perang ageng* (perang besar) karena merupakan perang yang paling besar, dengan banyak korban yang berjatuhan. Perang ini diakhiri dengan kemenangan di pihak ksatria. Adegan ini melambangkan bahwa di sini manusia sudah dapat menyingkirkan segala rintangan dan berhasil menumpas segala hambatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah adegan ini kemudian dilanjutkan dengan *tancep kayon* sebagai penutup bagi pertunjukan wayang tersebut, yaitu *kayon* ditancapkan di tengah-tengah *kelir* lagi sebagaimana halnya ketika pertunjukan wayang belum dimulai. Adegan *tancep kayon* ini melambangkan proses maut, yaitu manusia sudah meninggalkan alam fana,

¹³ Kanti Waluya, *Dunia Wayang: Nilai Estetis, Sakralitas dan Ajaran Hidup*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000, hal. 37 - 41

¹⁴ *Ibid.* hal 41 - 44

¹⁵ *Ibid.* hal 45 - 46

menuju ke alam baka yang kekal dan abadi.¹⁵ Pada akhir pertunjukan wayang kulit *purwa* sering kali dimainkan tarian wayang *golek* wanita (wayang boneka dari kayu yang dalam Bahasa Jawa disebut '*golek*') yang menyiratkan suatu anjuran agar para penonton *nggoleki* (mencari) makna atau ajaran dari pertunjukan wayang tersebut. Ada pula yang tidak memainkan boneka kayu, melainkan menarikan tokoh ksatria pemenang, biasanya tokoh Werkudara, yang disebut *tayungan*.

Tontonan, Tuntunan dan Tatanan

Wayang adalah refleksi dari budaya Jawa, dalam arti pencerminan dari kenyataan kehidupan, nilai dan tujuan kehidupan, moralitas, harapan, dan cita-cita kehidupan orang Jawa. Melalui cerita wayang masyarakat Jawa memberi gambaran kehidupan mengenai bagaimana hidup sesungguhnya dan bagaimana hidup itu seharusnya. Cerita wayang dan karakter tokoh-tokoh wayang mencerminkan sebagian dari situasi konkret dalam kenyataan hidup masyarakat Jawa.¹⁶

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, di sini dapat dikatakan bahwa seni pertunjukan wayang merupakan *tontonan* yang sekaligus juga berfungsi sebagai *tuntunan*. Wayang mengandung *tuntunan* yang sangat tinggi, yang bisa menuntun dan membentuk jiwa manusia untuk menjadi arif dan berakhlak mulia. Misalnya dari lakonnya, apapun lakon wayang yang dimainkan, pihak yang baik dan benar pasti akan bisa mengalahkan pihak yang jahat. Hal itu bisa mendorong manusia untuk menghindari niat dan sifat jahat, karena akhirnya kejahatan akan dikalahkan oleh kebenaran dan kebaikan. Berbagai tokoh wayang menggambarkan sifat dan perwatakan manusia tertentu, yang bisa menjadi cermin bagi sifat dan perwatakan manusia. Tahapan

penceritaannya menggambarkan cermin kehidupan rohani manusia. Perangkat pertunjukannya merupakan cermin gambaran kehidupan di alam semesta. Harmonisasi bunyi gamelan dan pengiringnya merupakan gambaran keharmonisan kehidupan manusia di alam semesta, walaupun berbeda-beda bentuk dan sifat bunyinya, jika dibunyikan sesuai dengan aturan akan terdengar kombinasi bunyi yang sangat harmonis dan damai. Begitu halnya dengan manusia, bahwa dengan perbedaan dan keanekaragamannya, jika semuanya menjalankan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku, pasti kehidupan ini akan terasa damai dan menyenangkan. Suara dalang dalam *pocapan* maupun perlakuannya terhadap para tokoh wayang merupakan gambaran takdir kehidupan manusia, sehingga dalam budaya Jawa dikenal pepatah "*urip mung saderma nglakoni, manungsa mung kinarya ringgit kang winayangake dening Hyang kang murbeng dumadi*" (hidup hanya sekedar menjalani, manusia hanya sebagai wayang yang dimainkan oleh Tuhan sang pencipta), yang mengandung makna ajaran religius bahwa manusia harus senantiasa berserah diri pada kekuasaan Tuhan. Di samping itu, dalam pertunjukan wayang juga terkandung ajaran bagi hidup manusia untuk bersikap santun terhadap sesama, menghormati kepada yang pantas dihormati, dan bertindak serta bersikap sebagaimana mestinya.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Seni Pertunjukan Wayang

Pada dasarnya, kehidupan di alam semesta ini berkembang dari daya tarik dua kutub yang saling bertentangan namun juga saling tarik menarik, yaitu kutub kebaikan atau kebenaran dan kutub keburukan atau kejahatan. Hal ini sebagaimana kita ketahui, bahwa manusia tercipta sebagai makhluk

¹⁶ *Ibid.* hal. 6 - 7

yang paling sempurna di antara semua makhluk ciptaan Tuhan karena dilengkapi dengan akal pikiran sekaligus nafsu.

Oleh karena itu, dalam diri manusia terjadi saling tarik menarik antara keinginan akal pikiran dan keinginan nafsu, sehingga membentuk dorongan yang saling bertolak belakang. Dorongan tersebut mengakibatkan terjadinya benturan-benturan di dalam diri manusia, yaitu di satu sisi ingin memenuhi keinginan akal pikiran, di sisi lain keinginan nafsunya juga ingin dipenuhi. Benturan-benturan tersebut menghasilkan sebuah sikap yang terwujud dalam bentuk perilaku. Orang yang mengutamakan keinginan nafsu perilakunya akan berbeda dengan orang yang mengutamakan keinginan akal pikiran dan hati nurani.

Hal tersebut tampak jelas dalam wayang, di mana dalam lakon apapun yang dimainkan dalam pertunjukan wayang selalu mengkonfrontasikan antara kelompok karakter yang mengutamakan akal pikiran dan hati nurani (golongan ksatria) melawan kelompok karakter yang mengutamakan keinginan nafsu (golongan angkaramurka). Golongan ksatria berjuang untuk menegakkan kebajikan dan kebenaran sedangkan golongan angkaramurka memperjuangkan kekuasaan dan kepuasan. Pada akhir cerita pihak yang benar pasti menang sedangkan pihak yang salah pasti kalah.

Gambaran lakon dalam wayang tersebut bisa dimaknai sebagai gambaran konfrontasi antara kebaikan melawan keburukan, atau kebenaran melawan kejahatan, dalam kehidupan antarmanusia dengan manusia yang lain sebagai makhluk sosial, maupun peperangan dalam diri/batin manusia antara dorongan hati nurani dan akal pikiran melawan dorongan nafsu.

Oleh karena itu, dalam pertunjukan wayang terkandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk mengasah jiwa manusia

agar bisa menjadi manusia yang manusiawi, yaitu bisa mewujudkan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, yang antara akal, pikiran, dan nafsunya bisa berkembang dan terkendali secara seimbang.

Nilai-nilai yang terkandung dalam seni pertunjukan wayang meliputi nilai kerohanian atau nilai religius, etika, moral, mental, maupun sosial.

Religius

Kata “religius” berarti ‘bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan paut dengan religi’. Sedangkan “religi” adalah ‘kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia; kepercayaan (animisme, dinamisme, dan agama).¹⁷ Nilai religius yang terkandung dalam wayang tampak pada peran dalang dalam memainkan wayang. Dalam pertunjukan wayang, dalang akan memainkan tokoh wayang sesuai dengan perannya. Misalnya dalam lakon “*Petruk dadi Ratu*”, dalang pasti akan memainkan tokoh Petruk sebagai raja, walaupun tokoh Petruk itu sebenarnya hanya abdi dari golongan ksatria. Dalam hal ini, para tokoh ksatria tidak boleh protes walaupun Petruk hanyalah abdi mereka. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam budaya Jawa sering ada ungkapan “*E, ya karang lagi dadi lakon*” (E, dasar memang sedang menjadi pelaku cerita) atau “*urip mung saderma nglakoni, manungsa mung kinarya ringgit kang winayangake dening Hyang kang murbeng dumadi*” (hidup hanya sekedar menjalani, manusia hanya sebagai wayang yang dimainkan oleh Tuhan Sang Pencipta). Ungkapan tersebut biasanya muncul apabila seseorang sedang mengalami nasib yang kurang beruntung. Dengan ungkapan tersebut manusia berusaha menetralkan dan menenangkan jiwa untuk menerima dan menghadapi dengan

¹⁷ Tim Penyusun Kamus PPPB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 830

tabah dan lapang dada, atas segala nasib yang sedang menimpa dirinya, dengan mengakui bahwa di atas kekuatan dan kekuasaan manusia ada kekuatan dan kekuasaan adikodrati yang berkuasa menentukan nasib manusia. Dengan begitu manusia akan menghindari sifat takabur dan sombong sebab betapa pun hebat, kuat dan berkuasa, niscaya di atas manusia ada kekuatan yang lebih hebat, lebih kuat, dan lebih berkuasa, yaitu kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Di samping itu, tahap-tahap penceritaan dalam pertunjukan wayang mengajarkan fase-fase perjalanan hidup manusia, yaitu dari keduniawian menuju kerokhanian. Dalam pertunjukan wayang yang mula-mula digambarkan adalah keadaan keduniawian, seperti kekuasaan, kemewahan, kepuasan, dan lain sebagainya. Tahap berikutnya terjadi peperangan antara golongan angkaramurka (keserakahan dan kejahatan) melawan golongan ksatria (kebenaran dan kebajikan). Tahap akhir, golongan ksatria berhasil menenyapkan golongan angkaramurka sehingga keadaan menjadi damai dan sejahtera.

Tahapan penceritaan dalam pertunjukan wayang tersebut akan menuntun manusia agar dapat mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian yang abadi, yaitu harus meninggalkan nafsu keduniawian dan mengenyahkan dorongan keangkaramurkaan, yang dalam istilah Jawa disebut “*mungkur kadonyan*”.

Etika dan Moral

“Etika” adalah ‘ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)’.¹⁸ Sedangkan “moral” adalah ‘ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan,

sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila’.¹⁹

Dalam wayang, nilai etika dan moral dapat dipetik dalam unsur cerita, bahwa pertunjukan wayang selalu dikonfrontasikan antara kebaikan melawan keburukan atau kebenaran melawan kejahatan. Dalam pertunjukan wayang berbagai karakter baik dan karakter buruk atau perbuatan baik dan perbuatan jahat selalu dimunculkan untuk dipertentangkan, dan dalam akhir cerita/pertunjukan, pihak yang benar atau baik pasti menang, sedangkan pihak yang salah atau buruk pasti kalah.

Gambaran tersebut dapat menyadarkan manusia untuk selalu berusaha berbuat baik dan benar, menghindari perbuatan buruk dan jahat, karena pada akhirnya perbuatan baik dan benar pasti akan keluar sebagai pemenang, sebaliknya perbuatan yang buruk atau jahat pasti akan berada pada pihak yang kalah.

Mental

Mental manusia akan mempengaruhi mentalitasnya, yang selanjutnya akan terwujud dalam perilakunya. “Mental” adalah ‘batin dan watak; bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga’. Adapun “mentalitas” adalah ‘keadaan dan aktifitas jiwa (batin), cara berfikir, dan berperasaan’.²⁰

Ajaran mental dalam wayang dapat dipetik dari gambaran karakter tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh dalam wayang menggambarkan karakter dari berbagai sifat manusia, yaitu sifat serakah, licik, pengecut, bijaksana, pemberani, dan lain sebagainya. Pendek kata, segala sifat dan karakter manusia tergambar dalam karakter tokoh-tokoh wayang.

¹⁸ *Ibid.* hal. 271

¹⁹ *Ibid.* hal. 665

²⁰ *Ibid.* hal. 646

Dalam pertunjukan wayang, karakter masing-masing tokoh digambarkan dalam wujud cara bicara, cara berfikir, dan cara berperilaku beserta hasilnya, yaitu berupa nasib yang dialami pada akhir cerita. Orang yang berkarakter baik akan mendapatkan hasil berupa kebaikan. Sebaliknya orang yang berkarakter buruk akan mendapatkan hasil berupa kehancuran.

Orang yang mengenal wayang biasanya akan mengidolakan diri pada karakter tokoh-tokoh wayang tertentu yang sesuai dengan pandangan dan idaman hatinya. Selanjutnya, karakter tokoh tersebut akan direfleksikan dalam bersikap dan berperilaku, baik dalam cara bicara, cara berfikir, maupun dalam bertutur kata..

Dalam hal ini, mentalitas dan cara pandang seseorang terhadap karakter atau tokoh wayang tertentu akan berbeda antara satu orang dengan orang lain.

Sosial

“Sosial” artinya ‘berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum’.²¹ Nilai sosial yang terkandung dalam wayang dapat dipetik dari beberapa unsur, baik dari unsur cerita maupun dari unsur sarana dan prasarana dalam pertunjukan wayang.

Nilai sosial dalam unsur cerita antara lain dapat dipetik dari isi cerita maupun dari keharmonisan seluruh unsur pembentuk cerita yang mendukung keberhasilan penceritaan lakon yang dipergelarkan. Nilai sosial dari unsur isi cerita misalnya berupa penggambaran kerja sama, kegotong-royongan, tolong menolong dan persatuan tekad, terutama dari golongan ksatria, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian. Hal tersebut dapat menjadi teladan bagi siapa saja yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian demi kepentingan bersama.

Sedangkan nilai sosial dari keharmonisan seluruh unsur pembentuk cerita

adalah bahwa penceritaan sebuah lakon dalam pertunjukan wayang tidak akan berhasil jika unsur-unsur pembentuk cerita tidak saling mendukung dan saling menunjang. Maksudnya, dalam sebuah lakon pasti ada unsur tokoh dari karakter baik, karakter buruk, karakter lucu, ada unsur perusak, pembangun, pemelihara, pembantu, pengganggu, dan lain sebagainya. Semua unsur tersebut harus memerankan peranannya sebagaimana mestinya. Jika tidak, lakon tersebut tidak akan berhasil dengan baik. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa di alam semesta ini terdapat berbagai macam unsur yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya sendiri. Agar kehidupan di alam semesta bisa berjalan dengan baik dan lancar, masing-masing unsur harus berlaku dan bertindak sesuai dengan peran dan fungsinya.

Nilai sosial dari unsur sarana dan prasarana dari pertunjukan wayang antara lain dapat dilihat dari gamelan yang mengiringi pertunjukan wayang. Gamelan menggambarkan keanekaragaman elemen dan komponen dalam kehidupan di alam semesta, yang terdiri dari berbagai macam wujud dan sifatnya. Keharmonisan bunyi gamelan menggambarkan idealisme keharmonisan kehidupan manusia, yaitu walau perangkat gamelan berbeda-beda bentuk dan sifat bunyinya, namun jika dibunyikan sesuai dengan aturan akan terdengar kombinasi bunyi yang sangat harmonis dan damai. Begitu pula halnya dengan manusia. Keanekaragaman manusia jika semua menjalankan hidup sesuai dengan irama kehidupan manusia akan senantiasa damai dan tenteram.

Wayang Pada Masa Kini.

Namun dalam perkembangannya, tampaknya seni pertunjukan wayang semakin kehilangan jati-diri sebagai *tuntunan*, melainkan lebih ditonjolkan sebagai *tontonan*. Terutama dalam perkembangan-

²¹ *Ibid.* hal. 958

nya, banyak dalang yang sengaja mengkomersialkan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi wayang. Namun ironisnya justru dengan begitu dalang bisa mendapatkan keuntungan dari pertunjukan yang bernilai tinggi. Ada dalang yang merasa laku karena keberaniannya untuk *misuh* (berkata jorok). Ada dalang yang merasa laku karena keberaniannya *nyebal pakem* (menyimpang dari aturan). Ada dalang yang merasa laku karena bisa membuat suasana meriah dalam pertunjukan, misalnya menyertakan campur sari, pelawak, bintang tamu, atau orkes melayu untuk ikut aktif berperan dalam pertunjukan, dan sebagainya. Bahayanya, jika kondisi seperti itu dibiarkan terus berkembang, kelak generasi penerus kita tidak akan lagi mengenal wayang sebagai *tontonan* yang penuh *tuntunan*, melainkan *tuntunan* yang ‘begitulah’ yang mereka dapatkan dari wayang.

Kondisi seperti ini cukup membuat banyak pihak merasa prihatin. Hal itu sebagaimana diungkapkan Ki Warsino Gunasukasno bahwa seni pedalangan sekarang dalam kondisi memprihatinkan. Para dalang *dhoyong adeg-adeg* (hampir kehilangan dasar etika dan estetikanya) dan mengesampingkan tata krama atau tata susila.²² Ungkapan yang hampir sama disampaikan oleh Ki Darman Ganda Darsana (almarhum) dengan menyatakan “*saiki wis angel golek dhalang, sing ana wong buruh mayang*” (sekarang sulit menemukan dalang sebab yang ada hanyalah tukang mayang).²³ Karena dalang bukanlah hanya sekedar orang yang bisa memainkan wayang, di samping sebagai seniman, dalang juga berfungsi sebagai juru didik, sebagai ahli falsafah dan kerohanian, sebagai juru

penerang, sebagai juru dakwah, sebagai juru hiburan, sebagai komunikator sosial, di samping juga sebagai pelestari budaya.²⁴ Menurut Emha Ainun Najib dalang sebaiknya memerankan dirinya sebagai pemimpin moral atau guru moral, yang melalui garap *pakelirannya* menyampaikan nilai-nilai moral dan kebenaran sebagaimana “*begawan*”.²⁵

Sebenarnya ‘kemerosotan’ seni pedalangan ini bukan baru terjadi pada masa sekarang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Rustopo, bahwa dalam “Kongres Pedalangan Indonesia” pada tahun 1958 sudah terjadi sorotan negatif terhadap praktik-praktik dalang yang mengutamakan pasar. Kemudian dalam “Seminar Kesenian” tahun 1972 Humardani menyatakan bahwa *pakeliran sapunika saweg gawat kawontenanipun* (keadaan seni pedalangan sedang dalam keadaan gawat). Dalang yang paling laku dengan honorarium tinggi adalah dalang yang merubah pertunjukan wayang kulit menjadi gubahan dagelan yang membuat penonton gaduh, *ger-geran*, sejak *jejer* sampai *tancep kayon*. *Pakeliran* yang diminati masyarakat adalah yang berupa adegan-adegan seru, adegan lucu yang disajikan, serta alunan irama gamelan yang dapat diperdengarkan. Dalang-dalang muda yang berbakat dan mulai mendapatkan perhatian sewajarnya dari penggemar dan publik mencoba mengukuhkan kedudukannya di *pasaran* dengan meniru dan *menge-trapkan resep mendagel*. Humardani menganggap model tersebut sebagai pelopor gaya “murah” sehingga muncul pencipta dari masyarakat lebih baik mendengar irama musik gamelan yang berkualitas seperti yang selama ini dilakukan oleh Ki Nartosabda.²⁶

²² Rustopo. *Peran Dalang di Era Reformasi*. Surakarta: Gelar No.I, Th. 1998, hal. 45

²³ *Ibid.*

²⁴ Haryanto. *Pratiwimba Adiluhung: Sejarah dan Perkembangan Wayang*. Jakarta: Djambatan, 1998, hal. 9 - 18

²⁵ Rustopo. *Ibid.* hal. 50 - 51

²⁶ *Ibid.* hal. 48 - 49

Ungkapan tersebut membuktikan bahwa kondisi kehidupan seni pedalangan sejak 30 tahun yang lalu hingga sekarang tetap saja memprihatinkan. Yang lebih menyedihkan, konon kondisinya sekarang lebih parah dari 30 tahun yang lalu. Hal ini sebagaimana diungkapkan banyak pengamat dan para dalang sendiri yang menyatakan bahwa *pakeliran* gaya Ki Nartasabda masih lebih baik ketimbang gaya *pakeliran* dalang-dalang “*laris*” sekarang.²⁷

Penutup

Demikian uraian sekilas mengenai makna estetik dari seni pertunjukan wayang sebagai *tontonan* yang mengandung *tuntunan* untuk mengerti *tatanan* (kehidupan). Sebagaimana kita ketahui, wayang adalah hasil budaya bangsa yang *adi*

luhung dan banyak mengandung nilai luhur yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberadaan wayang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan untuk diwariskan dari generasi ke generasi, agar tetap eksis sepanjang zaman.

Dewasa ini, keberadaan seni pertunjukan wayang tampak kurang dikenal oleh generasi muda. Untuk itu, melalui media ini diharapkan semoga ada usaha dan tindakan nyata untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan wayang kepada generasi penerus. Ibarat pepatah “tak kenal maka tak sayang”, bagaimana mungkin generasi muda diharapkan untuk mencintai dan melestarikan wayang jika mereka tidak mengenalnya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Djelantik, A.A.M., 1999 “Seni Pertunjukan Ritual dan Politik” dalam *Gelar: Jurnal Ilmu dan Seni STSI Surakarta*. Volume 2 No. 1 Oktober 1999.
- Gelar*, 1999. “Pengantar Redaksi Seni Pertunjukan, Ritual, dan Politik” dalam *Gelar* Vol.2 No.1 Oktober.
- Harjowirogo, 1949. *Sejarah Wayang Purwa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Haryanto, S. 1988. *Pratiwimba Adiluhung: Sejarah dan Perkembangan Wayang*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Haryono, Timbul, 1999. “Sekilas tentang Seni Pertunjukan Masa Jawa Kuno: Refleksi dari Sumber-sumber Arkeologis” dalam *JAWA: Majalah Ilmiah Kebudayaan*. Volume 1 tahun 1999. Halaman 92-110. Yogyakarta: Yayasan Studi Jawa.
- Kanti-Waluya, 2000. *Dunia Wayang: Nilai Estetis, Sakralitas, dan Ajaran Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kayam, Umar, 1999. “Seni Pertunjukan dan Sistem Kekuasaan” dalam *Gelar* Vol.2 No.1 Oktober 1999.
- Mulyono, Sri, 1982. *Wayang dan Filsafat Nusantara*. Jakarta: Gunung Agung.
- Rustopo, 1998. “Peran Dalang di Era Reformasi” dalam *Gelar* Nomor 1 tahun 1/1998.
- Tim Penyusun Kamus PPPB, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

²⁷ *Ibid.* hal. 50

BIODATA PENULIS

SITI MUNAWAROH, lahir di Bantul 26 April 1961. Sarjana Geografi manusia, UGM tahun 1991. Sejak tahun 1992 berstatus sebagai PNS, di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional – Yogyakarta. Sebagai peneliti sering melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Aktif mengikuti berbagai seminar kebudayaan. Beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan antara lain: *Kehidupan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Pembuat Gula Jawa di Desa Karangtengah Imogiri* (1993/1004); *Pergeseran Tatanan Tradisional Sebagai Akibat Modernisasi di Desa Palbapang Bantul* (1994/1995); *Pengaruh Program IDT Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Girirejo, Imogiri* (1996/1997); *Manifestasi Gotongroyong Pada Masyarakat Tengger* (2000); *Masyarakat Using di Banyuwangi Studi Tentang Kehidupan Sosial Budaya* (2001); *Masyarakat Cina: Studi Tentang Interaksi Sosial Budaya di Surabaya* (2002).

CHRISTRIYATI ARIANI, kelahiran Yogyakarta 8 Januari 1964, memperoleh pendidikan bidang Antropologi, Fakultas Sastra UGM (1989), gelar M.Hum dalam bidang Antropologi ditempuh di Antropologi, Program Pascasarjana – UGM (2005). Sejak 1991 bekerja di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional - Yogyakarta sebagai tenaga fungsional peneliti. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti penelitian, seminar, serta penyuluhan di bidang budaya. Hasil-hasil penelitian yang telah dihasilkan antara lain: *Permainan Anak Tradisional di DIY* (1995); *Pandangan Peziarah Terhadap Makam Imogiri* (1996); *Etos Kerja Wanita Jawa di Perkebunan* (2000); *Pola Pengasuhan Anak di Kalangan Keluarga TKI* (2002) dan sebagainya.

SAMROTUL ILMI ALBILADIYAH (59 tahun), sarjana jurusan Arkeologi pada Fakultas Sastra (FIB, sekarang) UGM. Bekerja sebagai tenaga fungsional peneliti, kelompok sejarah, di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional - Yogyakarta, dengan jabatan sekarang Peneliti Muda Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah, penelitian, pengkajian di bidang sejarah dan budaya. Hasil-hasil penelitian antara lain *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, *Ragam Hias Pendapa Mangkunegaran*, dan sebagainya.

SUMINTARSIH, memperoleh gelar sarjana Antropologi, dari UGM tahun 1983, dan magister Antropologi UGM pada tahun 1998. Pernah bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM pada tahun 1974 – 1982. Sejak tahun 1983 menjadi PNS di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional - Yogyakarta, hingga sekarang. Hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional antara lain: *Strategi Adaptasi Penduduk Rawapening*; *Perajin Batik Wukirsari, Imogiri*; *Wanita Perajin Tenun Gedog, Tuban*; *Eksistensi Perajin Tenun Kulon Progo*; *Sumbang Menyumbang di Lingkungan Masyarakat Perajin Akik Pacitan*; *Sistem Pengetahuan Aktifitas Nelayan Bonang*; *Strategi Adaptasi Masyarakat di Daerah Rawan Penggenangan di Daerah Demak*; *Aspirasi di Lingkungan Generasi Muda Pedesaan*. Selain itu beberapa hasil penelitian yang telah diterbitkan oleh penerbit profesional antara lain: *Khasanah Budaya Lokal* (Adicita, 2000) dan *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa: Esai-Esai Antropologi Ekonomi* (Keppel Press, 2003).

TASHADI, kelahiran Rembang 12 Januari 1944. Memperoleh pendidikan di bidang sejarah antropologi IKIP Negeri Malang (1969). Pernah mengikuti Pelatihan Calon Penata Tenaga Kebudayaan di Bogor, 1984; SEPADYA (Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya) di Jakarta, 1992. Sejak tahun 2004 berhak menyandang Ahli Peneliti Utama (APU) dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebagai Ketua Dewan Redaksi Patra-Widya, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional – Yogyakarta (2000 – 2002). Sebagai peneliti, seringkali melakukan penelitian terutama yang berhubungan dengan kesejarahan, juga mengikuti seminar baik sebagai pemakalah maupun peserta. Buku-buku yang dihasilkan antara lain: *Biografi RA.Kartini* (1980); *Biografi Dr. Setiabudhi* (1981); *Biografi Wahidin Sudirohusodo* (1992); serta berbagai hasil tulisan yang dilakukan atas kerjasama dengan instansi atau lembaga-lembaga profesi. Di samping melakukan penelitian, dan penulisan, juga aktif di berbagai organisasi antara lain sebagai Dewan Ahli Lembaga Javanologi Yogyakarta (1994 – 1999); sebagai Wakil Ketua II MSI (Masyarakat Sejarahwan Indonesia) (1997 – 2000); serta sebagai anggota Dewan Kebudayaan Propinsi DIY (2003 -2008).

DWI RATNA NURHAJARINI, lahir di Yogyakarta 1966, sarjana Sejarah UGM, memperoleh gelar Magister Humaniora Ilmu Sejarah UGM tahun 2003. Sebagai Staf Peneliti di Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta, aktif melakukan penelitian kesejarahan serta duduk sebagai sekretaris I di dalam organisasi profesi kesejarahan Masyarakat Sejarahwan Indonesia (MSI) cabang Yogyakarta tahun 2006 – 2010. Hasil karya yang telah diterbitkan antara lain: *ORI, Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa (1946 – 1950)*; *Sanering Uang Tahun 1950: Studi Kasus “Gunting Syafrudin” Akibatnya dalam Bidang Sosial Ekonomi di Indonesia (1997/1998)*; *Peranan Masyarakat Sumbertirto Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan 1948 – 1949 (1998/1999)*; *Pertanian dan Ekonomi Petani: Studi Ekonomi Pedesaan di Yogyakarta 1920 -1935 (1999/2000)*; *Dinamika Industri Batik Pekalongan 1930 -1970 (2001)*; *Diversifikasi Pakaian Perempuan: Studi Tentang Perubahan Sosial di Yogyakarta 1940 – 1950 (2002)*; *Batik Belanda: Wanita Indo Belanda dan Bisnis “Malam” di Pekalongan 1900 – 1942 (2003)*; *Petani Versus Perkebunan Pada Masa Reorganisasi Agraria: Studi Kasus di Klaten (2004)*.

ERNAWATI PURWANINGSIH, kelahiran Yogyakarta 21 Agustus 1971. memperoleh gelar S.Si jurusan Geografi Manusia, Fakultas Geografi, UGM (1996). Sejak tahun 1997 sebagai peneliti di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional – Yogyakarta, sebagai Asisten Peneliti Madya, bidang Sejarah dan Nilai Tradisional. Seringkali mengikuti kegiatan seminar, penelitian, diskusi. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain: *Strategi Adaptasi Petani di Kulon Progo (2004)*; *Aktivitas Penambangan Breksi Batu Apung di Desa Sambirejo, Prambanan (2005)*; *Aktivitas Budidaya Udang di Tambak: Sebagai Alternatif Bagi Petani Desa Karanganyar (2005)*; *Budaya Spiritual Petilasan Parangkusuma dan Sekitarnya (2003)*, dan sebagainya.

SUYAMI, kelahiran Magelang 1 Januari 1965. Lulusan Jurusan Sastra Jawa UNS – Surakarta (1988). Magister Humaniora – UGM (1999). Sejak tahun 1990 hingga kini aktif melakukan penelitian kebudayaan, terutama mengkaji naskah kuna. Sebagai Peneliti Madya, aktif menulis dan mengisi artikel pada berbagai jurnal dan terbitan ilmiah, serta aktif sebagai pemrasaran dalam berbagai pertemuan ilmiah. Sejak tahun 1990 mengabdikan sebagai PNS di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. Hasil-hasil penelitian yang telah

diterbitkan antara lain: *Serat Cariyos Dewi Sri Dalam Perbandingan* (Keppel-Press-2000); *Tinjauan Historis Serat Babad Kediri* (Direktorat Jarahnitra, Jakarta); *Kajian Mitos Dalam Kitab Tantu Panggelaran*; *Makna Filosof Dalam Aksara Jawa*; *Mistik Islam Dalam Kitab Kanjeng Kyai Suryorojo* (YKII – Yogyakarta); *Mistik Islam Dalam Primbon* (YKII – Yogyakarta); *Pembinaan Budi Pekerti Melalui Permainan Anak Tradisional*, dalam Jurnal TONIL (ISI – Yogyakarta).

ISSN 1907-9605



9 771907 960513